



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 26/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM;

Tempat lahir : Singapore;

Umur / tgl. lahir : 54 Tahun /16 April 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. M. Yamin – Bangkinang – Prop. Riau.

Jl. Kelapa Sawit Simpang Jl. Tanjung,

Pekanbaru Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau;

Pendidikan : S2 Magister Manajemen;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 12 Februari 2012;
2. Surat Perintah Perpanjangan oleh Penuntut Umumj pada Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012;

Hal. 1 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 22 April 2012;
4. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012;
5. Penahanan Penuntut Umum KPK, sejak tanggal tanggal 23 Mei 2012 s/d 10 Juni 2012;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juni 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012 di Tahan di Polda Riau;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke I, sejak tanggal 2 September 2012 s/d tanggal 1 Oktober 2012;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke II, sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 November 2012;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 November 2012 s/d tanggal 27 Januari 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 26/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti perkara ini oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Hal. 2 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 Nomor: 21/Pid.Sus/2012/ PN.PBR dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK RI tanggal 04 Juni 2012 NOMOR : DAK-08/24/06/2012 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM. selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO, dan bersama-sama dengan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Desember 2002 sampai dengan bulan September 2006, bertempat di Kantor Bupati Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim No. 9 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46

Hal. 3 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum**yaitu menilai dan

mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HT yaitu PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak, secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

Hal. 4 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu telah memperkaya PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. 69.913.222.405,86 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah delapan puluh enam sen), PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 23.333.201.893,10 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah sepuluh sen), CV. ALAM LESTARI sejumlah Rp. 14.795.468.366,94 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen), PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp. 32.465.316.461,52 (tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima

Hal. 5 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh dua sen), PT. UNISERAYA sejumlah Rp. 18.227.044.239,86 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen), PT. RIMBA

MUTIARA PERMAI sejumlah Rp. 46.500.120.097,80 (empat puluh enam milyar lima ratus juta seratus dua puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen), PT. TRIO MAS FDI sejumlah Rp. 22.105.262.785,33 (dua puluh dua milyar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen), PT. MADUKORO sejumlah Rp. 128.002.732.817,92 (seratus dua puluh delapan milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen), PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp. 34.376.426.101,70 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus satu rupiah tujuh puluh sen), PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp. 10.830.839.767,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), PT. BINA DAYA BINTARA sejumlah Rp. 66.850.242.894,12 (enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua belas sen), PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT sejumlah Rp. 52.180.840.959,72 (lima puluh dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah merugikan keuangan negara keseluruhannya sejumlah Rp. 519.580.718.790,87 (lima ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan

Hal. 6 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

## **Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan:**

- H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar bulan Desember 2002 **sampai** dengan bulan Januari 2003, telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO, dimana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:

1. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas  $\pm$  5.590 Ha di Kab. Pelalawan;
2. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. SELARAS ABADI UTAMA seluas  $\pm$  13.600 Ha (brutto) dan  $\pm$  11.690 Ha (netto) di Kab. Pelalawan;
3. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. UNISERAYA seluas  $\pm$  35.000 Ha di Kab. Pelalawan;
4. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA  
Hal. 7 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIARA PERMAI seluas  $\pm$  9.000 Ha di Kab. Pelalawan;

5. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA TANI NUSA SEJATI seluas  $\pm$  7.300 Ha di Kab. Pelalawan;

6. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. TRIOMAS FDI seluas  $\pm$  9.625 Ha di Kab. Pelalawan;

7. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/015 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. ALAM LESTARI seluas  $\pm$  3.300 Ha di Kab. Pelalawan;

8. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MADUKORO seluas  $\pm$  15.000 Ha di Kab. Pelalawan;

- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO selanjutnya mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam, masing-masing dengan surat:

1. Surat dari PT. MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 094/MTS/PKU/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan Penambahan Areal

Hal. 8 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Blok RKT- UPHHKHT Tahun 2005 PT. MITRA TANINUSA SEJATI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur Utama;

2. Surat dari PT. MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 217/MTS/PKU/ X/ 2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan Penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. MITRA TANINUSA SEJATI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur Utama;
3. Surat dari PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor : 135/RMP/PKU/ X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Presiden Direktur;
4. Surat dari PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor : 109/MPL- PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur;
5. Surat dari PT. UNISERAYA, Nomor : 085/US/PKU-X/2005 tanggal tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan pengesahan RKT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHKHT PT. UNISERAYA, yang ditandatangani oleh SUPENDI selaku Presiden Direktur;
6. Surat dari PT. TRIOMAS FDI, Nomor : 167/TM/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pengesahan RKT UPHHKHT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHKHT PT. TRIOMAS FDI, yang ditandatangani oleh Hal. 9 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENDI selaku Presiden Direktur;

7. Surat dari PT. SELARAS ABADI UTAMA, Nomor : 109/SAU/XI/2005 tanggal 02 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pengajuan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. SELARAS ABADI UTAMA, yang ditandatangani oleh Ir. HUSNI DJALANIDI selaku Direktur;

8. Surat dari CV. ALAM LESTARI, Nomor : 085/AL/XI/2005 tanggal 02 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal Pengajuan URKT UPHHKHT Tahun 2006 CV. ALAM LESTARI, yang ditandatangani SAID EDDY selaku Direktur;

9. Surat dari PT. MADUKORO, Nomor : 129/MK/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan Penilaian dan pengesahan

URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. MADUKORO, yang ditandatangani oleh ANDRI YAMA PUTRA selaku Direktur;

yang tembusan masing-masing permohonan tersebut disampaikan kepada Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan;

- Drs. EDI SURIANDI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT, yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pertimbangan teknis untuk melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-masing melalui surat :

1. Surat Nomor : No.522.22/PI/XII/2004/0215 tanggal 19 September

Hal. 10 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2005 perihal Pertimbangan Teknis RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2005 (tambahan target) a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) dengan luas 2100 Ha dengan potensi tegakan 130,55 M3/Ha;
2. Surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/6903 tanggal 01 Maret 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan luas Hutan Alam 1.000 Ha dengan potensi tegakan 139,78 M3/Ha;
3. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/7502 tanggal 10 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan dengan luas 1.340 Ha dengan volume masing-masing Kayu Bulat (KB) = 36.488,2 M3, Kayu Bulat Kecil (KBK) = 57.727,2 M3, Bahan Baku Serpih (BBS) = 121.819,4 M3;
4. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/6702 tanggal 07 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan dengan luas 4.400 Ha dengan potensi tegakan 113,78 M3/Ha;
5. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/0002 tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan luas Hutan Alam 2.362 Ha dengan potensi tegakan 99,40 M3/Ha;
6. Surat Nomor : No. 522.22/PI/II/2006/8702 tanggal 14 Pebruari Hal. 11 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. UNISERAYA yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan dengan luas 7.111 Ha dengan potensi tegakan 107,45 M3/Ha;

7. Surat Nomor : 522.22/PI/III/2006/7003 tanggal 01 Maret 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.TRIOMAS FDI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan Hutan Alam luas 2.252,6 Ha dengan potensi tegakan 99,44 M3/Ha;

8. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/7202 tanggal 09 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. CV. ALAM LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan Hutan Alam luas 635 Ha dengan potensi tegakan 172,29 M3/Ha;

9. Surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/7403 tanggal 02 Maret 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.MADUKORO yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan luas Hutan Alam 4.908 Ha dengan potensi tegakan 156,72 M3/Ha;

- Terdakwa, atas permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan dan pertimbangan teknis dari Drs. EDI SURIANDI tersebut, kemudian memerintahkan Ir. FADRIZAL LABAY selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk menindaklanjutinya dan atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. FADRIZAL LABAY selanjutnya memerintahkan Ir. FREDERIK SULI selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untuk melakukan koordinasi dengan Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selaku Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam serta membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam

Hal. 12 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dimaksud;

- Atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selanjutnya membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:

1. Nota Dinas Nomor : 29/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.MITRA TANINUSA SEJATI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 1000 Ha dengan target produksi sebesar 145.904 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 08 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) -----: 15.344 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 130.560 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing 20-29$  cm : 50.223 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing 08-19$  cm : 67.640 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 6.576 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 4.384 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 1.737 M<sup>3</sup>;

2. Nota Dinas Nomor : 36/PK/HA/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan  
Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 1.340 Ha dengan target produksi sebesar 232.253 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis  
Hal. 13 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu diameter 10 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) -----: 34.828 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 197.425 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 65.350 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  10-19 cm : 103.797 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 14.926 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 9.951 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 3.401 M<sup>3</sup>.

## 3. Nota Dinas Nomor : 24/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n.  
PT.RIMBA MUTIARA PERMAI yang menyimpulkan dalam blok RKT  
yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 4.400 Ha  
dengan target produksi sebesar 524.872 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis  
kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 60.769 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 464.103 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 200.200 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  08-19 cm : 213.620 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 26.044 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 17.362 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 6.877 M<sup>3</sup>.

## 4. Nota Dinas Nomor : 18/PK/HA/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 2.362 Ha Hal. 14 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan target produksi sebesar 244.113 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 32.654 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : --211.459 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 85.733 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  08-19 cm : 101.401 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 13.995M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 9.330 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 0.00 M<sup>3</sup>.

5. Nota Dinas Nomor : 25/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. UNISERAYA yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 7.111 Ha dengan target produksi sebesar 792.491 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 10 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : -----76.606 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : ----715.885 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 80.211 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  10-19 cm : 574.426 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 32.832M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 21.888 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 6.528 M<sup>3</sup>;

6. Nota Dinas Nomor : 44/PK/HA/VII/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. CV. ALAM LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 635 Ha dengan

Hal. 15 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target produksi sebesar 111.298 M<sup>3</sup> untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 6.623 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 104.675 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 32.849 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  08-19 cm : 67.094 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 2.839 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 1.893 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 0.00 M<sup>3</sup>.

7. Nota Dinas Nomor : 33/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 2.252,60 Ha dengan target produksi sebesar 231.482 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 20.420 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 211.062 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 25.883 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  08-19 cm : 168.945 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 8.751 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 5.834 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 1.649 M<sup>3</sup>.
- Terdakwa, meskipun mengetahui penerbitan IUPHHKHT-IUPHHKHT oleh H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Hal. 16 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dan mengetahui URKT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan tersebut berisi rencana penebangan kayu hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5m<sup>3</sup>/Ha yang seharusnya tidak boleh dilakukan penebangan, akan tetapi Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005, tanggal 26 Desember 2005, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tetap melakukan pengesahan URKT-UPHHKHT yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu :

1. KPTS/522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Pengesahan tambahan target RKT-UPHHKHT tahun 2005 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI di areal seluas 2.250 Ha (Bruto) atau seluas 2.015 Ha (netto);
2. KPTS/522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan RKT-UPHHKHT a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI di areal seluas 3.000 Ha (Bruto) atau 2.750 Ha (Netto);
3. KPTS/522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan RKT-UPHHKHT a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI di areal seluas 2.624 Ha (Bruto) atau 2.185 Ha (Netto);
4. KPTS/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan

Hal. 17 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKT tahun 2006 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI di areal seluas 5.771Ha (Bruto) atau 4.595 Ha (Netto);

5. KPTS/522.2/PK/1005 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA di areal seluas 4.032 Ha (Bruto) atau 1.437 Ha (Netto);

6. KPTS/522.2/PK/2331 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. UNISERAYA di areal seluas 7.291 Ha (Bruto) atau 6.000 Ha (Netto);

7. KPTS/522.2/PK/2334 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI di areal seluas 2.902,7 Ha (Bruto) atau 2.155,7 Ha (Netto);

8. KPTS/522.2/PK/3274 tanggal 01 September 2006 tentang Penge-

sahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. CV. ALAM LESTARI di areal seluas 635 Ha (Bruto) atau 600 Ha (Netto);

9. KPTS/522.2/PK/2520 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. MADUKORO di areal seluas 5.942 Ha (Bruto) atau 4.832 Ha (Netto);

Atas dasar pengesahan RKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan RKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campura n	KBK	BBS
		(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
1	PT. Alam Lestari	2 .297,98	4 .324,93	25 .584,22	47. 126,02
2	PT. Madukoro	27 . 614,63	17 . 313,18	173 . 587,29	459. 586,96

Hal. 18 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. Merbau Pelalawan Lestari	8 . 206,40	35 . 464,95	131 . 322,84	-
4	PT. Mitra Taninusa Sejati	2 . 141,16	9 .282,35	71 .826,76	208 .496,99
5	PT. Mitra Taninusa Sejati	240,28	706,52	10 . 087,09	52 . 106,52
6	PT. Rimba Mutiara Permai	5. 845,89	19 . 898,18	50 . 675,74	174 .636,26
7	PT. Selaras Abadi Utama	1 .170,04	163,96	45 .373,88	83 .672,36
8	PT. Triomas FDI	4. 567,79	4. 986,15	7. 676,24	101. 161,94
9	PT. Uniseraya	9. 153,96	5. 634,02	11. 744,78	64. 713,61

- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang yang ditetapkan Menteri perdagangan dan perindustrian/Menteri perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT. Alam Lestari	17. 279.357.960,00
2	PT. Madukoro	148. 168.816.000,00
3	PT. Merbau Pelalawan Lestari	41. 532.544.360,00
4	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	61. 041.329.184,00
5	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	13. 018.776.440,00
6	PT. Rimba Mutiara Permai	54. 856.047.000,00
7	PT. Selaras Abadi Utama	26. 959.640.960,00
8	PT. Triomas FDI	25. 982.728.720,00

Hal. 19 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT. Uniseraya	21. 864.696.744,00
	<b>Jumlah</b>	<b>410. 703.937.368,00</b>

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan URKT-URKT tersebut, telah memperkaya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

1. PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp.69.913.222.405,86 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam sen);
2. PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp.23.333.201.893,10 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah sepuluh sen);
3. CV. ALAM LESTARI sejumlah Rp.14.795.468.366,94 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen);
4. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp.32.465.316.461,52 (tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh dua sen);
5. PT. UNISERAYA sejumlah Rp.18.227.044.239,86 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen);
6. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp.46.500.120.097,80 (empat puluh enam milyar lima ratus juta seratus dua puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen);
7. PT. TRIO MAS FDI sejumlah Rp.22.105.262.785,33 (dua puluh dua

Hal. 20 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen);

8. PT. MADUKORO Rp.128.002.732.817,92 (seratus dua puluh delapan milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen);

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 355.342.369.068,33 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum

setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT. Alam Lestari	17.279.357.960,00	392.977.400,00	2.090.912.193,06	14.795.468.366,94
2	PT. Madukoro	148.168.816.000,00	3.191.802.370,00	16.974.280.812,08	128.002.732.817,92
3	PT. Merbau Pelawan Lestari	41.532.544.360,00	1.742.167.093,00	7.352.060.805,48	32.465.316.461,52
4	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	61.041.329.184,00	314.731.200,00	1.057.163.587,20	59.669.434.396,80
5	PT. Mitra Tani	13.018.776.440,00	474.807.604,40	2.300.180.826,54	10.243.788.009,06

Hal. 21 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nusa				
6	PT. Rimba Mutiara Permai	54. 856.047.000,00	1. 348.876.380,00	7. 007.050.522,20	46. 500.120.097,80
7	PT. Selaras Abadi Utama	26. 959.640.960,00	529. 167.182,60	3. 097.271.884,30	23. 333.201.893,10
8	PT. Triomas FDI	25. 982.728.720,00	619. 988.531,92	3. 257.477.402,75	22. 105.262.785,33
9	PT. Unisera ya	21. 864.696.744,00	793. 705.073,32	2. 843.947.430,82	18. 227.044.239,86
	Jumlah	410. 703.937.368,00	9. 408.222.835,24	45. 953.345.464,43	355. 342.369.068,33

## Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak.

- H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak pada sekitar bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2003, telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, dimana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu :
  1. Keputusan Bupati No. 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Seraya Sumber Lestari seluas  $\pm$  16.875 Ha di Kab. Siak;
  2. Keputusan Bupati No. 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003

Hal. 22 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. National Timber & Forest Product seluas  $\pm$  8.200 Ha di Kab. Siak;

3. Keputusan Bupati No. 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha di Kab. Siak;

4. Keputusan Bupati No. 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  6.400 Ha di Kab. Siak;

- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH tersebut, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, dan PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam, masing-masing dengan surat:

1. Surat dari PT. BINA DAYA BINTARA, Nomor : 052/BDB/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. BINA DAYA BINTARA, yang ditandatangani oleh Ir. H. FICKY ZZ selaku Direktur;
2. Surat dari PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Nomor : 058/SSL-DIR/BDB/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI selaku Hal. 23 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama;

3. Surat dari PT. RIMBA MANDAU LESTARI, Nomor : 018/RML-PKU/UM/X/2005 tanggal 2 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. PRAPTO selaku Direktur Utama;

4. Surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Nomor : 203/NT/HTI-C/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja UPHHK-HT Tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditandatangani oleh HERIYANTO selaku Direktur Utama;

yang tembusan masing-masing permohonan tersebut disampaikan kepada Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;

- Ir. H. AMIN BUDYADI, MM, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT, yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pertimbangan teknis yang masing-masing melalui surat:

1. Surat Nomor : 522.2/Prod/4860 tanggal 09 Desember 2005 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. BINA DAYA BINTARA yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) luas areal 397 Ha (Luncuran) dengan taksasi volume sebesar 74.492 M<sup>3</sup> dan luas areal 3.055 Ha (Murni) dengan taksasi volume sebesar 573.237 M<sup>3</sup>;

2. Surat Nomor : 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 perihal Hal. 24 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) luas areal 1.550 Ha (Luncuran) dengan potensi tegakan sebesar 123.91 M<sup>3</sup> dan luas areal 1.950 Ha (Murni) dengan potensi tegakan sebesar 123.91 M<sup>3</sup>;

3. Surat Nomor : 522.2/Prod/4804 tanggal 06 Desember 2005 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 An. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan/ Pemanenan (hutan alam) luas areal penebangan 2.897 Ha, dengan taksasi volume 267.369,04 M<sup>3</sup> yang meliputi diameter 30 cm Up sebesar 9.467,24 M<sup>3</sup>, diameter 20-29 cm sebesar 27.850,70 M<sup>3</sup> dan BBS sebesar 230.054,10 M<sup>3</sup>;

4. Surat Nomor : 522.2/Prod/258 tanggal 30 Januari 2006 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang isinya antara lain menyebut-

kan Rencana Penebangan/Pemanenan dengan luas areal 1.650 Ha dengan taksasi produksi 220.544 M<sup>3</sup> yang meliputi:

- Kayu Pertukangan : 39.305 M<sup>3</sup>;
  - KBK (Ø 20-29 cm) : 72.320 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Ø 10-19 cm : 80.339 M<sup>3</sup>;
  - Pecah/growong : 16.845 M<sup>3</sup>;
  - Cabang Ø < 30 cm : 11.230 M<sup>3</sup>;
  - Cabang Ø > 30 cm : 505 M<sup>3</sup>.
- Terdakwa, atas permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut dan pertimbangan

Hal. 25 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dari Ir. H. AMIN BUDYADI, MM, kemudian memerintahkan Ir. FADRIZAL LABAY selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk menindaklanjutinya dan atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. FADRIZAL LABAY selanjutnya memerintahkan Ir. FREDERIK SULI selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untuk melakukan koordinasi dengan Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selaku Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam serta membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dimaksud;

- Atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selanjutnya membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:

**1. Nota Dinas Nomor : 27/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan**

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.BINA DAYA BINTARA yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 3.452 Ha dengan target produksi sebesar 642.660 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 08 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) -----: 101.204 M<sup>3</sup>
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : ----- 541.456M<sup>3</sup>, meliputi:
  - Ø 20-29 cm : 75.493 M<sup>3</sup>;
  - Ø 08-19 cm : 389.155 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 43.373M<sup>3</sup>;

Hal. 26 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 28.915 M<sup>3</sup>;
- Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 4.520 M<sup>3</sup>.

2. Nota Dinas Nomor : 41/PK/HA/VI/2006 tanggal 07 Juli 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 2.897 Ha dengan target produksi sebesar 267.371 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 10 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 9.467 M<sup>3</sup>
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 257.904M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 27.853 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  10-19 cm : 222.609 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 4.057M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 2.705 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 680 M<sup>3</sup>.

3. Nota Dinas Nomor : 31/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 3.500 Ha dengan target produksi sebesar 476.952 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 08 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 109.934 M<sup>3</sup>
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 366.992 M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 101.637 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  10-19 cm : 175.273 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 47.114M<sup>3</sup>;

Hal. 27 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 31.409 M<sup>3</sup>;
- Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 11.559 M<sup>3</sup>.

4. Nota Dinas Nomor: 32/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. National Timber & Forest Product;

- Terdakwa, meskipun mengetahui penerbitan IUPHHKHT-IUPHHKHT oleh H. Arwin AS, SH tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dan mengetahui URKT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan tersebut berisi rencana penebangan kayu hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5 m<sup>3</sup>/Ha yang seharusnya tidak boleh

dilakukan penebangan, akan tetapi Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005, tanggal 26 Desember 2005, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tetap melakukan pengesahan URKT-UPHHKHT yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu :

Hal. 28 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KPTS/522.2/PK/2224 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. BINA DAYA BINTARA di areal seluas 4.872 Ha (Bruto) atau 3.482 Ha (Netto);
  2. KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 4.150 Ha (Bruto) atau 3.900 Ha (Netto);
  3. KPTS/522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di areal seluas 3.363 Ha (Bruto) atau 2.856 Ha (Netto);
  4. KPTS/522.2/PK/2223 tanggal 01 September 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT di areal seluas 1.920 Ha (Bruto) atau 1.550 Ha (Netto);
- Atas dasar pengesahan RKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan RKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campura n	KBK	BBS
		(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
1	PT. Bina Daya Bintara	17. 997,58	51. 568,19	289. 747,43	-
2	PT. Seraya Sumber Lestari	10. 371,53	9. 477,42	144. 680,25	-
3	PT. Rimba Mandau Lestari	-	-	27. 763,86	31. 157,08
4	PT. National Timber And Forest Product	757,7	17. 497,45	267. 426,60	-

Hal. 29 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri perdagangan dan perindustrian / Menteri perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar :

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT. Bina Daya Bintara	83. 577.722.720,00
2	PT. Seraya Sumber Lestari	37. 543.762.000,00
3	PT. Rimba Mandau Lestari	12. 019.872.372,00
4	PT. <i>National Timber And Forest Product</i>	60. 183.111.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>193. 324.468.492,00</b>

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan URKT-URKT tersebut, telah memperkaya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR),

dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

1. PT. BINA DAYA BINTARA sejumlah Rp. 66.850.242.894,12 (enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua belas sen);
2. PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp.34.376.426.101,70 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus satu rupiah tujuh puluh sen);
3. PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp.10.830.839.767,00

Hal. 30 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

4. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT sejumlah Rp.52.180.840.959,72 (lima puluh dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.164.238.349.722,54 (seratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh empat sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT. Bina Daya Bintara	83.577.722.720,00	3.038.082.262,40	13.689.397.563,48	66.850.242.894,12
2	PT. Serya Sumber Lestari	37.543.762.000,00	571.377.704,00	2.595.958.194,30	34.376.426.101,70
3	PT. Rimba Mandau Lestari	12.019.872.372,00	120.198.724,00	1.068.833.881,00	10.830.839.767,00

Hal. 31 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. Nasiona I Timber And Forest Product	60. 183.111.400,00	1. 108.358.823,00	6. 893.911.617,28	52. 180.840.959,72
	Jumlah	193. 324.468.492,00	4. 838.017.513,40	24. 248.101.256,06	164. 238.349.722,54

- Dari seluruh rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa mengesahkan permohonan RKT UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keseluruhannya berjumlah **Rp. 519.580.718.790,87 (lima ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh tujuh sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

## SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.** selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, Hal. 32 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO, dan bersama-sama dengan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Desember 2002 sampai dengan bulan September 2006, bertempat di Kantor Bupati Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim No. 9 Siak Sri Indrapura, Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekanbaru Riau, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah melakukan serangkaian perbuatan yang**

**masing-**

**masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu telah menguntungkan korporasi PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp. 69.913.222.405,86 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah delapan puluh enam sen), PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp. 23.333.201.893,10 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga

Hal. 33 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah sepuluh sen), CV. ALAM LESTARI sejumlah Rp.

14.795.468.366,94 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen), PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp. 32.465.316.461,52 (tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh dua sen), PT. UNISERAYA sejumlah Rp. 18.227.044.239,86 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen), PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp. 46.500.120.097,80 (empat puluh enam milyar lima ratus juta seratus dua puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen), PT. TRIO MAS FDI sejumlah Rp. 22.105.262.785,33 (dua puluh dua milyar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen), PT. MADUKORO sejumlah Rp. 128.002.732.817,92 (seratus dua puluh delapan milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen), PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp. 34.376.426.101,70 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus satu rupiah tujuh puluh sen), PT. RIMBA MANDAU

LESTARI sejumlah Rp. 10.830.839.767,00 (sepuluh milyar delapan ratus

tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), PT. BINA DAYA BINTARA sejumlah Rp. 66.850.242.894,12 (enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua belas sen), PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT sejumlah Rp. 52.180.840.959,72 (lima puluh dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima

Hal. 34 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen), **menyalahgunakan**

**kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena**

**jabatan atau kedudukan,** yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor:

Kpts.383/ VIII/2005 tanggal 09 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan

Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Propinsi Riau, karena

jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana

Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004

tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana

Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005

tanggal 26 Desember 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-

II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja

Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman mempunyai kewenangan melakukan penilaian

dan

pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu

pada Hutan Tanaman (RKT UPHHKHT) telah melakukan penilaian dan

mengesahkan usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan oleh

perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HT yaitu PT. MITRA

TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT.

Hal. 35 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HT yaitu PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang lokasi areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata

Hal. 36 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu telah merugikan keuangan negara keseluruhannya sejumlah Rp.519.580.718.790,87 (lima ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan .**

- H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO, dimana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:

1. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tanggal 17

Hal. 37 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas  $\pm$  5.590 Ha di Kab. Pelalawan;

2. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. SELARAS ABADI UTAMA seluas  $\pm$  13.600 Ha (brutto) dan  $\pm$  11.690 Ha (netto) di Kab. Pelalawan;

3. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. UNISERAYA seluas  $\pm$  35.000 Ha di Kab. Pelalawan;

4. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas  $\pm$  9.000 Ha di Kab. Pelalawan;

5. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MITRA TANI NUSA SEJATI seluas  $\pm$  7.300 Ha di Kab. Pelalawan;

6. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. TRIOMAS FDI seluas  $\pm$  9.625 Ha di Kab. Pelalawan;

7. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/015 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV. ALAM LESTARI seluas  $\pm$  3.300 Ha di Kab. Pelalawan;

8. Keputusan Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. MADUKORO seluas  $\pm$  15.000 Ha di Kab. Pelalawan;

- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. SELARAS ABADI

Hal. 38 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UTAMA, CV. ALAM LESTARI, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. UNISERAYA, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIO MAS FDI, PT. MADUKORO mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau *land clearing* yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam, masing-masing dengan surat:

1. Surat dari PT. MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 094/MTS/PKU/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan Penambahan Areal Blok RKT- UPHHKHT Tahun 2005 PT. MITRA TANINUSA SEJATI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur Utama;
2. Surat dari PT. MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 217/MTS/PKU/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan Penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. MITRA TANINUSA SEJATI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur Utama;
3. Surat dari PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor : 135/RMP/PKU/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Presiden Direktur.
4. Surat dari PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor : 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan

Hal. 39 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penilaian

dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur;

5. Surat dari PT. UNISERAYA, Nomor : 085/US/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan pengesahan RKT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHKHT PT. UNISERAYA, yang ditandatangani oleh SUPENDI selaku Presiden Direktur;
6. Surat dari PT. TRIOMAS FDI, Nomor : 167/TM/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pengesahan RKT UPHHKHT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHKHT PT. TRIOMAS FDI, yang ditandatangani oleh SUPENDI selaku Presiden Direktur;
7. Surat dari PT. SELARAS ABADI UTAMA, Nomor : 109/SAU/XI/2005 tanggal 02 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pengajuan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. SELARAS ABADI UTAMA, yang ditandatangani oleh Ir. HUSNI DJALANIDI selaku Direktur;
8. Surat dari CV. ALAM LESTARI, Nomor : 085/AL/XI/2005 tanggal 02 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal Pengajuan URKT UPHHKHT Tahun 2006 CV. ALAM LESTARI, yang ditandatangani SAID EDDY selaku Direktur;
9. Surat dari PT. MADUKORO, Nomor : 129/MK/XI/2005 tanggal 15 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan Penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. MADUKORO, yang

Hal. 40 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh ANDRI YAMA PUTRA selaku Direktur;

yang tembusan masing-masing permohonan tersebut disampaikan kepada Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan;

- Drs. EDI SURIANDI, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT, yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pertimbangan teknis yang masing-masing melalui surat:

1. Surat Nomor : No.522.22/PI/XII/2004/0215 tanggal 19 September 2005 perihal Pertimbangan Teknis RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2005 (tambahan target) a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) dengan luas 2100 Ha dengan potensi tegakan 130,55 M3/Ha;
2. Surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/6903 tanggal 01 Maret 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan luas Hutan Alam 1.000 Ha dengan potensi tegakan 139,78 M3/Ha;
3. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/7502 tanggal 10 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan dengan luas 1.340 Ha dengan volume masing-masing Kayu Bulat (KB) = 36.488,2 M3, Kayu Bulat Kecil (KBK) = 57.727,2 M3, Bahan Baku Serpih (BBS) = 121.819,4 M3;
4. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/6702 tanggal 07 Pebruari 2006  
Hal. 41 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan  
Tanaman

Tahun 2006 a.n. PT.RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan dengan luas 4.400 Ha dengan potensi tegakan 113,78 M3/Ha;

5. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/0002 tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan luas Hutan Alam 2.362 Ha dengan potensi tegakan 99,40 M3/Ha;

6. Surat Nomor : No. 522.22/PI/II/2006/8702 tanggal 14 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. UNISERAYA yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan dengan luas 7.111 Ha dengan potensi tegakan 107,45 M3/Ha;

7. Surat Nomor : 522.22/PI/III/2006/7003 tanggal 01 Maret 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.TRIOMAS FDI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan Hutan Alam luas 2.252,6 Ha dengan potensi tegakan 99,44 M3/Ha;

8. Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/7202 tanggal 09 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. CV. ALAM LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan Hutan Alam luas 635 Ha dengan potensi tegakan 172,29 M3/Ha;

9. Surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/7403 tanggal 02 Maret 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.MADUKORO yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan atas penyiapan lahan luas Hal. 42 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Alam 4.908 Ha dengan potensi tegakan 156,72 M3/Ha;

- Terdakwa, atas permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut dan pertimbangan teknis dari Drs. EDI SURIANDI, kemudian memerintahkan Ir. FADRIZAL LABAY selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk menindaklanjutinya dan atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. FADRIZAL LABAY selanjutnya memerintahkan Ir. FREDERIK SULI selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untuk melakukan koordinasi dengan Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selaku Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam serta membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dimaksud;
- Atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selanjutnya membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:

**1.** Nota Dinas Nomor : 29/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.MITRA TANINUSA SEJATI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 1000 Ha dengan target produksi sebesar 145.904 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 08 cm keatas yang terdiri dari:

**a)** Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 15.344 M<sup>3</sup>;

**b)** Kayu Bulat Kecil (KBK) : 130.560 M<sup>3</sup>, meliputi:

- $\varnothing$  20-29 c : 50.223 M<sup>3</sup>;
- $\varnothing$  08-19 cm : 67.640 M<sup>3</sup>;

Hal. 43 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kayu pecah/growong : 6.576M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø < 30 cm : 4.384 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm : 1.737 M<sup>3</sup>;

**2. Nota Dinas Nomor : 36/PK/HA/VI/2006** tanggal 13 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 1.340 Ha dengan target produksi sebesar 232.253 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 10 cm keatas yang terdiri dari:

**a) Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) : 34.828 M<sup>3</sup>;**

**b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 197.425 M<sup>3</sup>, meliputi:**

• Ø 20-29 cm : 65.350 M<sup>3</sup>;

• Ø 10-19 cm : 103.797 M<sup>3</sup>;

• Kayu pecah/growong : 14.926M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø < 30 cm : 9.951 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm----- : 3.401 M<sup>3</sup>.

**3. Nota Dinas Nomor : 24/PK/HA/VI/2006** tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT.RIMBA MUTIARA PERMAI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 4.400 Ha dengan target produksi sebesar 524.872 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

**a) Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) : 60.769 M<sup>3</sup>;**

**b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 464.103 M<sup>3</sup>, meliputi:**

• Ø 20-29 cm : 200.200 M<sup>3</sup>;

• Ø 08-19 cm : 213.620 M<sup>3</sup>;

Hal. 44 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kayu pecah/growong : 26.044M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø < 30 cm : 17.362 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm : 6.877 M<sup>3</sup>;

**4.** Nota Dinas Nomor : 18/PK/HA/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 2.362 Ha dengan target produksi sebesar 244.113 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

a) Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) : 32.654 M<sup>3</sup>;

b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 211.459 M<sup>3</sup>, meliputi:

• Ø 20-29 cm : 85.733 M<sup>3</sup>;

• Ø 08-19 cm : 101.401 M<sup>3</sup>;

• Kayu pecah/growong : 13.995M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø < 30 cm : 9.330 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm : 0.00 M<sup>3</sup>;

**5.** Nota Dinas Nomor : 25/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. UNISERAYA yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 7.111 Ha dengan target produksi sebesar 792.491 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 10 cm keatas yang terdiri dari:

**a)** Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) -----: 76.606 M<sup>3</sup>;

**b)** Kayu Bulat Kecil (KBK) : 715.885 M<sup>3</sup>, meliputi:

• Ø 20-29 cm : 80.211 M<sup>3</sup>;

• Ø 10-19 cm : 574.426 M<sup>3</sup>;

Hal. 45 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kayu pecah/growong : 32.832 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø < 30 cm : 21.888 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm : 6.528 M<sup>3</sup>.

6. Nota Dinas Nomor : 44/PK/HA/VII/2006 tanggal 20 Juli 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. CV. ALAM LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 635 Ha dengan target produksi sebesar 111.298 M<sup>3</sup> untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

a) Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) : 6.623 M<sup>3</sup>;

b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 104.675 M<sup>3</sup>, meliputi:

• Ø 20-29 cm : 32.849 M<sup>3</sup>;

• Ø 08-19 cm : 67.094 M<sup>3</sup>;

• Kayu pecah/growong : 2.839 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø < 30 cm : 1.893 M<sup>3</sup>;

• Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm----- : 0.00 M<sup>3</sup>.

7. Nota Dinas Nomor : 33/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 2.252,60 Ha dengan target produksi sebesar 231.482 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 8 cm keatas yang terdiri dari:

a) Kayu Pertukangan (Log Ø ≥ 30 cm) : 20.420 M<sup>3</sup>;

b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 211.062 M<sup>3</sup>, meliputi:

• Ø 20-29 cm : 25.883 M<sup>3</sup>;

• Ø 08-19 cm : 168.945 M<sup>3</sup>;

Hal. 46 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu pecah/growong : 8.751M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang Ø < 30 cm : 5.834 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang Ø ≥ 30 cm : 1.649 M<sup>3</sup>.
- Terdakwa, meskipun mengetahui penerbitan IUPHHKHT-IUPHHKHT oleh H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dan mengetahui URKT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan tersebut berisi rencana penebangan kayu hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5m<sup>3</sup>/Ha yang seharusnya tidak boleh dilakukan penebangan, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kehutanan tanpa mengindahkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005, tanggal 26 Desember 2005, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tetap melakukan pengesahan URKT-UPHHKHT yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu :
1. KPTS/522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Pengesahan tambahan target RKT-UPHHKHT tahun 2005 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI di areal seluas 2.250 Ha (Bruto) atau Hal. 47 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.015 Ha (netto);

2. KPTS/522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan RKT-UPHHKHT a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI di areal seluas 3.000 Ha (Bruto) atau 2.750 Ha (Netto);
  3. KPTS/522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan RKT-UPHHKHT a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI di areal seluas 2.624 Ha (Bruto) atau 2.185 Ha (Netto);
  4. KPTS/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan RKT tahun 2006 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI di areal seluas 5.771Ha (Bruto) atau 4.595 Ha (Netto);
  5. KPTS/522.2/PK/1005 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA di areal seluas 4.032 Ha (Bruto) atau 1.437 Ha (Netto);
  6. KPTS/522.2/PK/2331 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. UNISERAYA di areal seluas 7.291 Ha (Bruto) atau 6.000 Ha (Netto);
  7. KPTS/522.2/PK/2334 tanggal 03 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI di areal seluas 2.902,7 Ha (Bruto) atau 2.155,7 Ha (Netto);
  8. KPTS/522.2/PK/3274 tanggal 01 September 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. CV. ALAM LESTARI di areal seluas 635 Ha (Bruto) atau 600 Ha (Netto);
  9. KPTS/522.2/PK/2520 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. MADUKORO di areal seluas 5.942 Ha (Bruto) atau 4.832 Ha (Netto).
- Atas dasar pengesahan RKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan Hal. 48 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan RKT melakukan penebangan kayu hutan alam  
pada

areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
1	PT. Alam Lestari	2 . 297,98	4 .324,93	25 . 584,22	47. 126,02
2	PT. Madukoro	27 . 614,63	17 . 313,18	173 . 587,29	459. 586,96
3	PT. Merbau Pelalawan Lestari	8 . 206,40	35 . 464,95	131 . 322,84	-
4	PT. Mitra Taninusa Sejati	2 . 141,16	9 .282,35	71 . 826,76	208 .496,99
5	PT. Mitra Taninusa Sejati	240,28	706,52	10 . 52 .	106,52
6	PT. Rimba Mutiara Permai	5. 845,89	19 . 898,18	50 . 675,74	174 .636,26
7	PT. Selaras Abadi Utama	1 . 170,04	163,96	45 . 373,88	83 .672,36
8	PT. Triomas FDI	4. 567,79	4. 986,15	7. 676,24	101. 161,94
9	PT. Uniseraya	9. 153,96	5. 634,02	11. 744,78	64. 713,61

- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri perdagangan dan perindustrian / Menteri

Hal. 49 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar

:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT. Alam Lestari	17. 279.357.960,00
2	PT. Madukoro	148. 168.816.000,00
3	PT. Merbau Pelalawan Lestari	41. 532.544.360,00
4	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	61. 041.329.184,00
5	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	13. 018.776.440,00
6	PT. Rimba Mutiara Permai	54. 856.047.000,00
7	PT. Selaras Abadi Utama	26. 959.640.960,00
8	PT. Triomas FDI	25. 982.728.720,00
9	PT. Uniseraya	21. 864.696.744,00
	<b>Jumlah</b>	<b>410. 703.937.368,00</b>

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan URKT-URKT tersebut, telah menguntungkan perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

1. PT. MITRA TANINUSA SEJATI sejumlah Rp.69.913.222.405,86 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima rupiah delapan puluh enam sen);
2. PT. SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp.23.333.201.893,10 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah sepuluh sen);
3. CV. ALAM LESTARI sejumlah Rp.14.795.468.366,94 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh empat sen);
4. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp.32.465.316.461,52 (tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus

Hal. 50 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



enam belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh dua sen).

5. PT. UNISERAYA sejumlah Rp.18.227.044.239,86 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen);

6. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp.46.500.120.097,80 (empat puluh enam milyar lima ratus juta seratus dua puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen);

7. PT. TRIO MAS FDI sejumlah Rp.22.105.262.785,33 (dua puluh dua milyar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen);

8. PT. MADUKORO Rp.128.002.732.817,92 (seratus dua puluh delapan milyar dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh dua sen);

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlahRp. 355.342.369.068,33 (tiga ratus lima puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 51 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT. Alam Lestari	17. 279.357.96 0,00	392. 977.400,0 0	2. 090.912.193 ,06	14. 795.468.366, 94
2	PT. Madukoro	148. 168.816.00 0,00	3. 191.802.3 70,00	16. 974.280.812 ,08	128. 002.732.817, 92
3	PT. Merbau Pelawan Lestari	41.532.544 .360.00	1. 742.167.0 93,00	7. 352.060.805 ,48	32. 465.316.461, 52
4	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	61. 041.329.18 4,00	314. 731.200,0 0	1. 057.163.587 ,20	59. 669.434.396, 80
5	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	13. 018.776.44 0,00	474. 807.604,4 0	2. 300.180.826 ,54	10. 243.788.009, 06
6	PT. Rimba Mutiara Permai	54. 856.047.00 0,00	1. 348.876.3 80,00	7. 007.050.522 ,20	46. 500.120.097, 80
7	PT. Selaras Abadi Utama	26. 959.640.96 0,00	529. 167.182,6 0	3. 097.271.884 ,30	23. 333.201.893, 10
8	PT. Triomas FDI	25. 982.728.72 0,00	619. 988.531,9 2	3. 257.477.402 ,75	22. 105.262.785, 33
9	PT. Unisera ya	21. 864.696.74 4,00	793. 705.073,3 2	2. 843.947.430 ,82	18. 227.044.239, 86
	Jumlah	<b>410. 703.937.3 68,00</b>	<b>9. 408.222. 835,24</b>	<b>45. 953.345.46 4,43</b>	<b>355. 342.369.06 8,33</b>

**Pengesahan RKT-UPHHKHT Perusahaan-perusahaan yang lokasi areal kerjanya di wilayah Kabupaten Siak.**

- H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak pada sekitar bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2003, telah menerbitkan IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Hal. 52 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT.

BINA DAYA BINTARA, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, di

mana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu

lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan

Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan

Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001

tentang

Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu :

1. Keputusan Bupati No. 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Seraya Sumber Lestari seluas  $\pm$  16.875 Ha di Kab. Siak;

2. Keputusan Bupati No. 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. National Timber & Forest Product seluas  $\pm$  8.200 Ha di Kab. Siak;

3. Keputusan Bupati No. 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha di Kab. Siak;

4. Keputusan Bupati No. 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  6.400 Ha di Kab. Siak;

- Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH tersebut, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, dan PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan

Hal. 53 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau *land clearing* yang

isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam, masing-masing dengan surat:

1. Surat dari PT. BINA DAYA BINTARA, Nomor : 052/BDB/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. BINA DAYA BINTARA, yang ditandatangani oleh Ir. H. FICKY ZZ selaku Direktur;
2. Surat dari PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Nomor : 058/SSL-DIR/BDB/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI selaku Direktur Utama;
3. Surat dari PT. RIMBA MANDAU LESTARI, Nomor : 018/RML-PKU/UM/X/2005 tanggal 2 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT Tahun 2006 PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir. PRAPTO selaku Direktur Utama;
4. Surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Nomor : 203/NT/HTI-C/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja UPHHK-HT Tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditandatangani oleh HERIYANTO selaku Direktur Utama;

Hal. 54 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tembusan masing-masing permohonan tersebut disampaikan kepada Ir. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;

- Ir. H. AMIN BUDYADI, MM, setelah menerima surat tembusan dari masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya melakukan survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan RKT, yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa sebagai pertimbangan teknis yang masing-masing melalui surat:

1. Surat Nomor : 522.2/Prod/4860 tanggal 09 Desember 2005 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. BINA DAYA BINTARA yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) luas areal 397 Ha (Luncuran) dengan taksasi volume sebesar 74.492 M<sup>3</sup> dan luas areal 3.055 Ha (Murni) dengan taksasi volume sebesar 573.237 M<sup>3</sup>;
2. Surat Nomor : 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan (hutan alam) luas areal 1.550 Ha (Luncuran) dengan potensi tegakan sebesar 123.91 M<sup>3</sup> dan luas areal 1.950 Ha (Murni) dengan potensi tegakan sebesar 123.91 M<sup>3</sup>;
3. Surat Nomor : 522.2/Prod/4804 tanggal 06 Desember 2005 perihal pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 An. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang isinya antara lain menyebutkan Rencana Penebangan/ Pemanenan (hutan alam) luas areal penebangan 2.897 Ha, dengan taksasi volume 267.369,04 M<sup>3</sup> yang meliputi diameter 30 cm Up sebesar 9.467,24 M<sup>3</sup>, diameter 20-29 cm sebesar 27.850,70 M<sup>3</sup> dan BBS sebesar 230.054,10 M<sup>3</sup>;
4. Surat Nomor : 522.2/Prod/258 tanggal 30 Januari 2006 perihal  
Hal. 55 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan teknis URKT UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT.

NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang isinya antara lain menyebut-

kan Rencana Penebangan/Pemanenan dengan luas areal 1.650 Ha dengan taksasi produksi 220.544 M<sup>3</sup> yang meliputi:

- Kayu Pertukangan : 39.305 M<sup>3</sup>;
  - KBK (Ø 20-29 cm) : 72.320 M<sup>3</sup>
  - Kayu Ø 10-19 cm : 80.339 M<sup>3</sup>;
  - Pecah/growong : 16.845M<sup>3</sup>;
  - Cabang Ø < 30 cm : 11.230 M<sup>3</sup>;
  - Cabang Ø > 30 cm : 505 M<sup>3</sup>.
- Terdakwa, atas permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan tersebut dan pertimbangan teknis dari Ir. H. AMIN BUDYADI, MM, kemudian memerintahkan Ir. FADRIZAL LABAY selaku Kasubdin Pengembangan Kehutanan Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk menindaklanjutinya dan atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. FADRIZAL LABAY selanjutnya memerintahkan Ir. FREDERIK SULI selaku Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untuk melakukan koordinasi dengan Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selaku Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam serta membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT dimaksud;
- Atas perintah Terdakwa tersebut, Ir. PURNAMA IRAWANSYAH, MM selanjutnya membuat Nota Dinas tentang penghitungan potensi tegakan kayu hutan alam pada areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT oleh perusahaan-perusahaan tersebut
- Hal. 56 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

**1. Nota Dinas Nomor : 27/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal**  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006

a.n. PT.BINA DAYA BINTARA yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 3.452 Ha dengan target produksi sebesar 642.660 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 08 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 101.204 M<sup>3</sup>;
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 541.456M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 75.493 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  08-19 cm : 389.155 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 43.373M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 28.915 M<sup>3</sup>;
  - Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 4.520 M<sup>3</sup>.

**2. Nota Dinas Nomor : 41/PK/HA/VI/2006 tanggal 07 Juli 2006 perihal**  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan

Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006

a.n. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 2.897 Ha dengan target produksi sebesar 267.371 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 10 cm keatas yang terdiri dari:

- a) Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : 9.467 M<sup>3</sup>
- b) Kayu Bulat Kecil (KBK) : 257.904M<sup>3</sup>, meliputi:
  - $\varnothing$  20-29 cm : 27.853 M<sup>3</sup>;
  - $\varnothing$  10-19 cm : 222.609 M<sup>3</sup>;
  - Kayu pecah/growong : 4.057M<sup>3</sup>;

Hal. 57 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 2.705 M<sup>3</sup>;
- Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 680 M<sup>3</sup>.

**3.** Nota Dinas Nomor : 31/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI yang menyimpulkan dalam blok RKT yang diusulkan terdapat potensi kayu hutan alam seluas 3.500 Ha dengan target produksi sebesar 476.952 M<sup>3</sup>, untuk seluruh jenis kayu diameter 08 cm keatas yang terdiri dari:

**a)** Kayu Pertukangan (Log  $\varnothing \geq 30$  cm) : ----- 109.934 M<sup>3</sup>

**b)** Kayu Bulat Kecil (KBK) : 366.992 M<sup>3</sup>, meliputi:

- $\varnothing$  20-29 cm : 101.637 M<sup>3</sup>;
- $\varnothing$  10-19 cm : 175.273 M<sup>3</sup>;
- Kayu pecah/growong : 47.114M<sup>3</sup>;
- Kayu Cabang  $\varnothing < 30$  cm : 31.409 M<sup>3</sup>;
- Kayu Cabang  $\varnothing \geq 30$  cm : 11.559 M<sup>3</sup>.

**4.** Nota Dinas Nomor: 32/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. National Timber & Forest Product;

- Terdakwa, meskipun mengetahui penerbitan IUPHHKHT-IUPHHKHT oleh H. ARWIN AS, SH tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dan mengetahui URKT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan tersebut berisi rencana penebangan kayu

Hal. 58 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5m<sup>3</sup>/Ha yang seharusnya tidak boleh dilakukan penebangan, dengan menyalahgunakan kewenangannya tanpa mengindahkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

151/Kpts-II/2003 tanggal 02 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2005, tanggal 26 Desember 2005, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni

2002, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts -II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tetap melakukan pengesahan URKT-UPHHKHT yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu:

1. KPTS/522.2/PK/2224 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. BINA DAYA BINTARA di areal seluas 4.872 Ha (Bruto) atau 3.482 Ha (Netto);
2. KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 03 juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI di areal seluas 4.150 Ha (Bruto) atau 3.900 Ha (Netto);
3. KPTS/522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di areal seluas 3.363 Ha (Bruto) atau 2.856 Ha (Netto);
4. KPTS/522.2/PK/2223 tanggal 01 September 2006 tentang Pengesahan RKT-UPHHKHT tahun 2006 a.n. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT di areal seluas 1.920 Ha (Bruto) atau 1.550 Ha (Netto);

Hal. 59 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar pengesahan RKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan RKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti	Campuran	KBK	BBS
		(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
1	PT. Bina Daya Bintara	17. 997,58	51. 568,19	289. 747,43	-
2	PT. Seraya Sumber Lestari	10. 371,53	9. 477,42	144. 680,25	-
3	PT. Rimba Mandau Lestari	-	-	27. 763,86	31. 157,08
4	PT. <i>National Timber And Forest Product</i>	757,7	17. 497,45	267. 426,60	-

- Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri perdagangan dan perindustrian / Menteri perdagangan RI pada waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar :

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU
		(Rp)
1	PT. Bina Daya Bintara	83. 577.722.720,00
2	PT. Seraya Sumber Lestari	37. 543.762.000,00
3	PT. Rimba Mandau Lestari	12. 019.872.372,00
4	PT. <i>National Timber And Forest Product</i>	60. 183.111.400,00

Hal. 60 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Jumlah</b>	<b>193. 324.468.492,00</b>
--	---------------	----------------------------

- Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan URKT-URKT tersebut, telah menguntungkan perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan jumlah masing-masing sebagai berikut :

**1. PT. BINA DAYA BINTARA** sejumlah Rp. 66.850.242.894,12  
(enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus

empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua belas sen);

**2. PT. SERAYA SUMBER LESTARI** sejumlah Rp.34.376.426.101,70 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus satu rupiah tujuh puluh sen);

**3. PT. RIMBA MANDAU LESTARI** sejumlah Rp.10.830.839.767,00  
(sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

**4. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT**sejumlah Rp.52.180.840.959,72 (lima puluh dua miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara

Hal. 61 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp.164.238.349.722,54** (*seratus enam puluh empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh empat sen*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	NILAI KAYU	Penyetoran		Kerugian Keuangan Negara/daerah
		(Rp)	PSDH (Rp)	DR (Rp)	(Rp)
1	PT. Bina Daya Bintara	83.577.722.720,00	3.038.082.262,40	13.689.397.563,48	66.850.242.894,12
2	PT. Seraya Sumber Lestari	37.543.762.000,00	571.377.704,00	2.595.958.194,30	34.376.426.101,70
3	PT. Rimba Mandau Lestari	12.019.872.372,00	120.198.724,00	1.068.833.881,00	10.830.839.767,00
4	PT. NTFP	60.183.111.400,00	1.108.358.823,00	6.893.911.617,28	52.180.840.959,72
	Jumlah	193.324.468.492,00	4.838.017.513,40	24.248.101.256,06	164.238.349.722,54

- Dari seluruh rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa mengesahkan permohonan RKT UPHHKHT terhadap perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 519.580.718.790,87** (*lima ratus sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh*

Hal. 62 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh tujuh sen)** atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2012 Nomor Reg.Perkara : TUT - 27/24/ 10/2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. BURHANUDIN HUSIN, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. BURHANUDIN HUSIN, MM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 250.000.000(dua ratus lima puluh juta ruiah) subsidiair 5 (Lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp. 300.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI (AA1);

Hal. 63 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang tunai Rp. 300.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI (AA2);
- 3) Uang tunai Rp. 200.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI (AA3);
- 4) Uang tunai Rp. 200.000.000,- yang disita dari SUNARIYO Direktur PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(AA4);
- 5) Uang tunai Rp. 100.000.000,- yang disita dari Ir FICKY ZZ Direktur PT. BINA DAYA BINTARA (AA5);

### ***Dirampas untuk negara***

Barang bukti berupa :

1. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.383/VII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintahan Propinsi Riau atas nama Drs Burhanuddin Husin, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. (L.13a).

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur CV. Alam Lestari kepada Bupati Pelalawan Nomor: 008/AL-IUPHHKHT/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Alam Lestari ditandatangani MARGARETA. (A.1);
- 2) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Uniseraya kepada Bupati Pelalawan Nomor: 051/USPKU-VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Uniseraya ditandatangani SUPENDI dengan dilampiri peta. (A.2);

Hal. 64 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bupati Pelalawan Nomor: 146/RMP/PKU-VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.(A.3);
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Triomas FDI kepada Bupati Pelalawan Nomor: 055/TM/PKU-V/2002 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Triomas FDI ditandatangani Direktur Utama SUPENDI dilampiri peta.(A.4);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. MADUKORO yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 07/MDK/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang ditanda tangani Direktur Ir.ANDRI YAMA PUTRA berikut 1 (satu) lembar fotokopi peta lampirannya.(A.5);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direksi PT. Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH  
Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.(A.7);
- 8) 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari

Hal. 65 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/MPL/IV/2001 tanggal 30 April 2001 perihal permohonan hak pengusahaan hutan tanaman campuran di Pelalawan yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur berikut lampiran 1 peta. (A.8);

- 9) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 01/MHJ-1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Untuk Pembangunan HTI Pulp yang ditanda tangani Direktur DIDI HARSA. (A.9);
- 10) Tulisan tangan "Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera " tertanggal 19 Agustus 2002 dan "Kasi RKPH pelajari & Proses" tertanggal 19 Agustus 2002 pada Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman. (A.10);
- 11) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(A.11);
- 12) 1 (satu) lembar tulisan dari Bupati Siak tanggal 4 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kadishut/Bapedalda dan 1 (satu) lembar surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Siak perihal permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, berikut lampiran peta permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.-(A.12);

Hal. 66 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat PT Balai Kayang Mandiri Nomor : 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK HT PT Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.950 Ha yang berada di Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Direktur PT Balai Kayang Mandri Syafrawi (A.13);
- 14) Peta Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Siak Kecil) Kec. Siak dan Sei Mandau Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 15.700 Ha (A.14);
- 15) Peta Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.500 Ha.(A.15);
- 16) Peta Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.750 Ha. (A.16);
- 17) Surat dari PT.Bina Daya Bintara Nomor : 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman Industri di Areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha An. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Ir.H.FICKY Z.Z selaku Direktur Utama ((A.17);
- 18) peta permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Bina Daya Bintara Kecamatan Sam Sam Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 8.000 Ha.(A.18);
- 19) Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 002/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Bupati Siak Sri Indrapura perihal Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari dan Peta Permohonan Areal Izin Usaha Hal. 67 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman PT Rimba Mandau  
Lestari di Propinsi Riau Skala 1:100.000.(A.19);

- 20) Surat Wakil Bupati Siak Nomor: 522.1/EK/1341 Tanggal 14 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR. (A.20);
- 21) Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.1/CAN/0821.a Tanggal 30 Mei 2002 kepada Bupati Siak perihal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) seluas  $\pm$  7.500 Ha an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak H. ASRAL RACHMAN, S.H dan peta lampiran surat kadishut kabupaten tentang pertimbangan teknis IUPHHK HT PT. RML. (A.21);
- 22) Surat Bupati Siak Nomor : 522.1/EK/1328 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman Industri An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR (A.22);
- 23) 1 (satu) bundel yang berisi surat nomor 012/BDB/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, surat Nomor : 2370/Kwl-2/1999 tanggal 23 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, Surat Gubernur KDT I Riau Nomor : 525/EK/2007 tanggal 7 Agustus 1999 perihal Rekomendasi HPH eks areal HPH PT. Kosmar Timur Raya An. PT.Bina Daya Bintara serta peta lampiran dan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1788/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal

Hal. 68 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan permohonan HPH serta peta lokasi survai dan Amdal.

(A.24);

24) Surat nomor : 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan tanaman di areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha An.PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kabupaten Siak H.ASRAL RACHMAN, SH serta peta lampirannya. (A.24);

25) 1 (satu) buah buku fotokopi Project Proposal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.MADUKORO tanggal 16 Juli 2001 yang ditandatangani Direktur PT.MADUKORO Ir.ANDRI YAMA PUTRA.(B.1);

26) 1 (satu) buah buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI Juni 2001 dengan stempel direktur utama ABAS YACOB.(B.2);

27) 1 (satu) buah buku fotokopi Usulan Proyek Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) PT.MITRA TANINUSA SEJATI Nopemner 2000 yang ditandatangani Direktur SHO ERWIN.(B.3);

28) Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Mei 2002. (B.4)

29) Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI (B.5);

30) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yang dimohon IUPHHKHT a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari tertanggal Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO.(C.1);

31) 1 (satu) buku laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam rangka permohonan IUPHHKHT An PT.MADUKORO, pangkalan Kerinci

Hal. 69 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hambali.(C.2);

32) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. Selaras Abadi Utama tertanggal 5 Juni 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO dilampiri dengan surat perintah tugas.(C.3);

33) Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.1/CAN/2622 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas H.ASRAL RACHMAN, SH (C.4);

34) Surat perintah tugas No.522.1/CAN/2522 tanggal 6 juni 2002 tentang surat perintah melaksanakan survey mikro lapangan terhadap permohonan izin IUPHHK HT PT. RML seluas  $\pm$  7500 Ha. (C.5);

35) Buku laporan Hasil survey mikro lapangan dalam rangka pencadangan areal hutan tanaman industri (HTI) di kelompok

Sungai Ranggau dan Sungai Sam Sam. PT. BINA DAYA BINTARA. (C.6);

36) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Survey Mikro Lapangan Dalam Rangka Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan

Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau Periode Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey Mikro IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Propinsi Riau Skala 1:50.000.-. (C.7);

37) 1 (satu) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Nomor : 522.1/PR/IV/2002/608 tanggal 01 Mei 2002 perihal

Hal. 70 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman CV. TUAH NEGERI kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI.(D.1);

38) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX/2001/517 tanggal 6 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman a.n. CV. Alam Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto dengan 1 (satu) lampiran peta.(D.2);

39) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.3/REK-VIII/2001/682 tanggal 9 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto.(D.3);

40) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/VIII/2001/505 tanggal 15 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Uniseraya ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.(D.4);

41) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/REK/ VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.(D.5);

42) 2 (dua) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/

Hal. 71 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR/IX/2001/518 tanggal 7 September 2001 perihal Pertimbangan teknis pencadangan Areal untuk IUPHHK-HT An. PT. MADUKORO yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO berikut 1 (satu) lembar asli peta lampirannya.(D.6);

43) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621 tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yang ditanda tangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI beserta lampiran peta.(D.7);

44) 2 (dua) lembar foto kopi surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.3/BP/V/2001/573 tanggal 5 Juli 2001 perihal Pertimbangan teknis Areal yang Dimohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO. (D.8);

45) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor 522.1/CAN/0116.a tanggal 27 April 2002 tentang Saran Pertimbangan teknis Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas  $\pm$  22.720 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh H. ASRAL RAHMAN, SH. (D.9);

46) 2(dua) lembar Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) No: 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 Perihal: Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Hal. 72 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT  
seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada Bupati Siak berikut  
Lampiran peta.(D.10);

- 47) Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHK-HT an. PT Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.950 ha, ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas H. Asral Rachman, SH. (D.11);
- 48) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas  $\pm$  15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau.(D.12);
- 49) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPTasik Besar Serkap) seluas  $\pm$  6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(D.13);
- 50) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas  $\pm$  6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau.(D.14);
- 51) Surat Kantor Wilayah Propinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Tanggal 6 Januari 2000 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau perihal Saran/Pertimbangan Teknis Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau Ir. DARMINTO SOETONO, M.M. dan Peta
- Lampiran Surat Kantor Wilayah Propinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Skala Hal. 73 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:250.000. (D.15);

- 52) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman CV. Mitra Taninusa Sejati.(E.1);
- 53) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama.(E.2);
- 54) 1 (satu) buah buku Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro. (E.3);
- 55) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari.(E.4);
- 56) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Uniseraya.(E.5);
- 57) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Triomas FDI. (E.6)
- 58) 1 (satu) buah buku foto kopi Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Rimba Mutiara Permai.(E.7);
- 59) Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 001/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Direktorat Jenderal Biro
- Produksi Kehutanan perihal Tanggapan Peringatan I Pengurusan Study Kelayakan an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari.(E.8);
- 60) Laporan Studi Kelayakan Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 22.000 Hal. 74 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha,

November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-

(E.9);

61) Buku Studi Kelayakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Propinsi Riau, telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H.ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) tanggal 31 Januari 2003.(E.10);

62) 1 (satu) buku Studi Kelayakan IUPHHK - HT PT Balai Kayang Mandiri Kabupaten Siak Propinsi Riau - Persetujuan Prinsip IUPHHK - HT Bupati Siak No.522.2/EK/1793, tanggal 28 Juni 2002 Luas  $\pm$  21.450 Ha.(E.11);

63) 1 (satu) buah Buku Laporan Utama Analisi Dampak Lingkungan Kawasan HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI di Kec. Siak, Kec. Mandau dan Kecamatan Bunga Raya.(E.12);

64) 1 (satu) buah buku Study Kelayakan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau Tahun 2002. (E.13);

65) 1 (satu) Buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Propinsi Riau dengan Luas 7.500 Ha Periode November 2002. (E.14);

66) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai.(F.1);

67) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Mitra Taninusa Sejati.(F.2);

68) 1 (satu) buah buku UKL/UPL IUPHHK HT CV. Alam Lestari.(F.3);

Hal. 75 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 69) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Madukoro.(F.4);
- 70) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT. Madukoro.(F.5);
- 71) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Uniseraya.(F.6);
- 72) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHK HT PT. Uniseraya.(F.7);
- 73) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Triomas FDI.(F.8);
- 74) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Uniseraya (F.9);
- 75) 1 (satu) buah buku Kerangka Acuan Amdal IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati.(F.10);
- 76) 1 (satu) buah buku Analisis Amdal Amdal IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati (F.11);
- 77) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Merbau Pelalawan Lestari.(F.12);
- 78) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (F.13)
- 79) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari. (F.14)
- 80) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari.(F.15);
- 81) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Triomas FDI.(F.16);
- 82) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT Triomas FDI.(F.17);
- 83) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHKHT PT. Triomas FDI.(F.18);
- 84) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai. (F.19);

Hal. 76 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 85) 1 (satu) buah buku Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama.  
(F.20);
- 86) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama.  
(F.21);
- 87) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT  
PT. Selaras Abadi Utama.(F.22);
- 88) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur  
Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang  
Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman  
PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS,  
SH.(F.23);
- 89) 1(satu) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani)  
No: 660/Bpdl-S/458 tanggal 27 Desember 2002 Perihal:  
Persetujuan ANDAL,RKL,RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL  
TIMBER AND FOREST PRODUCT ditujukan kepada Pimpinan  
PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (F.24);
- 90) Surat Bupati Siak Nomor : 660/Bpdl-S/462 perihal Persetujuan  
ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan  
Kayu Hutan Tanaman tanggal 29 Januari 2003, ditandatangani  
oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. (F.25);
- 91) Surat Ka. Bapedalda kab. Siak Nomor : 660/BPDL-S/190 perihal  
Dokumen ANDAL HTI PT Balai Kayang sungai Apit dan Dokumen  
ANDAL PT Balai Kayang Bunga Raya tanggal 24 September 2003,  
ditandatangani oleh Ka. Bapedalda Kab. Siak H. Ridwan Kadir, SH.  
MM.(F.26);
- 92) Surat Bupati Siak Nomor 660/Bapedalda/32/2003 tanggal 7  
Januari 2003 perihal persetujuan Amdal, RKL dan RPL Kegiatan  
Hutan Tanaman Industri PT.Bina Daya Bintara yang  
Hal. 77 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH.(F.27);

- 93) Surat Bupati Siak Nomor: 660/Bpdl-S/186/2003 Tanggal 27 Januari 2003 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, S.H. (F.28);
- 94) Laporan Utama Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(F.29);
- 95) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Propinsi Riau, Desember 2002.-(F.30);
- 96) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau Tahun 2002. (F.31);
- 97) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau Tahun 2002. (F.32);
- 98) Buku Analisis Dampak Lingkungan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau Tahun 2002. (F.33);
- 99) 1 (satu) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Propinsi Riau berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 Hal. 78 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Luas 7.500 Ha.(F.34);

100) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Pelalawan No : 522.21/DISHUT-PR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 kepada Direktur PT.SELARAS ABADI UTAMA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditanda tangani oleh T. AZMUN JAAFAR.(G.1);

101) 1 (satu) lembar Asli surat Bupati Pelalawan kepada Direktur CV. Tuah Negeri Nomor : 522.1/DISHUT/2002/6983 tanggal 03 Mei 2002 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Hutan Tanaman yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar Asli Peta Lampirannya.(G.2);

102) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/DISHUT//2001/575 tanggal 10 September 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.3);

103) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.21/Dishut-PR/10/VIII/2001/04 tanggal 19 Agustus 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar, SH berikut 1 (satu) lembar lampiran peta.(G.4);

104) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Uniseraya Nomor: 522.1/DISHUT//2001/501 tanggal 25 Agustus 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.5);

105) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.21/DISHUT-Hal. 79 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR//2001/08

tanggal 8 September 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin IUPHHK Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.6);

106) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/DISHUT/2002/636 tanggal 6 Juni 2002 kepada Direktur PT. Triomas FDI perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditanda tangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu ) lembar peta lampiran.(G.7);

107) 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman An. PT. MADUKORO yang ditanda tangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar asli peta lampirannya.(G.8);

108) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Seluas  $\pm$  22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh ARWIN AS. (G.9);

109) 2(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha ditujukan kepada Direktur PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (G.10);

110) Asil Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.500 Ha ditandatangani oleh Hal. 80 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arwin AS.(G.11);

111) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas  $\pm$  15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau. (G.12);

112) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas  $\pm$  6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau (G.13);

113) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Tasik Besar Serkap) seluas  $\pm$  6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(G.14);

114) Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1563 tanggal 6 juni 2002 perihal persetujuan prinsip pencadangan izin Usaha Hutan Tanaman An. PT. Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS. Serta peta lampirannya.(G.15);

115) Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  7.500 Ha ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. dan Peta Lampiran Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Propinsi Riau Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(G.16);

116) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1872 Tanggal 1 Agustus 2000 kepada Menteri Hal. 81 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kehutanan dan

Perkebunan RI perihal Rekomendasi Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.-(G.17);

117) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/Menhut-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  8.890 Ha di Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, Msc.(G.18);

118) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/2002/1921 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT kepada Direktur CV.TUAH NEGERI yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI berikut 1 (satu) lembar Asli Peta Lampirannya.(H.1);

119) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/957 tanggal 25 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT a.n. CV. Alam Lestari ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.2);

120) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1916 tanggal 17 Nopember 2002 perihal

Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja IUPHHK-HT ditandatangani Hal. 82 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. H.T. Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.3);

121) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Uniseraya Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1896 tanggal 22 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT a.n. PT. Uniseraya ditandatangani oleh Ir. Tengku Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.4);

122) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2015 tanggal 26 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi berikut lampiran tembusan Surat Permohonan Tata Batas Areal Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ke Kepala Badan Planologi Kehutanan dan peta.(H.5);

123) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2016 tanggal 23 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(H.6);

124) 2 (dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT An. PT.MADUKORO kepada Direktur PT.MADUKORO yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI berikut 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lampirannya.(H.7);

125) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Hal. 83 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT)

kepada CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/PR/XII/2002/977

tanggal

2 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.1);

126) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Uniseraya Nomor: 522.1/PR/XII/2002/1995 tanggal 24 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. Tengku Zuhelmi.(I.2);

127) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/005 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT. Triomas FDI yang ditanda tangani oleh Ir. H. TENGGU ZUHELMI.(I.3);

128) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2004 dari CV Alam Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 8.580.000-(I.4);

129) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 10 Maret 2005 dari PT. Uniseraya kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 91.000.000- (sembilan puluh satu juta rupiah).(I.5);

130) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir aplikasi kirim uang dari Bank BNI dengan pengirim PT. Triomas FDI kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH sebesar Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 Rp 25.030.000,- tanggal 26 Mei 2003.(I.6);

131) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-HT) Nomor : 522.1/PR/XII/2002/851 tanggal 3 Desember 2002 Hal. 84 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah kepada PT. Madukoro untuk membayar luran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI (I.7);

132) 1 (satu) lembar Foto kopi formulir setoran dari Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUUPHH pada Bank Mandiri No Rekening 10200042030870 sebesar Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).(I.8);

133) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran luran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PK/XI/2002/1917 tanggal 17 Nopember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.9);

134) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 29 Nopember 2002 dari PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening luran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 14.539.000- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).(I.10);

135) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran luran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.11);

136) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 2003 dari PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bendaharawan Umum Negara di rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 23.400.000- (dua puluh tiga juta

Hal. 85 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran fotokopi surat pengantar dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Ir. Amril Abuzar (I.12);

137) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2039 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.13);

138) 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT) No: 522.1/CAN/2614 tanggal 27 Maret 2003 ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak Ir. AMIN BUDYADI, MM. (I.14);

139) Asil Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/CAN/2613, ditandatangani oleh Ir. Amin Budyadi, MM mewakili Kadishut Kab. Siak.(I.15);

140) Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/3005 tanggal 30 Januari 2003 tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) yang ditandatangani oleh Ir.AMIN BUDYADI, MM.(I.16);

141) Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor: 522.1/CAN/5014 Tanggal 29 Maret 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak kepada PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, M.M. Selaku Perwakilan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.(I.17);

142) 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT)  
Hal. 86 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 522.1/ CAN/ 4914 tanggal 29 Maret 2003 ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Sub Dinas Perencanaan Hutan Kab. Siak Ir. SYAHARUDDIN.(I.18);

143) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.SELARAS ABADI UTAMA seluas  $\pm$  13.600 Ha (Bruto) ,  $\pm$  11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya.(J.1);

144) 6(enam) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/015 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV. ALAM LESTARI seluas  $\pm$  3.300 (tiga ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar.(J.2);

145) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas  $\pm$  5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan dan peta.(J.3);

146) 6 (enam) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. UNISERAYA seluas  $\pm$  35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 9 (sembilan) lembar Lampiran Keputusan dan peta.(J.4);

147) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada Hal. 87 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas  $\pm$  9.000 (sembilan ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan berikut lampiran peta.(J.5);

148) 8 (delapan) lembar fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. TRIOMAS FDI seluas  $\pm$  9.625 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani Bupati Pelalawan T. AZMUN JAAFAR berikut 10 (sepuluh) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/ 2003/ 012 tanggal 29 Januari 2003 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman CV. HARAPAN JAYA dan peta lampiran.(J.6);

149) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.MITRA HUTANI JAYA seluas  $\pm$  10.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa peta.(J.7);

150) 8 (delapan) lembar fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT.MADUKORO seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 10 (sepuluh) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/

I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 Ketentuan mengenai  
Hal. 88 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman PT.MADUKORO.(J.8);

151) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:

522.21/IUPHHKHT/II/2003/009 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI seluas  $\pm$  7.300 (tujuh ribu tiga

ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan.(J.9);

152) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 03/IUPHHK/II/2003 tanggal 27

Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  16.875 (enam belas delapan ratus tujuh puluh lima) Ha di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI beserta Peta Lokasi dan Lampiran Keputusan tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ARWIN AS, SH.-(J.10);

153) 1( satu ) Lembar Peta Tata Ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ( IUPHHKHT )Tahun ( tidak ada) An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Propinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 16.875 Ha.(J.11);

154) SK Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari

2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  21.450 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh) Ha Di Kabupaten Siak An. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Bupati Siak Arwin AS, SH. (J.12);

155) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003

Hal. 89 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Pebruari 2003 Ketentuan Mengenai Pelaksanaan IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri ditandatangani Bupati Siak Arwin AS, SH. (J.13);

156) Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP Tasik Besar Serkap) Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prop. Riau Luas  $\pm$  6.500 Ha. (J.14);

157) Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP T Minas) Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Prop. Riau Luas  $\pm$  8.200 Ha. (J.15);

158) Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  8.000 Ha di Kabupaten Siak An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH serta peta lampirannya. (J.16);

159) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Ketentuan mengenai pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT.Bina Daya Bintara.(J.17);

160) Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  6.400 (enam ribu empat ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (J.18);

161) Peta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Hal. 90 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Skala 1:50.000.

(J.19);

162) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (J.20);

163) 6(enam) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH (Bupati Siak) berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak dan Lampiran Peta Nomor: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002. (J.21);

164) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Tuah Negeri tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 103, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 7 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Tuah Negeri.(K.1);

165) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Mutiara Lestari tanggal 29 Oktober 2001 nomor 154, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 93 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Mutiara Lestari.(K.2);

166) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Putri Lindung Bulan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 126, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 8 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Putri

Hal. 91 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lindung Bulan.(K.3);

167) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Madukoro tanggal 12 April 2000 nomor 12, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 96 tentang perubahan anggaran dasar PT. Madukoro, 1 (satu) buah akta notaris perjanjian kerja sama perusahaan hutan tanaman industri nomor 78 tanggal 18 Mei 2005.(K.4);

168) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Bhakti Praja Mulia tanggal 1 Nopember 2001 nomor 1, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 46 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Bhakti Praja Mulia.(K.5);

169) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Harapan Jaya tanggal 8 Maret 1999 nomor 4, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 67 tentang perjanjian kerja sama perusahaan hutan tanaman industri.(K.6);

170) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 25 Oktober 1976 Nomor Y.A.5/503/7 tentang pendaftaran perusahaan PT. Uni Seraya dilampiri akta pendirian perusahaan nomor 23.(K.7);

171) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20815 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Triomas FDI dilampiri akta nomor 07 tanggal 05 Desember 2001 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDI.(K.8);

172) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20745 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri akta Hal. 92 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor 25 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa Sejati dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam perusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004.(K.9);

173) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Alam Lestari tanggal 28 Juni 2001 nomor 88, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 59 tentang pemasukan dan pengeluaran sekutu serta perubahan anggaran dasar CV Alam Lestari.(K.11);

174) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 5 April 2001 nomor 4.(K.12);

175) 4 (empat) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Uniseraya dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam Perusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditandatangani Supendi dan Rosman.(K.13);

176) 4 (empat) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Triomas dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam Perusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditandatangani Supendi dan Rosman.(K.14);

177) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Buah Negeri dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.15);

178) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Puteri Lindung Bulan dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.16);

179) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Mutiara Lestari dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.17);

180) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama Koperasi Pangkalan Tuo Sakti dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.18);

181) 1 eksemplar foto kopi salinan akta Pendirian PT. Selaras Abadi

Hal. 93 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utama.(K.19);

182) 3 lembar fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT. Selaras Abadi Utama dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (K.20);

183) 1 rangkap foto kopi akta notaris Pendirian Perusahaan PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 05 April 2001.(K.21)

184) 1 rangkap fotokopi dilegalisir akta notaris Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tanggal 6 April 2005 nomor 30 antara PT. Merbau Pelalawan Lestari dan PT. Dunia Karya Sejati.(K.22);

185) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 44 tanggal 21 Desember 2001 yang ditandatangani oleh HANANI,SH Notaris di Pekanbaru.-(K.23);

186) Akta Risalah Rapat No.76 PT Bina daya Bintara yang di buat oleh Notaris Darbi SH tanggal 23 November 2001. (K.24);

187) Akta pernyataan keputusan rapat PT Bina Daya Bintara Nomor 03 tanggal 25 Oktober 2004 yang di buat oleh notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (K.25);

188) Akta salinan legalisasi pernyataan Keputusan Rapat PT Bina Daya Bintara Nomor: 03 tanggal 13 Desember 2006 yang di buat oleh Notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (K.26);

189) Akta pendirian PT RML Nomor 4 tanggal 10 Agustus 1999 di buat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH. (K.27);

190) Berita Acara Rapat PT. RML Nomor 241 tanggal 26 Mei 2006 yang dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu tentang anggaran dasar PT. RML. (K.28);

191) Akta perjanjian kerjasama antara PT. RML dengan PT. Siak Raya Timber Nomor 28 tanggal 10 Maret 2004 yang di buat di Hal. 94 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu. (K.29);

192) Surat perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Masyarakat Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak - propinsi Riau

yang di tandatangani tanggal 28 Februari 2004. (K.30);

193) Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dexter Perkasa dengan PT. RML yang di tandatangani tanggal 12 Maret 2004. (K.31);

194) 1 lembar fotokopi dilegalisir dilampiri peta Surat Nomor 522/EK/248 tanggal 6 Pebruari 2001 dari Gubernur Riau kepada Direksi PT. Selaras Abadi Utama.(L.1);

195) 1 eksemplar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP a.n. PT. Selaras Abadi Utama.(L.2);

196) 2 lembar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP PT. Merbau Pelalawan Lestari dilampiri Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.(L.3);

197) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 092/RMP/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003 dengan lampiran 1 berkas perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman an PT Rimba Mutiara Permai.(L.4);

198) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 049/MTS/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003 dengan lampiran 1 berkas perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman an PT Mitra Taninusa Sejati.(L.5);

199) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur Hal. 95 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. Mitra Hutani Jaya Nomor 522.21/Dishut/IV/2002/1063 tanggal 3 April 2002 perihal persetujuan dispensasi pembukaan lahan dan izin percobaan penanaman PT. Mitra Hutani Jaya unti serapung.(L.6);

200) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati kepada Bupati Pelalawan Nomor 522.2/PK/5618 tanggal 29 Juni 2002 perihal penerbitan IUPHHKHT dan IPK an PT. Merbau Pelalawan Lestari.(L.7);

201) 2 (dua) lembar fotokopi surat Menteri Kehutanan M. Prakosa kepada Bupati Pelalawan Nomor 26/Menhut-VI/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 perihal penerbitan IUPHHK HT an PT. Merbau Pelalawan Lestari di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.(L.8);

202) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/Dishut/III/2003/275 tanggal 25 Maret 2003 perihal penerbitan IPP dan IPK PT Merbau Pelalawan Lestari. (L.9);

203) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor 522.21/Dishut/VIII/2002/37 tanggal 14 Agustus 2002 perihal Penerbitan IUPHHK HT dan IPK. (L.10);

204) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 03A/MTS/VII/2000 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran an. PT. Mitra Taninusa Sejati.(L.11);

205) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor 322/VI-PHT/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Permohonan Areal HPH Tanaman an PT. Mitra Taninusa Sejati di Hal. 96 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau.(L.12);

206) 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Riau kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/EK/2529 tanggal 23 September 2000 dengan 1 lampiran peta perihal Rekomendasi Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) an PT. Mitra Taninusa Sejati.(L.13);

207) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 02/SSL-Dir/IX/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Permohonan Tata Batas, ditandatangani oleh Ir. DELTA.(L.14);

208) Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Izin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002).(L.15);

209) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor: 094/MTS/PKU/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal Permohonan Penambahan Areal blok RKT Th 2005 An, PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh S. ERWIN.(M.1);

210) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Selaras Abadi Utama Nomor: 109/SAU/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 perihal Pengajuan Usulan RKT-UPHHK HT Tahun 2006 PT.SELARAS ABADI UTAMA yang ditandatangani Ir. HUSNI DJALANIDI.(M.2);

211) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. ALAM LESTARI Nomor : 085/AL/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pengajuan usulan RKT-UPHHK HT tahun 2006 CV. ALAM LESTARI yang Hal. 97 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh SAID EDDY, SH.(M.3);

212) Asli satu lembar surat Nomor: 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (URKT-UPHHKHT) Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Dikrektor.(M.4);

213) Asli dua lembar surat Nomor: 120/MPL-PKU/UM/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, perihal Revisi Target

Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (URKT-UPHHKHT) Tahun 2006 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Dikrektor, dan lampiran berupa Peta Kemajuan Tebangan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO.(M.5);

214) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. UNISERAYA Nomor : 085/US/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal permohonan pengesahan RKT tahun 2006 kegiatan IUPHHK-HT An. PT. UNISERAYA, yang ditandatangani oleh SUPENDI.(M.6);

215) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. RIMBA MUTIARA PERMAI Nomor : 135/RMP/PKU/II/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal permohonan penilaian dan pengesahan usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN.(M.7);

216) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor Hal. 98 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

: 152/MTS/PKU/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHKHT Th 2006 An, PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh S. ERWIN, beserta lampirannya 1 (satu) buah

buku RKT UPHHKHT Th 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati.(M.8);

217) Asli satu lembar surat Nomor: 167/TM/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, dari PT. Triomas FDI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, perihal Pengesahan RKT UPHHK-HT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHK-HT a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh SUPENDI selaku Presiden Direktur.(M.9);

218) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : 157/MHJ/IX/2005 tanggal 15 September 2005 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) Tahun 2006 An. PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Direktur AGUS WAHYUDI.(M.10);

219) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : 050/MHJ/IX/2006 tanggal 6 September 2006 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) Tambahan Target Tahun 2006 An. PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Direktur AGUS WAHYUDI berikut 1 (satu) lembar peta situasi Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya(M.11);

220) 1( satu )Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :058/SSL-DIR/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Hal. 99 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau .(M.12);

221) 1( satu )Lembar surat dari Ir H FICKY ZZ Selaku Direktur Utama PT. BINA DAYA BINTARA Nomor :052/BDB/X/2005 Tanggal 25 Oktober

2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT. BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.13);

222) 1( satu )Lembar surat dari Ir PRAPTO Selaku Direktur Utama PT. RIMBA MANADU LESTARI Nomor :018/RML-PKU/UM/X/2005 Tanggal 20 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.14);

223) 1 (satu) Lembar surat dari HERIYANTO selaku Direktur Utama PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 203/NT/HTI-C/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.15);

224) 1 (satu) Lembar surat dari Ir. ZULFAN HALIM selaku Direktur Utama PT. BALAI KAYANG MANDIRI Nomor : 075/BKM/XI/2005 tanggal 1 November 2005 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan  
Hal. 100 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. BALAI KAYANG MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.16);

225) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan terhadap usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.SELARAS ABADI UTAMA Lokasi Usulan RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan tanggal Pebruari

2006 dengan ketua TIM Pemeriksa SURAKHMAT, SH.(N.1);

226) 1 (satu) buah buku Laporan hasil pemeriksaan terhadap usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI Kabupaten Pelalawan.(N.2);

227) Foto kopi yang dilegalisir satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Revisi Target RKT-UPHHKHT Tahun 2006 PT. Merbau

Pelalawan Lestari, Lokasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Surakhmat, SH. selaku Ketua Tim Pemeriksa.  
(N.3);

228) Foto kopi yang dilegalisir satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT IUPHHK-HT Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, Lokasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Januari 2006, yang ditandatangani oleh Surakhmat, SH. selaku Ketua Tim Pemeriksa.  
(N.4);

229) 1 (satu) buah buku Foto kopi yang dilegalisir laporan hasil pemeriksaan calon lokasi RKT UPHHK-HT tahun 2006 PT. UNISERAYA lokasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.  
(N.5);

Hal. 101 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 230) Asli satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT. Triomas FDI, Lokasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Februari 2006, yang ditandatangani oleh Salim selaku Ketua Tim Pemeriksa.(N.6);
- 231) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan calon lokasi URKT-UPHHKHT Tahun 2006 PT.MITRA HUTANI JAYA tanggal, Januari 2006 dengan ketua TIM Pemeriksa SURAKHMAT, SH.(N.7);
- 232) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan RKT UPHHKHT Th 2006 a.n. PT. Madukoro Kab. Pelalawan.(N.8);
- 233) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHKHT Th 2006 PT Mitra Taninusa Sejati Lokasi Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, dilampira Peta Hasil Pemeriksaan RKT.(N.9);
- 234) Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal Desember 2005, ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA.(N.10);
- 235) 1(satu )Buah Buku Laporan Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BINA DAYA BINTARA Siak Sri Indrapura , Desember 2005. (N.11);
- 236) 1( satu )Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Januari 2006 (N.12);
- 237) 1( Satu ) Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Tambahan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura Hal. 102 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Agustus 2006 (N.13);

238) 1(satu ) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Propinsi Riau 2006.(N.14);

239) 1(satu ) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Propinsi Riau 2006.(N.15);

240) 6 (enam) lembar copy surat dari Kadishut Kab. Pelalawan Nomor: 522.22/PI/III/2006/7403 tanggal 2 Maret 2006 kepada Kadishut Prop. Riau perihal Pertimbangan Teknis URKT-IUPHHKHT Th. 2006 An. PT Madukoro, yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI.(O.1);

241) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.22/PI/II/2006/7202 tanggal 9 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.2);

242) Foto kopi yang dilegalisir enam lembar surat Nomor: 522.22/PI/II/2006/7502 tanggal 10 Februari 2006 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis RKT UPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.3);

243) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/8702 tanggal 14 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hal. 103 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. UNISERAYA, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.4);

244) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/6702 tanggal 7 Pebruari 2006 berikut peta situasi pertimbangan teknis usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK

pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.5);

245) Foto kopi yang dilegalisir 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/III/2006/6903

tanggal 1 Maret 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau perihal Pertimbangan teknis RKT IUPHHKHT tahun 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI, beserta lampirannya dan Peta Pertimbangan Teknis Usulan RKT.(O.6);

246) Asli enam lembar surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/7003 tanggal 1 Maret 2006 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, dan satu lembar Peta Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.7);

247) 7 (tujuh) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Hal. 104 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/2703 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI berikut 2 (dua) lembar Peta Lampirannya.(O.8);

248) 8 (delapan) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/X/2006/7717 tanggal 20 Oktober 2006 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 (Tambahan Target) An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI berikut 2 (dua) lembar Peta Lampirannya.(O.9);

249) 6 (enam) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/0002 tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI dan 1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2006 PT.Selaras Abadi Utama.(O.10);

250) surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(O.11);

251) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/4860 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. BINA DAYA BINTARA, Hal. 105 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(O.12);

252) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5091 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. BALAI KAYANG MANDIRI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.13);

253) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/4804 tanggal 6 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. RIMBA MANDAU LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.14);

254) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/258 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.15);

255) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 18/PK/HA/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.1);

256) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 44/PK/HA/VIII/2006 tanggal 20 Juli 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI, yang ditanda tangani oleh PURNAMA Hal. 106 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.2);

257) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 36/PK/HA/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM.(P.3);

258) Asli tiga lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 53/PK/HA/XI/2006 tanggal 28 November 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM.(P.4);

259) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 25/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 PT. UNISERAYA, yang ditanda tangani oleh PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.5);

260) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir Nota Dinas Nomor: 24/PK/ HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA

Hal. 107 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUTIARA PERMAI, yang ditanda tangani oleh PURNAMA  
IRWANSYAH.(P.6);

261) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas No.29/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juli 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKTUPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditanda tangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut, MM.(P.7);

262) Foto kopi yang dilegalisir dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 33/PK/HA/VI/2006 tanggal

14 Juni 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Triomas FDI, yang ditandatangani

oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM (P.8);

263) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. : 54/PK/HA/XI/2006 tanggal 28 November 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2007 PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.MAMUN MUROD, MM(P.9);

264) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 31/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 Hal. 108 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.SERAYA SUMBER LESTARI (P.10);

265) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 27/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.BINA DAYA BINTARA.(P.11);

266) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 41/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.RIMBA MANDAU LESTARI.(P.12);

267) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 43/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.BALAI KAYANG MANDIRI.(P.13);

268) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005 tentang pengesahan Tambahan Target Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemnfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT Mitra Taninusa Sejati di areal seluas 2.250 ha (bruto) atau 2.015 ha (net.to), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM. , beserta lampirannya.(Q.10);

269) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/1005 Tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT.Selaras Abadi Utama seluas 4.032 Ha (Bruto) atau seluas 1.437 Ha (Netto) berikut 1 (satu) lembar Asli  
Hal. 109 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran      Keputusannya      yang      ditandatangani

Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.2);

270) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor : KPTS/522.2/PK/3274 tanggal 01 September 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di kabupaten Pelalawan An. CV. ALAM LESTARI di areal seluas 635 ha (bruto) atau 600 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.3);

271) Asli enam lembar dan satu lembar lampiran tentang Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nomor: Kpts.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan a.n. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.4);

272) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor: KPTS. 522.2/PK/2331 tanggal 3 Juli 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT. UNISERAYA di areal seluas 7.291 ha (bruto) atau 6.000 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.5);

273) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor: KPTS/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di areal Hal. 110 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluas 5.7771 ha (bruto) atau 4.595 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.6);

274) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau Nomor: KPTS/ 522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemnfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kab. Pelalawan An. PT Mitra Taninusa Sejati di areal seluas 3000 ha (bruto) atau 2.750 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM. , beserta lampirannya.(Q.7);

275) Asli enam lembar dan satu lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS. 522.2/PK/2334 tanggal 3 Juli 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

Tahun 2006 a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.8);

276) 4 (empat) lembar Asli keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1014 Tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT.Mitra Hutani Jaya di Kabupaten Pelalawan seluas 1.371,61 Ha (Bruto) atau seluas 1.045,00 Ha (Netto) yang ditandatangani Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN. MM berikut 1 (satu) lembar lampirannya.(Q.9);

277) Foto kopi yang dilegalisir 5 (lima) lima lembar dan satu lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS. 522.2/PK/2520 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hal. 111 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten  
Pelelawan a.n. PT. Madukoro, yang ditandatangani oleh Drs.  
BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.10);

278) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi  
Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang  
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak  
An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh  
Drs.H.BURHANUDDIN ,MM(Q.11);

279) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi  
Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2618 Tanggal 17 Juli 2006 tentang  
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak  
An. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang ditandatangani  
oleh

Drs. H.BURHANUDDIN ,MM (Q.12);

280) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi  
Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2942 Tanggal 7 Agustus 2006 tentang  
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak  
An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI, yang ditandatangani oleh  
Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.13);

281) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi  
Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2224 Tanggal 23 Juni 2006 tentang  
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak  
An. PT.BINA DAYA BINTARA, yang ditandatangani oleh  
Drs.H.BURHANUDDIN ,MM;

Hal. 112 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2223 Tanggal 1 September 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.14);
- 283) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.(R.1)
- 284) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.(R.2);
- 285) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh sebagian Tim Verifikasi.(R.3);
- 286) 3 (tiga) lembar fotocopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI luas areal  $\pm$  5.590 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.4);
- 287) 2 (dua) lembar fotocopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.RIMBA MUTIARA PERMAI luas areal  $\pm$  9000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.5);
- 288) 2 (dua) lembar fotocopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MITRA Hal. 113 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANINUSA SEJATI luas areal  $\pm$  7.300 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.6);

289) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.TRIOMAS FDI luas areal  $\pm$  9.625 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.7);

290) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.SATRIA PERKASA AGUNG luas areal  $\pm$  12.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.8);

291) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.TUAH NEGERI, luas areal  $\pm$  1.500 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.9);

292) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MITRA HUTANI JAYA, luas areal  $\pm$  10.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.10);

293) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.MUTIARA LESTARI luas areal  $\pm$  4.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.11);

294) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.HARAPAN JAYA, luas areal  $\pm$  4.800 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.12);

295) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

Hal. 114 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.PUTRI LINDUNG BULAN, luas areal  $\pm$  2.500 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.13);

296) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.ALAM LESTARI luas areal  $\pm$  3.300 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.14);

297) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.BHAKTI PRAJA MULIA, luas areal  $\pm$  5.800 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.15);

298) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MADUKORO, luas areal  $\pm$  15.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.16);

299) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.UNISERAYA luas areal  $\pm$  35.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.17);

300) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.199/VI/BRPHP-1/RHS/2005 tanggal 5 September 2005 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penerbitan Peta Areal Kerja untuk IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.SATRIA PERKASA AGUNG, PT.MITRA HUTANI JAYA, yang diterbitkan oleh daeah dan telah diverifikasi oleh Departemen Kehutanan dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.18);

301) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: Hal. 115 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND.34/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 20 Januari 2006, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Laporan Hasil Verifikasi perizinan IUPHHK pada Hutan Tanaman atau Hutan Alam yang an. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT.MITRA TANINUSA SEJATI, PT.RIMBA MUTIARA PERMAI, PT.TRIOMAS FDI, PT.UNISERAYA yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.19);

302) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.234/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.TRIOMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dan ditandatangani oleh

Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.20);

303) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.241/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT an. PT.TROMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.21);

304) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.317/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 21 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Persetujuan SP-2 IUPHHK-HT PT Triomas FDI dan PT.

Hal. 116 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Uniseraya di Kab.Pelalawan Propinsi Riau dan ditandatangani oleh  
Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana  
Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.22);

305) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:  
ND.295/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 4 September 2006 yang  
ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,  
Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT an. PT.TROMAS  
FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau dan  
ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku  
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.23);

306) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:  
ND..23/VI/BRPHP-2/RHS/2007, tanggal 24 Januari 2007 yang  
ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan,  
Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT yang diterbitkan  
oleh Bupati an. PT. MADUKORO, CV. HARAPAN JAYA, CV.ALAM

LESTARI dan CV.BHAKTI PRAJA MULIA di Kabupaten Pelalawan  
Propinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA  
KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana  
Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.24);

307) 1 (satu) lembar fotocopi telah dilegalisir, surat dari Direktur Bina  
rencana Pemanfaatan Bina Produksi Nomor: S.172/VI/BRPHP-  
2/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang ditujukan kepada Kepala  
Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Kab.  
Pelalawan tentang penugasan kepada Sdr. Ir.Usman,MS.c (Kasi  
Penyiapan Pemanfaatan Hutan Tanaman), Ir.Hasan Mansyur (Kasi  
Kelola Lingkungan), Yayasan Suryatna (Staf Direktorat Bina Rencana  
Pemanfaatan Hutan Produksi) untuk melakukan Monev  
Perkembangan Izin IUPHHK-Alam/Tanaman dan Non Kayu yang  
Hal. 117 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Gubernur/Bupati dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.25);

308) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.173/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Laporan Hasil Verifikasi Lapangan IUPHHK-HT yang diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Kab.Indra Giri Hulu dan Kab. Siak Propinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.26)

309) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.188/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal -- Mei 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Laporan Hasil Verifikasi Lapangan IUPHHK-HT yang

diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Kab.Indra Giri Hulu dan Kab. Siak Propinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.27);

310) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.262/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Laporan Hasil Verifikasi Perizinan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan Hutan Alam an. CV.ALAM LESTARI, CV.PUTRI LINDUNG BULAN, CV.MUTIARA LESTARI, CV.TUAH NEGERI, CV.BHAKTI PRAJA MULIA, CV.HARAPAN JAYA, PT. MADUKORO yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan  
Hal. 118 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku

Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.28);

311) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.MITRA HUTANI JAYA atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.29);

312) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.SATRIA PERKASA AGUNG atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  11.830 (sebelas ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.30);

313) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.RIMBA MUTIARA PERMAI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  8.030 (delapan ribu tiga puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.31);

314) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.66/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman

Hal. 119 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MITRA TANINUSA SEJATI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  7.480 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.32);

315) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.69/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.33);

316) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.214/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.UNISERAYA atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.34);

317) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.215/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman CV. TUAH NEGERI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) Hektar di Propinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.35);

318) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna

Hal. 120 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dokumen verifikasi PT. BALAI KAYANG MANDIRI.(R.36);

319) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. RIMBA MANDAU LESTARI.(R.37);

320) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. SERAYA SUMBER LESTARI.(R.38);

321) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(R.39);

322) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. BINA DAYA BINTARA.(R.40);

323) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/6340 Tanggal 12 Desember 2005 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. CV Harapan Jaya Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fachruddin Siregar/NIP 710000628. RKT UPHHK-HT CV Harapan Jaya SK Nomor Kpts/522.2/PK/0210 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2005.(S.1);

324) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/6440 Tanggal 12 Desember 2005 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. PT Madukoro Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Maringan Pakpahan/NIP 710018118. RKT UPHHK-HT PT Madukoro SK Nomor Kpts/522.2/PK/0110 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2005.(S.2);

Hal. 121 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325) Dua lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Nomor: 522.2.4/PI/IX/2006/2216 tanggal 18 September 2006

perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan

(P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.(S.3);

326) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3020 Tanggal 14 Agustus 2006

tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil

Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada

IUPHHK-HT a.n. PT. Madukoro Lingkup Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang

ditunjuk Waldi Bahri/NIP 710016610. RKT UPHHK-HT PT Madukoro

SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2520 CDK Langgam dengan masa

berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.4);

327) 2 (dua) lembar foto kopi yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/1113

tanggal 31 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan

Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

berikut lampirannya.(S.5);

328) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2839 Tanggal 1 Agustus 2006

tentang

Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil

Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada

IUPHHK-HT a.n. PT Rimba Mutiara Permai Lingkup Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama

P2LHP yang ditunjuk Zulkarnain/NIP 420016763. RKT UPHHK-HT

PT Rimba Mutiara Permai SK Nomor Kpts/522.2/PK/2226 dengan

masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.6);

Hal. 122 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/0212 tanggal 12 Juli 2006

perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.7);

330) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2838 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang

Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Mitra Taninusa Sejati Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulfahmi/NIP 710020440. RKT UPHHK-HT PT Mitra Taninusa Sejati SK Nomor Kpts/522.2/PK/2225 dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.8);

331) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2837 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang

Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Triomas FDI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Armizar, SE/NIP 420014408. RKT UPHHK-HT PT Triomas FDI SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2334 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.9);

332) 3 (tiga) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/4112 tanggal 17 Juli 2006

perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan;

333) Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.10)6 (enam)

lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau

Nomor: Kpts.522.2/PK/2784 Tanggal 26 Juli 2006 tentang

Hal. 123 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Uni Seraya Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Djamalis/NIP 420003400. RKT UPHHK-HT PT Uni Seraya SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2331 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.11);

334) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/4112 tanggal 17 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.12);

335) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1593 Tanggal 11 Mei 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Selaras Abadi Utama berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fachruddin Siregar/NIP 710000628. RKT UPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama SK Nomor Kpts/522.2/PK/1005 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.13);

336) 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/IV/2006/5705 tanggal 7 April 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.14);

337) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2249 Tanggal 26 Juni 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil  
Hal. 124 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Merbau Pelalawan Lestari Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tri Rahayu Widodo/NIP 710007420. RKT UPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari SK Nomor Kpts/522.2/PK/2051 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.15);

338) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VI/2006/5110 tanggal 22 Juni 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.16);

339) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 042/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(S.17);

340) Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/058 tanggal 7 Juli 2006 tentang Usulan Petugas P2LHP, ditandatangani oleh H. AMRI RAJA MUDA, SE.(S.18);

341) 1 (satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2783 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan ( P2LHP ) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Lingkut Dinas Kahutanan Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN HUSIN ,MM.tanggal 26 Juli 2006.(S.19);

342) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Hal. 125 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.-(S.20);

343) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/2071 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 3 Juli 2006, ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, MM.-(S.21);

344) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 040/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(S.22);

345) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/1930 tanggal 11 Juli 2006 tentang Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM beserta Kartu Pengawas Penguji a.n Winarto.(S.23);

346) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(S.24);

347) 1( Satu ) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak  
Hal. 126 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh  
Drs.H.BURHANUDDIN ,MM.(S.25);

348) 1 ( satu ) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.2/Prod/133 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) yang ditandatangani oleh H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit. (S.26);

349) 1 ( satu ) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan Nomor : 522.2/Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) izin No. Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. (S.27);

350) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/2835 tanggal 1 Agustus 2006 tetang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 2 (dua) lembar lampirannya.(S.28);

351) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2609 tanggal 17 Juli 2006 tentang

Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani  
Hal. 127 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar lampiran.1  
(satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  
Siak kepada KAHARANI nomor : 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli  
2006 Perihal Penunjukan Sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT.  
NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI. (S.29);

352) 1 (satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas  
Kehutanan Propinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2499 tentang  
Penunjukan/penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil  
Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK  
-HT An.PT. BINA DAYA BINTARA, Lingkut Dinas Kehutanan  
Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN  
HUSIN, MM. tanggal 10 Juli 2006.(S.30);

353) 1 (satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas  
Kehutanan Propinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/4667 tentang  
Penunjukan/penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil  
Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK  
-HT An. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, Lingkut Dinas Kehutanan  
Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Ir Sudirno, MM.  
Tanggal 8 Desember 2006.(S.31);

354) Surat Direktur Utama PT. RIMBA MANDAU LESTARI Nomor:  
013A/RML/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan /  
Pengangkatan Petugas Pembuat/Penerbit LHP a.n. PT. RIMBA  
MANDAU LESTARI, ditandatangani oleh Ir. PRAPTO.(S.32);

355) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
01/US/SL/VII/06 tanggal 29 Juli 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00002  
s/d

00047 Periode II (Dua) Bulan Juli 2006 ditujukan kepada DJAMALIS  
Hal. 128 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Pejabat Pengesahan LHP) di Sei Lakar, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 5 Agustus 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0002 s/d 00047 tanggal 16 s/d 27 Juli 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Juli 2006 Nomor : 02 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI), diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat LHP No. : 002 s/d 0047 beserta 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 0002 s/d 00047 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.M diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.1);

356) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : / US/SL/VII/06 tanggal 29 Juli 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 0002 s/d 00067 Periode II (Dua) Bulan Juli 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil Akhir Bulan Juli 2006 Nomor : 02 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 5 Agustus 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0002 s/d 00067 tanggal 16 s/d 28 Juli 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 7 (tujuh) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 0002 s/d 00067 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi PT.UNISERAYA (DEDI.M) beserta 66 (enam puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- Hal. 129 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 0002 s/d 00067  
berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani  
Pembuat LHP oleh DEDI.M diperiksa dan disahkan oleh Pejabat  
Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.2);

357) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
05/US/SL/VIII/06 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 004 s/d -  
Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS  
(Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan  
Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan  
Agustus 2006 Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331  
Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan  
disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan  
dokumen LHP No. : 004 s/d - ditandatangani Petugas Kehutanan  
(DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta  
1(satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-  
BBS) Nomor : 00004 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331  
ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan  
disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.3);

358) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
03/US/SL/VIII/06 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0049 s/d 0082  
Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS  
(Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan  
Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Agustus 2006  
Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP  
PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh  
P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP  
tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0049  
Hal. 130 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

s/d 0082 tanggal 18 s/d 29 Agustus 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 34 (tiga puluh empat) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00049 s/d 0082 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.4);

359) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 04/US/SL/VIII/06 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0069 s/d 00120 Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0069 s/d 00120 tanggal 18 s/d 29 Agustus 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 52 (lima puluh dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm ) Nomor : 00069 s/d 00120 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.5);

360) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
Hal. 131 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10/US/SL/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0006 s/d - Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 006 s/d - tanggal 18 s/d 28 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1(satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00006 s/d - berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/ 2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.6);

361) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 06/US/SL/IX/06 tanggal 14 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0083 s/d 00115 Periode I (satu) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan Bulan September 2006 Nomor : 05 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 23 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0083 s/d 00115 tanggal 03 s/d 13 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : Hal. 132 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0083 s/d 00115 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 000083 s/d 000115 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.7);

362) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 08/US/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00116 s/d 00145 Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00116 s/d 00145 tanggal 16 s/d 27 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 00116 s/d 00145 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 30 (tiga puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00116 s/d 00145 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.8);

363) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 07/US/SL/IX/06 tanggal 14 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00121 s/d 00167 Periode I (Satu) Bulan September 2006 ditujukan kepada Hal. 133 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan September 2006 Nomor : 05 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 23 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00121 s/d 00167 tanggal 03 s/d 13 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 00121 s/d 00167 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 47 (empat puluh tujuh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00121 s/d 00167 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.9);

364) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 09/US/SL/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00168 s/d 00219 Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00168 s/d 00219 tanggal 16 s/d 27 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam)

Hal. 134 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 52 (lima puluh dua ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 – 29 Cm) Nomor : 00168 s/d 00219 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.10);

365) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 13/US/SL/X/06 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 008 s/d - Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 008 / BBS ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1 (satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00008 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.11);

366) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :-- tanggal 31 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00147 s/d 00199 Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP Hal. 135 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00147 s/d 00199 tanggal 16 s/d 30 Oktober 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 53 (lima puluh tiga ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00147 s/d 00199 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.12);

367) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : --/US/SL/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00221 s/d 00323 Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00221 s/d 00323 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 11 (sebelas) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 103 (seratus tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm ) Nomor : 00221 s/d 00323 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat Hal. 136 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP oleh DEDI MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat  
Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.13);

368) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
15/US/SL/XI/06 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00200 s/d 00216  
Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada  
DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar  
Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan  
Bulan Nopember 2006 Nomor : 09 berdasarkan RKT/BK :  
522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI)  
diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar  
Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 25 Nopember 2006  
berdasarkan dokumen LHP No. : 00200 s/d 00216 tanggal 2 s/d  
10 Nopember 2006 Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi  
dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar  
Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan  
DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 17  
(tujuh belas) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-  
KB) Nomor : 00200 s/d 00216 berdasarkan RKT/BK :  
522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI  
MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP  
(DJAMALIS).(T.14);

369) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
16/US/SL/XI/06 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor :00324s/d 00354  
Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada  
DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar  
Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan  
Bulan Nopember 2006 Nomor : 09 berdasarkan RKT/BK :  
522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI)  
Hal. 137 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 25 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00324 s/d 00354 tanggal 2 s/d 11 Nopember 2006 Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 31 (tiga puluh satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00324 s/d 00354 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.15);

370) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 17/US/SL/XI/06 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0009 s/d -- Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00009 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 5 (lima) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.MULYADI dari PT.UNISERAYA, diketahui dan ditandatangani oleh DJAMALIS. (T.16);

371) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 18/US/SL/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00217s/d 00259 Periode II (Dua) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan Hal. 138 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen LHP No. : 00217 s/d 00259 tanggal 16 s/d 28  
Nopember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS)  
dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar  
Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan  
DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu)  
lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat  
Akhir Bulan Nopember 2006 Nomor : 10 berdasarkan RKT/BK :  
522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI)  
diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 43  
(empat puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat  
(LHP-KB) Nomor : 00217 s/d 00259 berdasarkan RKT/BK :  
522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI  
diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).  
(T.17);

372) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :  
19/US/SL/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00355 s/d 00410  
Periode II (Dua) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada  
DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pemeriksaan LHP tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan  
dokumen LHP No. : 00355 s/d 00410 tanggal 16 s/d  
28 Nopember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan  
(DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu)  
lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil  
(RLHP-KBK) Akhir Bulan Nopember 2006 Nomor : 10  
berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA  
(DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 6  
(enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani  
Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA  
(DEDI.M), beserta 56 (lima puluh enam) lembar Laporan Hasil  
Hal. 139 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00355 s/d 00410 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.18);

373) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 21/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00260 s/d 00329 Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 21 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00260 s/d 00329 tanggal 1 s/d 13 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 70 (tujuh puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00260 s/d 00329 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.19);

374) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 22/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00411 s/d 00500 Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 21 Desember 2006 berdasarkan Hal. 140 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen LHP No. : 00411 s/d 00500 tanggal 1 s/d 13 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 8 (delapan) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 90 (sembilan puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 – 29 Cm) Nomor : 00411s/d 00500 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.20);

375) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 23/US/SL/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 330 s/d 371 Periode II.A (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00330 s/d 00371 tanggal 16 s/d 22 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.A ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 44 (empat puluh empat) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-

Hal. 141 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB) Nomor : 00330 s/d 00373 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.21);

376) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 24/US/SL/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00501 s/d 00552 Periode II.A (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00501 s/d 00552 tanggal 16 s/d 22 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.A ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 52 (lima puluh dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00501 s/d 00552 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.22);

377) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 23/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0011 s/d -- Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 22 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0011 / BBS tanggal 14 Desember 2006 Hal. 142 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 6 (enam) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil Untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.M dari PT.UNISERAYA dan diketahui oleh DJAMALIS, beserta 1 ( satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 0011 s/d -- berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.23);

378) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 25/US/SL/XII/06 tanggal 31 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00372 s/d 00541 Periode II.B (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 17 Januari 2007 berdasarkan dokumen LHP No. : 00372 s/d 00541 tanggal 23 s/d 31 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani oleh Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi-Saksi DEDI.M, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.B ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 170 ( seratus tujuh puluh ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00372 s/d 00541 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat

Hal. 143 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.24);

379) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 27/US/SL/XII/06 tanggal 30 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0012 s/d -- Periode II (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 17 Januari 2007 berdasarkan dokumen LHP No. : 0012 / BBS tanggal 30 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 ( satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 0012 s/d -- berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS), beserta 9 (sembilan) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil Untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.M dari PT.UNISERAYA.(T.25);

380) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Produksi PT.RIMBA MUTIARA PERMAI berdasarkan RKT No. : Kpts.522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.ZULKARNAIN,S.Hut. (T.26);

381) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Agustus 2006 No. : 001/RLHP/RMP/VIII/06 dan II tanggal 31 Agustus 2006 No. : 002/RLHP/RMP/VIII/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.27);

382) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Hal. 144 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 September 2006 No. : 003/RLHP/RMP/IX/06 dan II tanggal 30 September 2006 No. : 004/RLHP/RMP/VIII/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.28);

383) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Oktober 2006 No. : 005/RLHP/RMP/X/06 dan II tanggal 30 Oktober 2006 No. : 006/RLHP/RMP/X/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.29);

384) 5 (lima) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Nopember 2006 No. : 007/RLHP/RMP/XI/06 dan II tanggal 30 Nopember 2006 No. : 008/RLHP/RMP/XI/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.30);

385) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Desember 2006 No. : 009/RLHP/RMP/XII/06 dan II tanggal 31 Desember 2006 No. : 010/RLHP/RMP/XII/06, No. : 011/RLHP/RMP/ XII/ 06 dan No. : 012/RLHP/RMP/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.31);

386) T31a. 1 (satu) lembar RLHP RKT 2006 a.n. PT. Rimba Mutiara Permai (SK. RKT No; Kpts/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006) yang ditandatangani oleh Direktur PT. RMP Erwin beserta lampirannya.(T.31a)

387) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama CV.ALAM LESTARI (SK : Kpts.522.2/PK/3274

tanggal 01 September 2006) dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.  
Hal. 145 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO selaku P2LHP.(T.32);

388) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHHP-KBK) yang dilegalisir Periode tanggal 01 s/d 15 Nopember 2006 No. : 0001 dan , RLHP-KBK tanggal 16 s/d 30 Nopember 2006 No. : 0002 yang disahkan oleh Sdr.IRIANTO (P2LHP) CV.ALAM LESTARI.(T.33);

389) 4 (empat) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHHP-KB) yang dilegalisir Periode tanggal 01 s/d 15 Desember 2006 No. : 0003, RLHP-KBK tanggal 15 Desember 2006 No. : ..., RLHP-KBK Periode tanggal 30 Desember 2006 Nomor : 01/RLHP/BBS/AL/PLW/XII/2006 dan RLHP-KB Periode tanggal 16 s/d 30 Desember 2006 No. : 000 yang disahkan oleh Sdr.IRIANTO (P2LHP) CV.ALAM LESTARI.(T.34);

390) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan a.n. PT. Madukoro berdasarkan SK: Kpts.522.2/PK/2520 tentang RKT PT. Madukoro tahun 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh P2LHP WALDI BAHRI.(T.35);

391) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 Desember 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Desember 2006 Nomor 0008 dan fotokopi dilegalisir RLHP KB tanggal 15 Desember 2006 Nomor 0007 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.36);

392) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 Nopember 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Nopember 2006 Nomor 0006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KB tanggal 15 Desember 2006

Nomor 5/RLHP/LOG/MK/XI/06 dengan pembuat LHP RISMAN  
Hal. 146 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.37);

393) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 31 Oktober 2006 periode tanggal 16 s.d 31 Desember 2006 Nomor 0003 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.38);

394) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 September 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Oktober 2006 Nomor 0002 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.39);

395) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 31 Desember 2006 periode II Nomor 10/RLHP/BBS/MK/XII/2006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 15 Desember 2006 Nomor 0002 periode tanggal 1 s.d. 15 Desember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.40);

396) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 September 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 September 2006 Nomor 0001 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 Desember 2006 Nomor 0010 periode tanggal 16 s.d. 30 Desember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.41);

397) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal

15 Desember 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Desember 2006

Hal. 147 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 0009 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30  
Nopember 2006 Nomor 0008 periode tanggal 16 s.d. 30  
nopember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang  
disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.42);

398) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal  
15 Nopember 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Nopember 2006  
Nomor 0007 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 28 Oktober  
2006 Nomor 0006 periode tanggal 16 s.d. 28 Oktober 2006  
dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP  
ZULFAHMI A.R.(T.43);

399) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal  
15 Oktober 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Oktober 2006 Nomor  
0005 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 September  
2006 Nomor 0004 periode tanggal 16 s.d. 30 September 2006  
dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP  
ZULFAHMI A.R.(T.44);

400) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal  
15 September 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 September 2006  
Nomor 003/RLHP/BBS/MK/IX/2006 dan fotokopi dilegalisir RLHP  
KBK tanggal 31 Agustus 2006 Nomor 002/RLHP/BBS/MK/VIII/2006  
dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP  
ZULFAHMI A.R.(T.45);

401) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro  
tanggal

Hal. 148 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 Agustus 2006 Nomor 001/RLHP/BBS/MK/VIII/2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.46);

402) 2 (dua) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (RLHP) PT. Selaras Abadi Utama tahun 2006 yang dibuat oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.47);

403) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 01 s.d. 15 Desember 2006 Nomor: 0005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.48);

404) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 01 s.d. 15 Oktober 2006 Nomor: 0001 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.49);

405) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 Oktober 2006 Nomor: 0002 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.50);

406) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 Oktober 2006 Nomor: 0013 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.51);

407) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 September 2006 Nomor: 0011 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.52);

Hal. 149 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 September 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.53);
- 409) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 31 Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR. (T.54);
- 410) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR. (T.55);
- 411) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 31 Juli 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.56);
- 412) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Juli 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.57);
- 413) 4 (empat) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 September 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.58);
- 414) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 30 Juni 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR. (T.59);
- 415) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal

Hal. 150 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Juni 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.  
(T.60);

416) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Mei 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.  
(T.61);

417) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Laporan Hasil Penebangan dengan RKT Nomor : Kpts.522.2/PK/2334 tanggal 3 Juli 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang ditandatangani oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP). (T.62);

418) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan September 2006 Nomor : 0004 tanggal 30 September 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.63)

419) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.64);

420) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0009 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.65)

421) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.66);

422) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Hal. 151 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006

Nomor :

0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.67);

423) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.68);

424) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.69);

425) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.70);

426) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.71);

427) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.72);

Hal. 152 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.73);

429) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil

Penebangan atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI (SK : Kpts.522.2/PK/ 2051 tanggal 13 Juni 2006) dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.74);

430) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- Juni 2006 Nomor 02/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.75);

431) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 14 Juli 2006 Nomor 03/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.76);

432) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- Juli 2006 Nomor 04/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.77);

433) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 16 Agustus 2006 Nomor Hal. 153 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

05/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku  
P2LHP.(T.78);

434) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU  
PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 31 Agustus 2006 Nomor  
06/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku  
P2LHP.(T.79);

435) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU  
PELALAWAN LESTARI periode I tanggal -- September 2006 Nomor  
07/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku  
P2LHP.(T.80);

436) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU  
PELALAWAN LESTARI periode II tanggal - September 2006 Nomor  
08/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku  
P2LHP.(T.81);

437) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU  
PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 19 Oktober 2006 Nomor  
09/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku  
P2LHP.(T.82);

438) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU  
PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 22 Nopember 2006 Nomor  
11/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku  
P2LHP.(T.83);

439) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU  
Hal. 154 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 8 Desember 2006 Nomor 12/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.84);

440) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 22 Desember 2006 Nomor 13/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.85);

441) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 12 Januari 2007 Nomor 14/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.86);

442) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 29 juni 2006 Nomor 02/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.87);

443) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal -- juli 2006 Nomor 03/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.88);

444) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- juli 2006 Nomor 04/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.89);

445) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Hal. 155 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 18 Agustus 2006 Nomor 05/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.90);

446) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 2 September 2006 Nomor 06/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.91);

447) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal - September 2006 Nomor 07/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.92);

448) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal - September 2006 Nomor 08/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.93);

449) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal - Nopember 2006 Nomor 11/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.94);

450) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 5 Desember 2006 Nomor 12/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.95);

Hal. 156 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

451) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi KB, KBK, dan BBS PT. Mitra

Taninusa Sejati sesuai Izin Nomor Kpts/522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.96);

452) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.97);

453) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.98);

454) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.99);

455) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.100);

456) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.101);

457) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.102);

458) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan

Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.103);

Hal. 157 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 459) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.104);
- 460) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.105);
- 461) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.106);
- 462) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.107);
- 463) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.108);
- 464) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.109);
- 465) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.110);

Hal. 158 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



- 466) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T111);
- 467) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T112);
- 468) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T113);
- 469) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.114);
- 470) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.115);
- 471) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.116);
- 472) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (117);

Hal. 159 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 473) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T118);
- 474) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.119);
- 475) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T120);
- 476) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T121);
- 477) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T122);
- 478) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2006 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya.(T123);
- 479) 4 (empat) lembar Daftar Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama PT. Mitra Taninusa Sejati tahun 2005 yang dibuat oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T124);

Hal. 160 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 480) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR. (125);
- 481) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T126);
- 482) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T127);
- 483) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(128);
- 484) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T129);
- 485) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode khusus bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.130);
- 486) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode khusus periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.131);
- 487) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Hal. 161 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.132);

488) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.133);

489) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.134);

490) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.135);

491) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.136);

492) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.137);

493) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.138);

494) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II Hal. 162 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T139);

495) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I  
bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T140);

496) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II  
bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T141);

497) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2005 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK.  
RKT No; Kpts.522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005) yang  
ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya.(T142);

498) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana  
Reboisasi (DR) Nomor : 04/ SSI-01/ SK/VII/ 2006 ,tanggal 31 Juli  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang  
ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE. ,  
yang telah .-(T143);

499) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi  
Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 04/SSI-01/ SK/VII/ 2006,  
tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di  
Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H.  
AMRI RAJA MUDA, SE, yang telah .(T.144);

500) 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal  
08-08- 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,  
ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan  
Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang  
Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp120.851.500,-  
(Seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima  
Hal. 163 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 08-08-2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.39.187.834,- (Tiga puluh sembilan juta seratus depana puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah ).(T145);

501) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH ) yang telah . Nomor : 05/SSI-01/SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T146);

502) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(T147);

503) 1 (Satu) Lembar yang telah Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.49.690.300,- (Emapat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dan Slip setoran yang telah Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada

penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta

Hal. 164 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.144.898.681,86,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma 86/100 rupiah)-(T148);

504) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 06/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 05 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T149);

505) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T150);

506) 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 07 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 143.098.399 (Seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 07 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.49.670.280,- ( Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua puluh delapan rupiah ).--(T151);

507) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi  
Hal. 165 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T152);

508) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi (DR) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T153);

509) 1 (Satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 21 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 151.822.901,04,- ( Seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu koma 40/100 rupiah ) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 21 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.51.469.550,- ( Lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah ) (T154);

510) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 10/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T155);

Hal. 166 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T156);

512) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.45.170.500,- ( Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.137.469.119,92,- (Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan belas koma 92/100 rupiah ).-(T157);

513) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T158);

514) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T159);

Hal. 167 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 52.937.670,- ( Lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ).-(T160);

516) 1 (Satu ) Lembar yang telah dilagalisir Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.160.166.823,6 ,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus ddual puluh tiga koma 6/100 rupiah) (T161);

517) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T162);

518) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T163);

519) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,

Hal. 168 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.33.259.200,-(Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.100.646.381,88,- ( Seratus juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu 88/100 rupiah ).(T164);

520) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 27 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah). (T165);

521) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 19/SSI-01/SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T166);

522) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T167);

523) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 18-12- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,

Hal. 169 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.108.323.510,- ( Seratus delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 18-12-2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.329.067.840,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah ).-(T168);

524) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T169);

525) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(T170);

526) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.141.668.820,-( Seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah

Hal. 170 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri , tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT.

SERAYA SUMBER

LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar US \$ 138.891,00 ( Seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu US Dollar ).--(T172);

527) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 011/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditandatangani oleh M.YAMIN dan P2LHP WINARTO.--(T172);

528) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 010/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN --(T173);

529) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 009/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN - (T174);

530) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN-- (T175);

531) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Hal. 171 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 007/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk  
Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.(T176);

532) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 006/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk  
Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (T177);

533) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.  
(T178);

534) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 004/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN  
(T179);

535) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 003/SSL/TMG/VIII/  
2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--  
(T180);

536) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 002/SSL/TMG/VIII  
2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.  
(T181);

537) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 001/SSL/TMG/VII/  
Hal. 172 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.-  
(T182);

538) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm, yang  
telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP  
WINARNO.--(T183);

539) 1 (Satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/  
SSL/I/ 2005 yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan  
januari 20051( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil  
Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-  
29 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 16  
Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds.  
Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN  
(T184);

540) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 009/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 29 November  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(T185);

541) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 008/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 15 November  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(T186);

542) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang

Hal. 173 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah Nomor : 007/ SSL/TMG/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006

An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak,  
yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T187);

543) 1 (Satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006  
An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak  
,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T188);

544) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO--(T189);

545) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO (T190);

546) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO-(T191);

547) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
Hal. 174 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (T192);

548) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 001/ SSL/TMG/VII/ 2006 , tanggal 31 Juli 2006 An.

PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T193);

549) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm, yang telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T194);

550) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T195);

551) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 009/ SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T196);

552) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Hal. 175 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 008/ SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T197)

553) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .-(T198);

554) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T199);

555) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO--(T200);

556) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T201);

Hal. 176 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 557) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO- (T202);
- 558) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) RKT tahun 2006. (T203);
- 559) 11 ( Sebelas ) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) tahun 2006 dengan RKT Nomer : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomer : 01/RLHP/KB/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomer : 11/RLHP /KB/NT/XII/2006. (T204);
- 560) 11 ( Sebelas ) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil ( RLHP-KBK ) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) tahun 2006 dengan RKT Nomer : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomer : 01/RLHP/KBK/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomer : 11/RLHP/ KBK/NT/XII/2006.(T205)
- 561) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) bulan Desember RKT tahun 2006(T206);
- 562) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) bulan Juli s/d Desember RKT tahun 2006.(T207);
- 563) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan / Pembayaran dan Hal. 177 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.MITRA TANINUSA SEJATI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2225, Tanggal 23 Juni 2006. ( Penghitungan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ) (U.1);

564) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana

Reboisasi PT.TRIOMAS FDI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2334, Tanggal 03 Juli 2006.( Penghitungan periode Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U2);

565) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.RIMBA MUTIARA PERMAI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2226, Tanggal 23 Juni 2006. ( Penghitungan periode 01 Juli 2006 s/d 05 April 2007 ).(U3);

566) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.UNISERAYA Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522/PK/2331, Tanggal 03 Juli 2006..( penghitungan periode Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U4);

567) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.MERBAU PELALAWAN Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT IUPHHK-HTNo: KPTS /522.2/PK/2051, Tanggal 13 Juni 2006. SK RKT IUPHHK-HT Tahun 2006( Revisi Target Produksi Nomor :KPTS.522.2/ PK/ 4463 tanggal 30 November 2006( SPT IUPHHK-HT TA 2006 ) (U5);

568) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Hal. 178 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahunan SK.RKT- UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Izin CV.ALAM LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK-HT No.522.2/PK/3274 Tanggal 01 September 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT CV.ALAM LESTARI (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U6);

569) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan - UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Izin PT. SELARAS ABADI UTAMA sesuai dengan Keputusan SK.RKT-UPHHK-HT No.522.2/PK/1005 Tanggal 29 Maret 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT PT.SELARAS ABADI UTAMA (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U7);

570) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan - UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Izin PT. MADUKORO sesuai dengan Keputusan SK RKT- UPHHK-HT No.522.2/PK/2520 Tanggal 10 Juli 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT PT.MADUKORO (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U8);

571) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1251205 tanggal 01 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 159.960.276,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran

Hal. 179 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2005 dengan nominal  
Rp. 159.960.276(U9);

572) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1331205 tanggal 16 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 168.997.231,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2005 dengan nominal Rp. 168.997.231(U10);

573) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1381205 tanggal 19 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 45.063.000,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 45.063.000(U11);

574) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1391205 tanggal 19 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 25.234.300,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 25.234.300(U12);

575) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1431205 tanggal 27 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 116.275.165,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal

Hal. 180 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 116.275.165(U13);

576) 1(satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor :060106 tanggal 02 Januari 2006, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan Kodefikasi : 0606D14MTNS0601, jumlah US \$ 114.784,32 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar photo copy Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 07 Pebruari 2006 yang telah dilegalisir.(U14);

577) 1(satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor :060106 tanggal 02 Januari 2006, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan Kodefikasi : 0606D14MTNS0601, jumlah Rp.314.731.200,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Pebruari 2006 yang telah dilegalisir.(U15);

578) Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal ...Januari 2007 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(U16);

579) 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(U17);

580) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO.  
Hal. 181 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(U18);

581) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan pengiriman RKT Tahun 2006 PT. Seraya Sumber Lestari SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh WINARTO (U19);

582) 1 (satu) lembar Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari nomor izin : Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006, nomor referensi : 0609A15SRSLXXXX yang ditandatangani oleh WINARTO (U20);

583) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Bina Daya Bintara tahun 2006.(U21);

584) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2006.(V1);

585) 2 (dua) rangkap rekap penerimaan dari hasil land clearing di areal kerja IUPHHKHT PT. Rimba Mutiara Permai yang ditandatangani Erwin.(V2);

586) 3 (tiga) rangkap rekap penerimaan dari hasil land clearing di areal kerja IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani Erwin.(V3);

587) 2 (dua) rangkap Rekapitulasi penjualan PT. Uniseraya tahun 2006 ditandatangani Dirut SUPENDI.(V4) ;

588) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penjualan PT. Triomas FDI tahun 2006 yang ditandatangani Dirut SUPENDI(V5). ;

589) 4 (empat) lembar foto kopi dilegalisir Rekanan Pendapatan Kayu Chips PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2006 yang ditandatangani Jimmy Bonaldi Pangestu berikut lampiran laporan Hal. 182 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan laba rugi per 31 Desember 2006.(V6);

590) 6 (enam) lembar laporan Produksi dan Pengangkutan Kayu PT. NTFP tahun 2006 (V7);

591) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 26 Oktober 1999 Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W1);

592) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 3 November 2002 Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W2);

593) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 11 November 2005 Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W3);

594) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 1 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W4);

595) 1 (satu) lembar perhitungan luas penutupan lahan hutan dan non hutan pada areal pemanfaatan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atas nama perusahaan-perusahaan tersebut di atas pada tahun 1999, 2002, 2005 dan 2007.(W5);

596) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W6);

597) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W7);

598) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W8);

599) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA Hal. 183 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009  
yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI (W9);

600) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT  
NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22  
Desember 1999 dan 26 Oktober 1999 yang dibuat oleh DIRJEN  
PLANOLOGI Kehutanan RI. (W10);

601) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT  
NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002  
dan 03 November 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI  
Kehutanan RI.(W11);

602) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT  
NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 11  
November 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan  
RI.(W12);

603) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT  
NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Januari  
2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W13);

604) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 31 Maret 2001 yang  
dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W14);

605) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 04 Maret 2004 yang  
dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W15);

606) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Agustus 2006  
yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W16);

Hal. 184 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

607) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W17);

608) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 September 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W18);

609) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W19);

610) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W20);

611) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W21);

612) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Langgam tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh RUKDIMAN PAKPAHAN.(X1);

613) 3 (tiga) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Sorek tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh HAMBALI.(X2);

614) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Penyalai tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh H. SYAMSUL ANWAR.(X3);

615) 2 (dua) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Rekapitulasi Penjualan dan luran PSDH/DR PT. Selaras Abadi Utama sektor Kuala Tolam dan Pelalawan Januari - Desember 2006.(X4);

Hal. 185 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 616) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT.TRIOMAS FDI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /012 Tanggal 29 Januari 2003 luas 9.625 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2006.(Y1);
- 617) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT. MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /009 Tanggal 27 Januari 2003 luas 7.300 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2006.(Y2);
- 618) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 Pemegang izin PT. MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /009 Tanggal 27 Januari 2003 luas 7.300 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2005.(Y3);
- 619) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/XII/2002 /004 Tanggal 17 Desember 2002 luas 5,590 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2006.(Y4);
- 620) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/008 Tanggal
- Hal. 186 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27 Januari 2003 luas 9.000 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi

Riau Tahun 2006(Y5);

621) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT. ALAM LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/015 Tanggal 30 Januari 2003 luas 3.300 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2006.(Y6);

622) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT. SELARAS ABADI UTAMA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No. 522.21/IUPHHKHT/I/2002/005 Tanggal 30

Desember 2002 luas 13.600 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2006.(Y7);

623) 1 (Satu) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT.UNISERAYA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 Tanggal 30 Desember 2002 luas 35.000 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2006.(Y8);

624) 1 (Satu) buku Asli Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang izin PT.MITRA HUTANI JAYA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/014 Tanggal 29 Januari 2003 luas 10.000 HA di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2005.(Y9);

625) Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hal. 187 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak a.n PT.

SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Desember 2005,

ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(Y10);

626) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Propinsi Riau 2006. (Y11);

627) 1 (Satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Heriyanto (Y12);

628) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An.

PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Propinsi Riau 2006. (Y13);

629) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Propinsi Riau 2006.(Y14);

630) 1 (Satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Propinsi Riau 2006. (Y15);

631) 1 (Satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :

Hal. 188 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts.522.2/PK/1005 tanggal 29 Maret 2006.(Z1);

632) 1 (Satu) buah buku Photo Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu RKT-UPHHK-HT Tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2334 tanggal 3 juli 2006.(Z2); -----

633) 1 (Satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat Tahun 2006 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Kec. Kerumutan CDK SOREK, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau (SK RKT) Nomor : KPTS.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006 dan SK Revisi Target Produksi Nomor : KPTS.522.2/PK/4463 tanggal 30 Nopember 2006.(Z3);

634) 1 (Satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname (SO) Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8205 tanggal 5 Maret 2005 dan Tambahan Target RKT Nomor : KPTS.522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005).(Z4);

635) 1 (Satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih RKT UPHHK-HT Tahun 2006 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2225 tanggal 23

Hal. 189 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006.(Z5);

636) 1 (Satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2332 tanggal 3 juli 2006).(Z6);

637) 1 (Satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. RIMBA MANDAU LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006)(Z7);

638) 1 (Satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. BALAI KAYANG MANDIRI (SK No. KPTS.522.2/PK/2942 tanggal 7 Agustus 2006)(Z8);

639) 1 (Satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (SK No. KPTS.522.2/PK/2223 tanggal 23 Juni 2006)(Z9);

640) 1 (Satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. BINA DAYA BINTARA (SK No. KPTS.522.2/PK/2224 tanggal 23 Juni 2006) (Z10);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara .**

4. Menetapkan agar terdakwa **Drs. BURHANUDIN HUSIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 190 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin. MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin. MM tersebut diatas dari dakwaan ;
- Melepaskan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin. MM dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin. MM dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin. MM dari Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang , bahwa Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/PID.SUS/2012/PN.PBR. tanggal 24 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. BURHANUDIN HUSIN, MM **tidak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 191 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa terdakwa Drs. H. BURHANUDIN HUSIN, MM dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. BURHANUDIN HUSIN, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. BURHANUDIN HUSIN, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp. 300.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI(AA1);
  - 2) Uang tunai Rp. 300.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI(AA2);
  - 3) Uang tunai Rp. 200.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI(AA3);
  - 4) Uang tunai Rp. 200.000.000,- yang disita dari SUNARIYO Direktur PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(AA4);
  - 5) Uang tunai Rp. 100.000.000,- yang disita dari Ir FICKY ZZ Direktur

Hal. 192 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BINA DAYA BINTARA(AA5);

## ***Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti terhadap perkara yang bersangkutan;***

Barang bukti berupa :

1. Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.383/VII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintahan Propinsi Riau atas nama Drs Burhanuddin Husin, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. (L.13a).

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur CV. Alam Lestari kepada Bupati Pelalawan Nomor: 008/AL-IUPHHKHT/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Alam Lestari ditandatangani MARGARETA. (A.1);
- 2) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Uniseraya kepada Bupati Pelalawan Nomor: 051/USPKU-VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Uniseraya ditandatangani SUPENDI dengan dilampiri peta. (A.2);
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bupati Pelalawan Nomor: 146/RMP/PKU-VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.(A.3);
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Triomas FDI kepada Bupati Pelalawan Nomor: 055/TM/PKU-V/2002 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Triomas FDI ditandatangani Direktur Utama SUPENDI dilampiri peta.(A.4);

Hal. 193 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. MADUKORO yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 07/MDK/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang ditanda tangani Direktur Ir.ANDRI YAMA PUTRA berikut 1 (satu) lembar fotokopi peta lampirannya.(A.5);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT. Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.(A.7);
- 8) 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 01/MPL/IV/2001 tanggal 30 April 2001 perihal permohonan hak pengusahaan hutan tanaman campuran di Pelalawan yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur berikut lampiran 1 peta. (A.8);
- 9) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 01/MHJ-1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal UntukPembangunan HTI Pulp yang ditanda tangani Direktur DIDI HARSA. (A.9);
- 10) Tulisan tangan "Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera " tertanggal 19 Agustus 2002 dan "Kasi RKPHT pelajari & Proses"

Hal. 194 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 19 Agustus 2002 pada Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman. (A.10);

11) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(A.11);

12) 1 (satu) lembar tulisan dari Bupati Siak tanggal 4 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kadishut/Bapedalda dan 1 (satu) lembar surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor :

59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Siak perihal permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, berikut lampiran peta permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.-(A.12);

13) Surat PT Balai Kayang Mandiri Nomor : 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK HT PT Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.950 Ha yang berada di Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Direktur PT Balai Kayang Mandri Syafrawi (A.13);

14) Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Siak Kecil) Kec. Siak dan Sei Mandau Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 15.700 Ha (A.14);

15) Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.500 Ha.(A.15);

16) Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Hal. 195 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandri (Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 :

50.000 luas 6.750 Ha. (A.16);

17) Surat dari PT.Bina Daya Bintara Nomor : 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri di Areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha An. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Ir.H.FICKY Z.Z selaku Direktur Utama ((A.17);

18) Peta permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Bina Daya Bintara Kecamatan Sam Sam Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 8.000 Ha.(A.18);

19) Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor:

002/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Bupati Siak Sri Indrapura perihal Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari dan Peta Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000.(A.19);

20) Surat Wakil Bupati Siak Nomor: 522.1/EK/1341 Tanggal 14 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR. (A.20);

21) Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.1/CAN/0821.a Tanggal 30 Mei 2002 kepada Bupati Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) seluas  $\pm$  7.500 Ha an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Hal. 196 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kehutanan Kabupaten Siak H. ASRAL RACHMAN, S.H dan peta lampiran surat kadishut kabupaten tentang pertimbangan teknis IUPHHK HT PT. RML. (A.21);

22) Surat Bupati Siak Nomor : 522.1/EK/1328 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR (A.22);

23) 1 (satu) bundel yang berisi surat nomor 012/BDB/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, surat Nomor : 2370/Kwl-2/1999 tanggal 23 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH

PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, Surat Gubernur KDT I Riau Nomor : 525/EK/2007 tanggal 7 Agustus 1999 perihal Rekomendasi HPH eks areal HPH PT. Kosmar Timur Raya An. PT.Bina Daya Bintara serta peta lampiran dan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1788/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan permohonan HPH serta peta lokasi survai dan Amdal. (A.24);

24) Surat nomor : 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan tanaman di areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha An.PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kabupaten Siak H.ASRAL RACHMAN, SH serta peta lampirannya. (A.24);

25) 1 (satu) buah buku fotokopi Project Proposal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.MADUKORO tanggal 16 Juli 2001 yang ditandatangani Direktur PT.MADUKORO Hal. 197 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ir.ANDRI YAMA PUTRA.(B.1);

- 26) 1 (satu) buah buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI Juni 2001 dengan stempel direktur utama ABAS YACOB.(B.2);
- 27) 1 (satu) buah buku fotokopi Usulan Proyek Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) PT.MITRA TANINUSA SEJATI Nopemner 2000 yang ditandatangani Direktur SHO ERWIN.(B.3);
- 28) Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Mei 2002. (B.4)
- 29) Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI (B.5);
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yang dimohon IUPHHKHT a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari tertanggal Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO.(C.1);
- 31) 1 (satu) buku laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam rangka permohonan IUPHHKHT An PT.MADUKORO, pangkalan Kerinci Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hambali.(C.2);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. Selaras Abadi Utama tertanggal 5 Juni 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY PURWANTO dilampiri dengan surat perintah tugas.(C.3);
- 33) Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.1/CAN/2622 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh  
  
Plt.Kepala Dinas H.ASRAL RACHMAN, SH (C.4);
- 34) Surat perintah tugas No.522.1/CAN/2522 tanggal 6 juni 2002  
Hal. 198 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang surat perintah melaksanakan survey mikro lapangan terhadap permohonan ijin IUPHHK HT PT. RML seluas  $\pm$  7500 Ha. (C.5);

35) Buku laporan Hasil survey mikro lapangan dalam rangka pencadangan areal hutan tanaman industri (HTI) dikelompok Sungai Ranggau dan Sungai Sam Sam. PT. BINA DAYA BINTARA. (C.6);

36) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Survey Mikro Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey Mikro IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:50.000.-. (C.7);

37) 1 (satu) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Nomor : 522.1/PR/IV/2002/608 tanggal 01 Mei 2002 perihal Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman CV. TUAH NEGERI kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI.(D.1);

38) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX/2001/517 tanggal 6 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman a.n. CV. Alam Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto dengan 1 (satu) lampiran peta.(D.2);

39) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.3/REK-VIII/2001/682 tanggal 9 Agustus 2001 perihal  
Hal. 199 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto.(D.3);

40) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/VIII/2001/505 tanggal 15 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Uniseraya ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.(D.4);

41) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.(D.5);

42) 2 (dua) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/PR/IX/2001/518 tanggal 7 September 2001 perihal Pertimbangan teknis pencadangan Areal untuk IUPHHK-HT An. PT. MADUKORO yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO berikut 1 (satu) lembar asli peta lampirannya.(D.6);

43) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621 tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yang ditanda tangani

oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI beserta lampiran peta.(D.7);

Hal. 200 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 44) 2 (dua) lembar foto kopi surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.3/BP/V/2001/573 tanggal 5 Juli 2001 perihal Pertimbangan teknis Areal yang Dimohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO. (D.8);
- 45) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor 522.1/CAN/0116.a tanggal 27 April 2002 tentang Saran Pertimbangan teknis Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas  $\pm$  22.720 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh H. ASRAL RAHMAN, SH. (D.9);
- 46) 2 (dua) lembar Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) No: 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 Perihal: Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada Bupati Siak berikut Lampiran peta.(D.10);
- 47) Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHK-HT an. PT Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.950 ha, ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas H. Asral Rachman, SH. (D.11);
- 48) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas  $\pm$  15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau.(D.12);
- 49) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424

Hal. 201 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN.

PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPTasik Besar Serkap) seluas  $\pm$  6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(D.13);

50) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN.

PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas  $\pm$  6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau.(D.14);

51) Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Tanggal 6 Januari 2000 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau perihal Saran/Pertimbangan Teknis Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Ir. DARMINTO SOETONO, M.M. dan Peta Lampiran Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Skala 1:250.000. (D.15);

52) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Hutan Tanaman CV. Mitra Taninusa Sejati.(E.1);

53) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi Utama.(E.2);

54) 1 (satu) buah buku Laporan Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro. (E.3);

55) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari.(E.4);

56) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Uniseraya.(E.5);

Hal. 202 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 57) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Triomas FDI. (E.6);
- 58) 1 (satu) buah buku foto kopi Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Rimba Mutiara Permai.(E.7);
- 59) Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 001/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Direktorat Jenderal Biro Produksi Kehutanan perihal Tanggapan Peringatan I Pengurusan Study Kelayakan an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari.(E.8);
- 60) Laporan Studi Kelayakan Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 22.000 Ha, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.- (E.9);
- 61) Buku Studi Kelayakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. ASRAL RACHMAN, SH (ditandatangani) tanggal 31 Januari 2003.(E.10);
- 62) 1 (satu) buku Studi Kelayakan IUPHHK – HT PT Balai Kayang Mandiri Kabupaten Siak Propinsi Riau – Persetujuan Prinsip IUPHHK – HT Bupati Siak No.522.2/EK/1793, tanggal 28 Juni 2002 Luas ± 21.450 Ha.(E.11);
- 63) 1 (satu) buah Buku Laporan Utama Analisi Dampak Lingkungan Kawasan HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI di Kec. Siak, Kec. Mandau dan Kecamatan Bunga Raya.(E.12);  
Hal. 203 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

64) 1 (satu) buah buku Study Kelayakan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (E.13);

65) 1 (satu) Buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Luas 7.500 Ha Periode November 2002. (E.14);

66) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai.(F.1);

67) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Mitra Taninusa Sejati.(F.2);

68) 1 (satu) buah buku UKL/UPL IUPHHK HT CV. Alam Lestari.(F.3);

69) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Madukoro.(F.4);

70) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT. Madukoro(F.5);

71) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Uniseraya.(F.6);

72) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHK HT PT. Uniseraya.(F.7);

73) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Triomas FDI.(F.8);

74) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT. Uniseraya (F.9);

75) 1 (satu) buah buku Kerangka Acuan Amdal IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati.(F.10);

76) 1 (satu) buah buku Analisis Amdal Amdal IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati (F.11);

77) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Merbau

Hal. 204 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelalawan Lestari.(F.12);

78) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari.  
(F.13);

79) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari.  
(F.14);

80) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHKHT PT.  
Merbau Pelalawan Lestari.(F.15);

81) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Triomas FDI.(F.16);

82) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT Triomas FDI.(F.17);

83) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHKHT PT.  
Triomas FDI.(F.18);

84) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai.  
(F.19);

85) 1 (satu) buah buku Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama.  
(F.20);

86) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama.  
(F.21);

87) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT.  
Selaras Abadi Utama.(F.22);

88) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur  
Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang  
Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman  
PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS,  
SH.(F.23);

89) 1(satu) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani)  
No: 660/Bpdl-S/458 tanggal 27 Desember 2002 Perihal:

Hal. 205 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persetujuan ANDAL,RKL,RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditujukan kepada Pimpinan PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (F.24);

90) Surat Bupati Siak Nomor : 660/Bpdl-S/462 perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tanggal 29 januari 2003, ditandatangani oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. (F.25);

91) Surat Ka. Bapedalda kab. Siak Nomor : 660/BPDL-S/190 perihal Dokumen ANDAL HTI PT Balai Kayang sungai Apit dan Dokumen ANDAL PT Balai Kayang Bunga Raya tanggal 24 September 2003, ditandatangani oleh Ka. Bapedalda Kab. Siak H. Ridwan Kadir, SH. MM.(F.26);

92) Surat Bupati Siak Nomor 660/Bapedalda/32/2003 tanggal 7 Januari 2003 perihal persetujuan Amdal, RKL dan RPL Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH.(F.27);

93) Surat Bupati Siak Nomor: 660/Bpdl-S/186/2003 Tanggal 27 Januari 2003 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, S.H. (F.28);

94) Laporan Utama Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(F.29);

95) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Hal. 206 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Riau, Desember 2002.-(F.30);

96) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002.

(F.31);

97) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002.

(F.32);

98) Buku Analisis Dampak Lingkungan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (F.33);

99) 1 (satu) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 dengan Luas 7.500 Ha.(F.34);

100) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Pelalawan No : 522.21/DISHUT-PR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 kepada Direktur PT.SELARAS ABADI UTAMA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditanda tangani oleh T. AZMUN JAAFAR.(G.1);

101) 1 (satu) lembar Asli surat Bupati Pelalawan kepada Direktur CV. Tuah Negeri Nomor : 522.1/DISHUT/2002/6983 tanggal 03 Mei 2002 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Hutan Tanaman yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar Asli Peta Lampirannya.(G.2);

Hal. 207 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/DISHUT//2001/575 tanggal 10 September 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.3);
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.21/Dishut-PR/10/VIII/2001/04 tanggal 19 Agustus 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar, SH berikut 1 (satu) lembar lampiran peta.(G.4);
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Uniseraya Nomor: 522.1/DISHUT//2001/501 tanggal 25 Agustus 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.5);
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.21/DISHUT-PR//2001/08 tanggal 8 September 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin IUPHHK Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.6);
- 106) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/DISHUT/2002/636 tanggal 6 Juni 2002 kepada Direktur PT. Triomas FDI perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditanda tangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu ) lembar peta lampiran.(G.7);
- 107) 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001 perihal Hal. 208 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman An. PT. MADUKORO yang ditanda tangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar asli peta lampirannya.(G.8);

108) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Seluas  $\pm$  22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh ARWIN AS. (G.9);

109) 2(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha ditujukan kepada Direktur PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (G.10);

110) Asil Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.500 Ha ditandatangani oleh Arwin AS.(G.11);

111) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas  $\pm$  15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau. (G.12);

112) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas  $\pm$  6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau (G.13);

113) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai  
Hal. 209 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayang Mandiri (Blok HP. Tasik Besar Serkap) seluas  $\pm$  6.500 Ha

Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(G.14);

114) Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1563 tanggal 6 juni 2002 perihal persetujuan prinsip pencadangan ijin Usaha Hutan Tanaman An. PT. Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS. Serta peta lampirannya.(G.15);

115) Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  7.500 Ha ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. dan Peta Lampiran Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(G.16);

116) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1872 Tanggal 1 Agustus 2000 kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI perihal Rekomendasi Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.-(G.17);

117) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/Menhut-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  8.890 Ha di Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, Msc.(G.18);

Hal. 210 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan

Nomor : 522.1/PR/XII/2002/1921 tanggal 17 Desember 2002

perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT

kepada Direktur CV.TUAH NEGERI yang ditandatangani Kepala

Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI berikut 1

(satu) lembar Asli Peta Lampirannya.(H.1);

119) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten

Pelalawan kepada Direktur CV. Alam Lestari Nomor:

522.1/PR/XI/2002/957 tanggal 25 Nopember 2002 perihal

Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT a.n. CV.

Alam Lestari ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi berikut

lampiran peta.(H.2);

120) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan

Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1916 tanggal 17 Nopember

2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja IUPHHK-HT

ditandatangani oleh Ir. H.T. Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.3);

121) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Uniseraya Nomor:

522.1/PR/XI/2002/1896 tanggal 22 Nopember 2002 perihal

Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT a.n. PT.

Uniseraya ditandatangani oleh Ir. Tengku Zuhelmi berikut

lampiran peta.(H.4);

122) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor:

522.1/PR/XII/2002/2015 tanggal 26 Desember 2002 perihal

Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT

Hal. 211 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi berikut lampiran tembusan Surat Permohonan Tata Batas Areal Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ke Kepala Badan Planologi Kehutanan dan peta.(H.5);

123) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2016 tanggal 23 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT

ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(H.6);

124) 2 (dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT An. PT.MADUKORO kepada Direktur PT.MADUKORO yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI berikut 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lampirannya.(H.7);

125) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/PR/XII/2002/977 tanggal 2 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.1);

126) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Uniseraya Nomor: 522.1/PR/XII/2002/1995 tanggal 24 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. Tengku Zuhelmi.(I.2);

127) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/005 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT. Triomas FDI yang ditanda tangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI.(I.3);  
Hal. 212 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2004 dari CV Alam Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 8.580.000-(I.4);
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 10 Maret 2005 dari PT. Uniseraya kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 91.000.000- (sembilan puluh satu juta rupiah).(I.5);
- 130) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir aplikasi kirim uang dari Bank BNI dengan pengirim PT. Triomas FDI kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH sebesar Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 Rp 25.030.000,- tanggal 26 Mei 2003.(I.6);
- 131) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-HT) Nomor : 522.1/PR/XII/2002/851 tanggal 3 Desember 2002 perintah kepada PT. Madukoro untuk membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI (I.7);
- 132) 1 (satu) lembar Foto kopi formulir setoran dari Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUUPHH pada Bank Mandiri No Rekening 10200042030870 sebesar Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).(I.8);
- 133) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor:  
Hal. 213 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.1/PK/XI/2002/1917 tanggal 17 Nopember 2002

ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.9);

134) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 29 Nopember 2002 dari PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 14.539.000- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).(I.10);

135) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT)

kepada PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.11);

136) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 2003 dari PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bendaharawan Umum Negara di rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 23.400.000- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran fotokopi surat pengantar dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Ir. Amril Abuzar (I.12);

137) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2039 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.13);

138) 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT) No: 522.1/CAN/2614 tanggal 27 Maret 2003 ditandatangani oleh Hal. 214 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak Ir. AMIN

BUDYADI, MM. (I.14);

139) Asil Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor :

522.1/CAN/2613, ditandatangani oleh Ir. Amin Budyadi, MM

mewakili Kadishut Kab. Siak.(I.15);

140) Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/

3005 tanggal 30 Januari 2003 tentang Surat Perintah Pembayaran

Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

(SPP-IUPHHKHT) yang ditandatangani oleh Ir.AMIN BUDYADI, MM.

(I.16);

141) Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor: 522.1/CAN/5014

Tanggal 29 Maret 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah

Kabupaten Siak kepada PT Rimba Mandau Lestari yang

ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, M.M. Selaku Perwakilan

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.(I.17);

142) 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT)

No: 522.1/CAN/4914 tanggal 29 Maret 2003 ditandatangani oleh

yang mewakili Kepala Sub Dinas Perencanaan Hutan Kab. Siak Ir.

SYAHARUDDIN.(I.18);

143) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No :

522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002

tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT. SELARAS

ABADI

UTAMA seluas  $\pm$  13.600 Ha (Bruto) ,  $\pm$  11.690 Ha (Netto) di

Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR

berikut lampirannya.(J.1);

Hal. 215 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144) 6(enam) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:

522.21/IUPHHKHT/XII/2003/015 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV. ALAM LESTARI seluas  $\pm$  3.300 (tiga ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar.(J.2);

145) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:

522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas  $\pm$  5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan dan peta.(J.3);

146) 6 (enam) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:

522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. UNISERAYA seluas  $\pm$  35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 9 (sembilan) lembar Lampiran Keputusan dan peta.(J.4);

147) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:

522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas  $\pm$  9.000 (sembilan ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan berikut lampiran peta.(J.5);

148) 8 (delapan) lembar fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan

Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003

tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. TRIOMAS FDI seluas  $\pm$  9.625 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani Bupati Pelalawan

Hal. 216 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.AZMUN JAAFAR berikut 10 (sepuluh) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman CV. HARAPAN JAYA dan peta lampiran.(J.6);

149) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.MITRA HUTANI JAYA seluas  $\pm$  10.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa peta.(J.7);

150) 8 (delapan) lembar fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT.MADUKORO seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 10 (sepuluh) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/ I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.MADUKORO.(J.8);

151) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI seluas  $\pm$  7.300 (tujuh ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan.(J.9);

152) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27  
Hal. 217 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  16.875 (enam belas delapan ratus tujuh puluh lima) Ha di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI beserta Peta Lokasi dan Lampiran Keputusan tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ARWIN AS, SH.-(J.10);

153) 1( satu ) Lembar Peta Tata Ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ( IUPHHKHT ) Tahun ( tidak ada) An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau

Skala 1 : 50.000 Luas : 16.875 Ha.(J.11);

154) SK Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  21.450 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh) Ha Di Kabupaten Siak An. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Bupati Siak Arwin AS, SH. (J.12);

155) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 Ketentuan Mengenai Pelaksanaan IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri ditandatangani Bupati Siak Arwin AS, SH. (J.13);

156) Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04?IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP Tasik Besar Serkap) Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prop. Riau Luas  $\pm$  6.500 Ha. (J.14);

157) Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04?IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Hal. 218 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP T Minas) Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Prop. Riau Luas  $\pm$  8.200 Ha. (J.15);

158) Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  8.000 Ha di Kabupaten Siak An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH serta peta lampirannya. (J.16);

159) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Ketentuan mengenai pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT.Bina Daya Bintara.(J.17);

160) Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  6.400 (enam ribu empat ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (J.18);

161) Peta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Skala 1:50.000. (J.19);

162) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (J.20);

163) 6(enam) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/II/2003 Hal. 219 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ARWIN AS, SH (Bupati Siak) berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak dan Lampiran Peta Nomor: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002. (J.21);

164) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Tuah Negeri tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 103, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 7 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Tuah Negeri.(K.1);

165) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Mutiara Lestari tanggal 29 Oktober 2001 nomor 154, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 93 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Mutiara Lestari.(K.2);

166) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Putri Lindung Bulan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 126, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 8 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Putri Lindung Bulan.(K.3);

167) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Madukoro tanggal 12 April 2000 nomor 12, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 96 tentang perubahan anggaran dasar PT. Madukoro, 1 (satu) buah akta notaris perjanjian kerja sama perusahaan hutan tanaman industri nomor 78 tanggal 18 Mei 2005.(K.4);

168) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Bhakti

Hal. 220 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Praja Mulia tanggal 1 Nopember 2001 nomor 1, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris Nomor 46 tentang pemasukan dan

pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Bhakti Praja Mulia.(K.5);

169) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Harapan Jaya tanggal 8 Maret 1999 nomor 4, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 67 tentang perjanjian kerja sama perusahaan hutan tanaman industri.(K.6);

170) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 25 Oktober 1976 Nomor Y.A.5/503/7 tentang pendaftaran perusahaan PT. Uni Seraya dilampiri akta pendirian perusahaan nomor 23.(K.7);

171) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20815 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Triomas FDI dilampiri akta nomor 07 tanggal 05 Desember 2001 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDI.(K.8);

172) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20745 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri akta nomor 25 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa Sejati dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam perusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tang gal 01 April 2004.(K.9);

173) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Alam Lestari tanggal 28 Juni 2001 nomor 88, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 59 tentang pemasukan dan pengeluaran Hal. 221 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekutu serta perubahan anggaran dasar CV Alam Lestari.(K.11);

174) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 5 April 2001 nomor 4.(K.12);

175) 4 (empat) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Uniseraya dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditandatangani Supendi dan Rosman.(K.13);

176) 4 (empat) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Triomas dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditandatangani Supendi dan Rosman.(K.14);

177) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Buah Negeri dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.15);

178) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Puteri Lindung Bulan dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.16);

179) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Mutiara Lestari dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.17);

180) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama Koperasi Pangkalan Tuo Sakti dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.18);

181) 1 eksemplar foto kopi salinan akta Pendirian PT. Selaras Abadi Utama.(K.19);

182) 3 lembar fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT. Selaras Abadi Utama dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper. (K.20);

183) 1 rangkap foto kopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 05 April 2001.(K.21)

184) 1 rangkap fotokopi dilegalisir Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tanggal 6 April 2005 nomor Hal. 222 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 antara PT. Merbau Pelalawan Lestari dan PT. Dunia Karya Sejati.(K.22);

185) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 44 tanggal 21 Desember 2001 yang ditandatangani oleh HANANI, SH Notaris di Pekanbaru.-(K.23);

186) Akta Risalah Rapat No.76 PT Bina daya Bintang yang di buat oleh Notaris Darbi SH tanggal 23 November 2001. (K.24);

187) Akta pernyataan keputusan rapat PT Bina Daya Bintang Nomor 03 tanggal 25 Oktober 2004 yang di buat oleh notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (K.25);

188) Akta salinan legalisasi pernyataan Keputusan Rapat PT Bina Daya Bintang Nomor: 03 tanggal 13 Desember 2006 yang di buat oleh Notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (K.26);

189) Akta pendirian PT RML Nomor 4 tanggal 10 Agustus 1999 di buat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH. (K.27);

190) Berita Acara Rapat PT. RML Nomor 241 tanggal 26 Mei 2006 yang dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu tentang anggaran dasar PT. RML. (K.28);

191) Akta perjanjian kerjasama antara PT. RML dengan PT. Siak Raya Timber Nomor 28 tanggal 10 Maret 2004 yang di buat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu. (K.29);

192) Surat perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Masyarakat Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak – propinsi Riau yang di tandatangani tanggal 28 Februari 2004. (K.30);

193) Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dexter Perkasa dengan PT. RML yang di tandatangani tanggal 12 Maret 2004. (K.31);

194) 1 lembar fotokopi dilegalisir dilampiri peta Surat Nomor 522/EK/ Hal. 223 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 tanggal 6 Pebruari 2001 dari Gubernur Riau kepada Direksi

PT. Selaras Abadi Utama.(L.1);

195) 1 eksemplar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP a.n. PT. Selaras Abadi Utama.(L.2);

196) 2 lembar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP PT. Merbau Pelalawan Lestari dilampiri Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.(L.3);

197) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 092/RMP/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003 dengan lampiran 1 berkas perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman an PT Rimba Mutiara Permai.(L.4);

198) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 049/MTS/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003 dengan lampiran 1 berkas perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman an PT Mitra Taninusa Sejati.(L.5);

199) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Hutani Jaya Nomor 522.21/Dishut/IV/2002/1063 tanggal 3 April 2002 perihal persetujuan dispensasi pembukaan lahan dan ijin percobaan penanaman PT. Mitra Hutani Jaya uni serapung.(L.6);

200) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada Bupati kepada Bupati Pelalawan Nomor 522.2/PK/5618 tanggal 29 Juni 2002 perihal penerbitan IUPHHKHT dan IPK an PT. Merbau

Hal. 224 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelalawan Lestari.(L.7);

201) 2 (dua) lembar fotokopi surat Menteri Kehutanan M. Prakosa kepada Bupati Pelalawan Nomor 26/Menhut-VI/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 perihal penerbitan IUPHHK HT an PT. Merbau Pelalawan Lestari di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.(L.8);

202) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/Dishut/III/2003/275 tanggal 25 Maret 2003 perihal penerbitan IPP dan IPK PT Merbau Pelalawan Lestari. (L.9);

203) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor 522.21/Dishut/VIII/2002/37 tanggal 14 Agustus 2002 perihal Penerbitan IUPHHK HT dan IPK. (L.10);

204) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 03A/MTS/VII/2000 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran an. PT. Mitra Taninusa Sejati.(L.11);

205) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor 322/VI-PHT/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Permohonan Areal HPH Tanaman an PT. Mitra Taninusa Sejati di Propinsi Riau.(L.12);

206) 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Riau kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/EK/2529 tanggal 23 September 2000 dengan 1 lampiran peta perihal Rekomendasi Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) an PT. Mitra Taninusa Sejati.(L.13);

207) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 02/SSL-Dir/IX/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Hal. 225 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tata Batas, ditandatangani oleh Ir. DELTA.(L.14);

208) Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002).(L.15);

209) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor: 094/MTS/PKU/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penambahan Areal blok RKT Th 2005 An, PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh S. ERWIN.(M.1);

210) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.Selaras Abadi Utama Nomor: 109/SAU/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 perihal Pengajuan Usulan RKT-UPHHK HT Tahun 2006 PT.SELARAS ABADI UTAMA yang ditandatangani Ir. HUSNI DJALANIDI.(M.2);

211) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. ALAM LESTARI Nomor : 085/AL/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengajuan usulan RKT-UPHHK HT tahun 2006 CV. ALAM LESTARI yang ditandatangani oleh SAID EDDY, SH.(M.3);

212) Asli satu lembar surat Nomor: 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (URKT-UPHHKHT) Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Dikrektor.(M.4);

213) Asli dua lembar surat Nomor: 120/MPL-PKU/UM/X/2006 tanggal 9  
Hal. 226 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2006, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Revisi Target Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (URKT-UPHHKHT) Tahun 2006 a.n. PT. Merbau

Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Dikrektor, dan lampiran berupa Peta Kemajuan Tebangan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO.(M.5);

214) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. UNISERAYA Nomor : 085/US/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal permohonan pengesahan RKT tahun 2006 kegiatan IUPHHK-HT An. PT. UNISERAYA, yang ditandatangani oleh SUPENDI.(M.6);

215) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. RIMBA MUTIARA PERMAI Nomor : 135/RMP/PKU/II/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal permohonan penilaian dan pengesahan usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN.(M.7);

216) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor : 152/MTS/PKU/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHKHT Th 2006 An, PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh S. ERWIN, beserta lampirannya 1 (satu) buah buku RKT UPHHKHT Th 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati.(M.8);

217) Asli satu lembar surat Nomor: 167/TM/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, dari PT. Triomas FDI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pengesahan RKT UPHHK-  
Hal. 227 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHK-HT a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh SUPENDI selaku Presiden Direktur.(M.9);

218) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : 157/MHJ/IX/2005 tanggal 15 September 2005 perihal

Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) Tahun 2006 An. PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Direktur AGUS WAHYUDI.(M.10);

219) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : 050/MHJ/IX/2006 tanggal 6 September 2006 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) Tambahan Target Tahun 2006 An. PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Direktur AGUS WAHYUDI berikut 1 (satu) lembar peta situasi Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya(M.11);

220) 1( satu )Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :058/SSL-DIR/X/2005

Tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(M.12);

221) 1( satu )Lembar surat dari Ir H FICKY ZZ Selaku Direktur Utama PT. BINA DAYA BINTARA Nomor :052/BDB/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Hal. 228 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanaman Tahun 2006 An.PT. BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.(M.13);

222) 1( satu )Lembar surat dari Ir PRAPTO Selaku Direktur Utama PT.RIMBA MANADU LESTARI Nomor :018/RML-PKU/UM/X/2005 Tanggal 20 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.(M.14);

223) 1 (satu) Lembar surat dari HERIYANTO selaku Direktur Utama PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 203/NT/HTI-C/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.15);

224) 1 (satu) Lembar surat dari Ir. ZULFAN HALIM selaku Direktur Utama PT. BALAI KAYANG MANDIRI Nomor : 075/BKM/XI/2005 tanggal 1 November 2005 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. BALAI KAYANG

MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.16);

225) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan terhadap usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.SELARAS ABADI UTAMA Lokasi Usulan RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan tanggal Pebruari 2006 dengan ketua TIM Pemeriksa SURAKHMAT, Hal. 229 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.(N.1);

226) 1 (satu) buah buku Laporan hasil pemeriksaan terhadap usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI Kabupaten Pelalawan.(N.2);

227) Foto kopi yang dilegalisir satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Revisi Target RKT-UPHHKHT Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, Lokasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Surakhmat, SH. selaku Ketua Tim Pemeriksa. (N.3);

228) Foto kopi yang dilegalisir satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT IUPHHK-HT Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, Lokasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Januari 2006, yang ditandatangani oleh Surakhmat, SH. selaku Ketua Tim Pemeriksa. (N.4);

229) 1 (satu) buah buku Foto kopi yang dilegalisir laporan hasil pemeriksaan calon lokasi RKT UPHHK-HT tahun 2006 PT. UNISERAYA lokasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. (N.5);

230) Asli satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT. Triomas FDI, Lokasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Februari 2006, yang ditandatangani oleh Salim selaku Ketua Tim Pemeriksa.(N.6);

231) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan calon lokasi URKT-UPHHKHT Tahun 2006 PT.MITRA HUTANI JAYA tanggal, Januari 2006 dengan ketua TIM Pemeriksa SURAKHMAT, SH.(N.7);  
Hal. 230 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

232) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan RKT

UPHHKHT Th 2006 a.n. PT. Madukoro Kab. Pelalawan.(N.8);

233) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT

UPHHKHT Th 2006 PT Mitra Taninusa Sejati Lokasi Kec. Kerumutan

Kab. Pelalawan, dilampira Peta Hasil Pemeriksaan RKT.(N.9);

234) Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja

Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT.

SERAYA

SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal

Desember 2005, ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA.(N.10);

235) 1(satu )Buah Buku Laporan Pemeriksaan Terhadap Usulan

Rencana Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman tahun 2006

An. PT.BINA DAYA BINTARA Siak Sri Indrapura , Desember 2005.

(N.11);

236) 1( satu )Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana

Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST

PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Januari 2006 (N.12);

237) 1( Satu ) Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Tambahan Rencana

Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.

NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura

,Agustrus 2006 (N.13);

238) 1 (satu ) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap

Usulan

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.RIMBA

MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(N.14);

Hal. 231 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 239) 1(satu ) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(N.15);
- 240) 6 (enam) lembar copy surat dari Kadishut Kab. Pelalawan Nomor: 522.22/PI/III/2006/7403 tanggal 2 Maret 2006 kepada Kadishut Prop. Riau perihal Pertimbangan Teknis URKT-IUPHHKHT Th. 2006 An. PT Madukoro, yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI.(O.1);
- 241) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.22/PI/II/2006/7202 tanggal 9 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.2);
- 242) Foto kopi yang dilegalisir enam lembar surat Nomor: 522.22/PI/II/2006/7502 tanggal 10 Februari 2006 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis RKT UPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.3);
- 243) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/8702 tanggal 14 Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. UNISERAYA, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.4);
- 244) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan Hal. 232 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/6702 tanggal 7 Pebruari 2006 berikut peta situasi pertimbangan teknis usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.5);

245) Foto kopi yang dilegalisir 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/III/2006/6903 tanggal 1 Maret 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis RKT IUPHHKHT tahun 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI, beserta lampirannya dan Peta Pertimbangan Teknis Usulan RKT.(O.6);

246) Asli enam lembar surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/7003 tanggal 1 Maret 2006 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, dan satu lembar Peta Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.7);

247) 7 (tujuh) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/2703 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani

Drs. EDI SURIANDI berikut 2 (dua) lembar Peta Lampirannya.

Hal. 233 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(O.8);

248) 8 (delapan) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/X/2006/7717 tanggal 20 Oktober 2006 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 (Tambahan Target) An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI berikut 2 (dua) lembar Peta Lampirannya.(O.9);

249) 6 (enam) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/0002 tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT.Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI dan 1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2006 PT.Selaras Abadi Utama.(O.10);

250) surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(O.11);

251) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/4860 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. BINA DAYA BINTARA, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(O.12);

252) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5091 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hal. 234 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. BALAI KAYANG MANDIRI,  
ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.13);

253) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/4804 tanggal 6 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. RIMBA MANDAU LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.14);

254) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/258 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.15);

255) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 18/PK/HA/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM. (P.1);

256) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 44/PK/HA/VIII/2006 tanggal 20 Juli 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI, yang ditanda tangani oleh PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.2);

257) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 36/PK/HA/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang  
Hal. 235 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan  
Tanaman,

perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan  
Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006  
a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh  
Purnama Irawansyah, S.Hut., MM.(P.3);

258) Asli tiga lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan  
Hutan Alam Nomor: 53/PK/HA/XI/2006 tanggal 28 November  
2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan  
Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal  
Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan  
Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang  
ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM.(P.4);

259) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 25/PK/HA/VI/2006 tanggal 14  
Juni 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang  
ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman  
perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan  
pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan  
Tanaman tahun 2006 PT. UNISERAYA, yang ditanda tangani oleh  
PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.5);

260) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir Nota Dinas Nomor:  
24/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 dari Kepala Seksi Bina  
Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi  
Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan  
Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman  
Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA  
MUTIARA PERMAI, yang ditanda tangani oleh PURNAMA  
IRWANSYAH.(P.6);

261) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas  
Hal. 236 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juli 2006 dari Kepala Seksi

Bina

Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKTUPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditanda tangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut, MM.(P.7);

262) Foto kopi yang dilegalisir dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 33/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM(P.8);

263) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. : 54/PK/HA/XI/2006 tanggal 28 November 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2007 PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.MAMUN MUROD, MM(P.9);

264) 2(Dua ) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 31/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (P.10);

265) 2(Dua ) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 27/PK/HA/VI/2006, Hal. 237 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan  
Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.BINA  
DAYA BINTARA.(P.11);

266) 2(Dua ) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan  
Hutan Alam Tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 41/PK/HA/VI/2006, Perihal  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI  
pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.RIMBA MANDAU  
LESTARI.(P.12);

267) 2(Dua ) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan  
Hutan Alam Tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 43/PK/HA/VI/2006, Perihal  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI  
pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.BALAI KAYANG  
MANDIRI.(P.13);

268) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau  
Nomor : KPTS/522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005 tentang  
pengesahan Tambahan Target Rencana Kerja Tahunan Usaha  
Pemnfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005  
An. PT Mitra Taninusa Sejati di areal seluas 2.250 ha (bruto) atau  
2.015 ha (net.to), yang ditanda tangani oleh Drs. H.  
BURHANUDDIN HUSIN, MM. , beserta lampirannya.(Q.10);

269) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/1005 Tanggal 29 Maret 2006 tentang  
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten  
Pelalawan An. PT.Selaras Abadi Utama seluas 4.032 Ha (Bruto)  
atau seluas 1.437 Ha (Netto) berikut 1 (satu) lembar Asli  
Lampiran Keputusannya yang ditandatangani  
Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.2);

270) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau  
Hal. 238 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut lampirannya Nomor : KPTS/522.2/PK/3274 tanggal 01 September 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di kabupaten Pelalawan An. CV. ALAM LESTARI di areal seluas 635 ha (bruto) atau 600 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.3);

271) Asli enam lembar dan satu lembar lampiran tentang Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nomor: Kpts.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan a.n. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.4);

272) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor: KPTS. 522.2/PK/2331 tanggal 3 Juli 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT. UNISERAYA di areal seluas 7.291 ha (bruto) atau 6.000 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.5);

273) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor: KPTS/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di areal seluas 5.7771 ha (bruto) atau 4.595 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.6);

Hal. 239 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

274) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau

Nomor: KPTS/ 522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemnfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kab. Pelalawan An. PT

Mitra Taninusa Sejati di areal seluas 3000 ha (bruto) atau 2.750 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM. , beserta lampirannya.(Q.7);

275) Asli enam lembar dan satu lembar lampiran Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS. 522.2/PK/2334 tanggal 3 Juli 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan6 Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.8);

276) 4 (empat) lembar Asli keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1014 Tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT.Mitra Hutani Jaya di Kabupaten Pelalawan seluas 1.371,61 Ha (Bruto) atau seluas 1.045,00 Ha (Netto) yang ditandatangani Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN. MM berikut 1 (satu) lembar lampirannya.(Q.9);

277) Foto kopi yang dilegalisir 5 (lima) lima lembar dan satu lembar

lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS. 522.2/PK/2520 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelelawan a.n. PT. Madukoro, yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 240 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.10);

278) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten

Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM(Q.11);

279) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2618 Tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.12);

280) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2942 Tanggal 7 Agustus 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.13);

281) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2224 Tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.BINA DAYA BINTARA, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM;

282) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2223 Tanggal 1 September 2006 Hal. 241 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.14);

283) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh

Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.(R.1);

284) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.(R.2);

285) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh

Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh sebagian Tim Verifikasi.(R.3);

286) 3(tiga) lembar fotocopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI luas areal  $\pm$  5.590 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.4);

287) 2(dua) lembar fotocopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.RIMBA MUTIARA PERMAI luas areal  $\pm$  9000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.5);

288) 2(dua) lembar fotocopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MITRA

Hal. 242 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANINUSA SEJATI luas areal  $\pm$  7.300 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.6);

289) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.TRIOMAS FDI luas areal  $\pm$  9.625 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.7);

290) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.SATRIA PERKASA AGUNG luas areal  $\pm$  12.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.8);

291) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.TUAH NEGERI, luas areal  $\pm$  1.500 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.9);

292) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MITRA HUTANI JAYA, luas areal  $\pm$  10.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.10);

293) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.MUTIARA LESTARI luas areal  $\pm$  4.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.11);

294) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.HARAPAN JAYA, luas areal  $\pm$  4.800 Ha yang diterbitkan Gubernur atau

Hal. 243 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.12);

295) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.PUTRI LINDUNG BULAN, luas areal  $\pm$  2.500 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.13);

296) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.ALAM LESTARI luas areal  $\pm$  3.300 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.14);

297) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.BHAKTI PRAJA MULIA, luas areal  $\pm$  5.800 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.15);

298) 2(dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MADUKORO, luas areal  $\pm$  15.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.16);

299) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.UNISERAYA luas areal  $\pm$  35.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.17);

300) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.199/VI/BRPHP-1/RHS/2005 tanggal 5 September 2005 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penerbitan Peta Areal Kerja untuk IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.SATRIA PERKASA AGUNG, PT.MITRA HUTANI JAYA, yang diterbitkan oleh daeah dan telah diverifikasi oleh Departemen Kehutanan dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA Hal. 244 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.18);

301) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.34/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 20 Januari 2006, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Laporan Hasil Verifikasi perizinan IUPHHK pada Hutan Tanaman atau Hutan Alam yang an. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT.MITRA TANINUSA SEJATI, PT.RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIOMAS FDI, PT. UNISERAYA yang diterbitkan oleh Gubernur

atau Bupati/Walikota dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.19);

302) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.234/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.TRIOMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh

Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.20);

303) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.241/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT an. PT.TROMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.21);

304) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: Hal. 245 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ND.317/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 21 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Persetujuan SP-2 IUPHHK-HT PT Triomas FDI dan PT. Uniseraya di Kab.Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.22);

305) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.295/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 4 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT an. PT.TROMAS

FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.23);

306) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND..23/VI/BRPHP-2/RHS/2007, tanggal 24 Januari 2007 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati an. PT. MADUKORO, CV.HARAPAN JAYA, CV. ALAM LESTARI dan CV.BHAKTI PRAJA MULIA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.24);

307) 1(satu) lembar fotocopi telah dilegalisir, surat dari Direktur Bina rencana Pemanfaatan Bina Produksi Nomor: S.172/VI/BRPHP-2/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan tentang penugasan kepada Sdr. Ir.Usman,MS.c (Kasi Penyiapan Pemanfaatan Hutan Tanaman), Ir.Hasan Mansyur (Kasi

Hal. 246 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelola Lingkungan), Yayasan Suryatna (Staf Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi) untuk melakukan Monev Perkembangan Izin IUPHHK-Alam/Tanaman dan Non Kayu yang diterbitkan Gubernur/Bupati dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.25);

308) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.173/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Laporan Hasil Verifikasi Lapangan IUPHHK-HT yang

diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Kab.Indra Giri Hulu dan Kab. Siak Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.26);

309) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.188/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal -- Mei 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Laporan Hasil Verifikasi Lapangan IUPHHK-HT yang

diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Kab.Indra Giri Hulu dan Kab. Siak Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.27);

310) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.262/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Laporan Hasil Verifikasi Perizinan IUPHHK pada Hutan Hal. 247 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman dan Hutan Alam an. CV.ALAM LESTARI, CV.PUTRI LINDUNG BULAN, CV.MUTIARA LESTARI, CV.TUAH NEGERI, CV.BHAKTI PRAJA MULIA, CV.HARAPAN JAYA, PT. MADUKORO yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.28);

311) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.MITRA HUTANI JAYA atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.29);

312) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.SATRIA PERKASA AGUNG atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  11.830 (sebelas ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.30);

313) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.RIMBA MUTIARA PERMAI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  8.030 (delapan ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.31);

314) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri

Hal. 248 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor: SK.66/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.MITRA TANINUSA SEJATI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  7.480 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.32);

315) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.69/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.33);

316) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.214/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.UNISERAYA atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.34);

317) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.215/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman CV. TUAH NEGERI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  1.480 (seribu empat

Hal. 249 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.35);

318) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. BALAI KAYANG MANDIRI.(R.36);

319) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. RIMBA MANDAU LESTARI.(R.37);

320) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. SERAYA SUMBER LESTARI.(R.38);

321) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(R.39);

322) 1(satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. BINA DAYA BINTARA.(R.40);

323) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/6340 Tanggal 12 Desember 2005 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. CV Harapan Jaya Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fachruddin Siregar/NIP 710000628. RKT UPHHK-HT CV Harapan Jaya SK Nomor Kpts/522.2/PK/0210 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2005.(S.1);

324) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/6440 Tanggal 12 Desember 2005 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. PT Madukoro Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Maringan Pakpahan/NIP 710018118. RKT UPHHK-HT PT

Hal. 250 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madukoro SK Nomor Kpts/522.2/PK/0110 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2005.(S.2);

325) Dua lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/IX/2006/2216 tanggal 18 September 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.(S.3);

326) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3020 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT. Madukoro Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Waldi Bahri/NIP 710016610. RKT UPHHK-HT PT Madukoro SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2520 CDK Langgam dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.4);

327) 2 (dua) lembar foto kopi yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/1113 tanggal 31 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.5);

328) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2839 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Rimba Mutiara Permai Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulkarnain/NIP 420016763. RKT UPHHK-HT PT Rimba Hal. 251 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mutiara Permai SK Nomor Kpts/522.2/PK/2226 dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.6);

329) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/0212 tanggal 12 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.7);

330) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2838 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Mitra Taninusa Sejati Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulfahmi/NIP 710020440. RKT UPHHK-HT PT Mitra Taninusa Sejati SK Nomor Kpts/522.2/PK/2225 dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.8);

331) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2837 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan

(P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Triomas FDI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Armizar, SE/NIP 420014408. RKT UPHHK-HT PT Triomas FDI SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2334 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.9);

332) 3 (tiga) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/4112 tanggal 17 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan;

Hal. 252 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333) Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.10)6 (enam)

lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2784 Tanggal 26 Juli 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Uni Seraya Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Djamalis/NIP 420003400. RKT UPHHK-HT PT Uni Seraya SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2331 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.11);

334) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/4112 tanggal 17 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.12);

335) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1593 Tanggal 11 Mei 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Selaras Abadi Utama berikut lampirannya. Nama P2LHP yang

ditunjuk Fachruddin Siregar/NIP 710000628. RKT UPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama SK Nomor Kpts/522.2/PK/1005 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.13);

336) 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/IV/2006/5705 tanggal 7 April 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.14);

Hal. 253 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2249 Tanggal 26 Juni 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Merbau Pelalawan Lestari Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tri Rahayu Widodo/NIP 710007420. RKT UPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari SK Nomor Kpts/522.2/PK/2051 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.15);

338) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VI/2006/5110 tanggal 22 Juni 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.16);

339) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 042/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(S.17);

340) Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/058 tanggal 7 Juli 2006 tentang Usulan Petugas P2LHP, ditandatangani oleh H. AMRI RAJA MUDA, SE.(S.18);

341) 1( satu ) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2783 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan ( P2LHP ) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Lingkut Dinas Kahutanan

Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN

Hal. 254 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN, MM. tanggal 26 Juli 2006. (S.19);

342) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.-(S.20);

343) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/2071 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 3 Juli 2006, ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, MM.-(S.21);

344) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 040/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(S.22);

345) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/1930 tanggal 11 Juli 2006 tentang Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM beserta Kartu Pengawas Penguji a.n Winarto. (S.23);

346) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(S.24);

347) 1( Satu ) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Hal. 255 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang  
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak  
An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh  
Drs.H.BURHANUDDIN ,MM.(S.25);

348) 1 ( satu ) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas  
Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Siak Nomor : 522.2/Prod/133 tanggal 20 Juli 2006  
perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER &  
FOREST PRODUCT ( NTFP ) yang ditandatangani oleh  
H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai  
Apit. (S.26);

349) 1 ( satu ) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas  
Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan  
Nomor : 522.2/Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas  
mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST  
PRODUCT ( NTFP ) ijin No. Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni  
2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku  
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. (S.27);

350) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/2835 tanggal 1 Agustus 2006 tetang  
Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil  
Penebangan

(P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP  
Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani  
oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 2 (dua) lembar lampirannya.  
(S.28);

351) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau  
Hal. 256 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : Kpts/522.2/PK/2609 tanggal 17 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil

Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar lampiran.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada KAHARANI nomor : 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli 2006 Perihal Penunjukan Sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI. (S.29);

352) 1( satu ) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2499 tentang Penunjukan /penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan ( P2LHP ) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK-HT An.PT. BINA DAYA BINTARA, Lingkut Dinas Kehutanan Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN HUSIN ,MM.tanggal 10 Juli 2006.(S.30);

353) 1( satu ) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/4667 tentang Penunjukan /penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan ( P2LHP ) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK-HT An.PT. RIMBA MANDAU LESTARI, Lingkut Dinas Kehutanan Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Ir. Sudirno,MM. tanggal 8 Desember 2006.(S.31);

354) Surat Direktur Utama PT. RIMBA MANDAU LESTARI Nomor: 013A/RML/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan Petugas Pembuat/Penerbit LHP a.n. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, ditandatangani oleh Ir. PRAPTO.(S.32);

355) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 01/US/SL/VII/06 tanggal 29 Juli 2006 perihal Permohonan Hal. 257 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00002 s/d 00047 Periode II (Dua) Bulan Juli 2006 ditujukan kepada DJAMALIS

(Pejabat Pengesahan LHP) di Sei Lakar, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 5 Agustus 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0002 s/d 00047 tanggal 16 s/d 27 Juli 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Juli 2006 Nomor : 02 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI), diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat LHP No. : 002 s/d 0047 beserta 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 0002 s/d 00047 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.M diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.1);

356) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : --/US/SL/VII/06 tanggal 29 Juli 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 0002 s/d 00067 Periode II (Dua) Bulan Juli 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil Akhir Bulan Juli 2006 Nomor : 02 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP

(DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 5 Agustus 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0002 s/d 00067 tanggal 16 s/d 28 Juli 2006 ditandatangani Petugas

Hal. 258 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 7 (tujuh) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 0002 s/d 00067 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi PT.UNISERAYA (DEDI.M) beserta 66 (enam puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 0002 s/d 00067 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.M diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.2);

357) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 05/US/SL/VIII/06 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 004 s/d - Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 004 s/d - ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1(satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00004 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.3);

358) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 03/US/SL/VIII/06 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0049 s/d 0082 Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hal. 259 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor :

04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0049 s/d 0082 tanggal 18 s/d 29 Agustus 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 34 (tiga puluh empat) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00049 s/d 0082 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.4);

359) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 04/US/SL/VIII/06 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0069 s/d 00120 Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0069 s/d 00120 tanggal 18 s/d 29 Agustus 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 52 (lima puluh dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KBK) Hal. 260 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(diameter) 20 – 29 Cm ) Nomor : 00069 s/d 00120 berdasarkan RKT/BK : 522.2/ PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.5);-----

360) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 10/US/SL/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0006 s/d - Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 006 s/d - tanggal 18 s/d 28 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1(satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00006 s/d - berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/ 2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.6);

361) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 06/US/SL/IX/06 tanggal 14 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0083 s/d 00115 Periode I (satu) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan Bulan September 2006 Nomor : 05 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Hal. 261 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 23 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0083 s/d 00115 tanggal 03 s/d 13 September 2006 ditandatangani Petugas

Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M),

4

(empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 0083 s/d 00115 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 000083 s/d 000115 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.7);

362) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 08/US/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00116 s/d 00145 Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00116 s/d 00145 tanggal 16 s/d 27 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT. UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 00116 s/d 00145 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT. UNISERAYA (DEDI.M), beserta 30

Hal. 262 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00116 s/d 00145 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.8);

363) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 07/US/SL/IX/06 tanggal 14 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00121 s/d 00167 Periode I (Satu) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan September 2006 Nomor : 05 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 23 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00121 s/d 00167 tanggal 03 s/d 13 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 00121 s/d 00167 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 47 (empat puluh tujuh ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00121 s/d 00167 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.9);

364) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 09/US/SL/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan

Hal. 263 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00168 s/d 00219

Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada

DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar

Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-

KBK) Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan

RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI

MULYADI) diperiksa dan

disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara

Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen

LHP No. : 00168 s/d 00219 tanggal 16 s/d 27 September 2006

ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari

PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan

Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 52 (lima puluh dua )

lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK 0

(diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00168 s/d 00219 berdasarkan

RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh

DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP

(DJAMALIS).(T.10);

365) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

13/US/SL/X/06 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 008 s/d -

Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS

(Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan

Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan

Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331

Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan

disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara

Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan

dokumen LHP No. : 008 / BBS ditandatangani Petugas Kehutanan

Hal. 264 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00008 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.11);

366) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :-- tanggal 31 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00147 s/d 00199 Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00147 s/d 00199 tanggal 16 s/d 30 Oktober 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 53 (lima puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00147 s/d 00199 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.12);

367) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : --/US/SL/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00221 s/d 00323 Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP- Hal. 265 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KBK) Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK :

522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI)

diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar

Berita Acara Pemeriksaan LHP

tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. :

00221 s/d 00323 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani

Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA

(DEDI.M), 11 (sebelas) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari

PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 103 (seratus tiga ) lembar

Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø

(diameter) 20 - 29 Cm ) Nomor : 00221 s/d 00323 berdasarkan

RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh

DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP

(DJAMALIS).(T.13);

368) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

15/US/SL/XI/06 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00200 s/d 00216

Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada

DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar

Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan

Bulan Nopember 2006 Nomor : 09 berdasarkan RKT/BK :

522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI)

diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar

Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 25 Nopember 2006

berdasarkan dokumen LHP No. : 00200 s/d 00216 tanggal 2 s/d

10 Nopember 2006 Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi

dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar

Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan

DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 17

Hal. 266 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00200 s/d 00216 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.14);

369) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 16/US/SL/XI/06 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor :00324s/d 00354 Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan Bulan Nopember 2006 Nomor : 09 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 25 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00324 s/d 00354 tanggal 2 s/d 11 Nopember 2006 Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 31 (tiga puluh satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00324 s/d 00354 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.15);

370) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 17/US/SL/XI/06 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0009 s/d -- Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Laporan Hal. 267 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00009

berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP

PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 5 (lima) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil untuk BBS ditandatangani oleh

DEDI.MULYADI dari PT.UNISERAYA, diketahui dan ditandatangani oleh DJAMALIS.(T.16);

371) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 18/US/SL/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00217s/d 00259 Periode II (Dua) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00217 s/d 00259 tanggal 16 s/d 28 Nopember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Nopember 2006 Nomor : 10 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 43 (empat puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00217 s/d 00259 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.17);

372) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 19/US/SL/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Permohonan

Hal. 268 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00355 s/d 00410

Periode II (Dua) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada

DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara

Pemeriksaan LHP tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan

dokumen LHP No. : 00355 s/d 00410 tanggal 16 s/d

28 Nopember 2006

ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Nopember 2006 Nomor : 10 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 56 (lima puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00355 s/d 00410 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.18);

373) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 21/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00260 s/d 00329 Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 21 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00260 s/d 00329 tanggal 1 s/d 13 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan

Hal. 269 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 70 (tujuh puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00260 s/d 00329 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.19);

374) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 22/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00411 s/d 00500 Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 21 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00411 s/d 00500 tanggal 1 s/d 13 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 8 (delapan) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 90 (sembilan puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 – 29 Cm) Nomor : 00411s/d 00500 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.20);

Hal. 270 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 23/US/SL/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 330 s/d 371 Periode II.A (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP

No. : 00330 s/d 00371 tanggal 16 s/d 22 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.A ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 44 (empat puluh empat) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KB) Nomor : 00330 s/d 00373 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.21);

376) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 24/US/SL/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00501 s/d 00552 Periode II.A (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00501 s/d 00552 tanggal 16 s/d 22 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS)

Hal. 271 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.A ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 52 (lima puluh dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00501 s/d 00552 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.22);

377) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 23/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0011 s/d -- Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 22 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0011 / BBS tanggal 14 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 6 (enam) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil Untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.M dari PT.UNISERAYA dan diketahui oleh DJAMALIS, beserta 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 0011 s/d -- berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.23);

Hal. 272 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

378) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

25/US/SL/XII/06 tanggal 31 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00372 s/d 00541 Periode II.B (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 17 Januari 2007 berdasarkan dokumen LHP No. : 00372 s/d 00541 tanggal 23 s/d 31 Desember 2006

ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani oleh Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi-Saksi DEDI.M, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.B ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 170 ( seratus tujuh puluh ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00372 s/d 00541 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.24);

379) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

27/US/SL/XII/06 tanggal 30 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0012 s/d -- Periode II (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 17 Januari 2007 berdasarkan dokumen LHP No. : 0012 / BBS tanggal 30 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari

Hal. 273 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 ( satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 0012 s/d -- berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS), beserta 9 (sembilan) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil Untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.M dari PT.UNISERAYA.(T.25);

380) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Produksi PT.RIMBA MUTIARA PERMAI berdasarkan RKT No. : Kpts.522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZULKARNAIN,S.Hut.(T.26);

381) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Agustus 2006 No. : 001/RLHP/RMP/VIII/06 dan II tanggal 31 Agustus 2006 No. : 002/RLHP/RMP/VIII/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.27);

382) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 September 2006 No. : 003/RLHP/RMP/IX/06 dan II tanggal 30 September 2006 No. : 004/RLHP/RMP/VIII/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.28);

383) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Oktober 2006 No. : 005/RLHP/RMP/X/06 dan II tanggal 30 Oktober 2006 No. : 006/RLHP/RMP/X/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.29);

Hal. 274 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 384) 5 (lima) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Nopember 2006 No. : 007/RLHP/RMP/XI/06 dan II tanggal 30 Nopember 2006 No. : 008/RLHP/RMP/XI/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.30);
- 385) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Desember 2006 No. : 009/RLHP/RMP/XII/06 dan II tanggal 31 Desember 2006 No. : 010/RLHP/RMP/XII/06, No. : 011/RLHP/RMP/XII/06 dan No. : 012/RLHP/RMP/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.31);
- 386) T31a. 1 (satu) lembar RLHP RKT 2006 a.n. PT. Rimba Mutiara Permai (SK. RKT No; Kpts/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006) yang ditandatangani oleh Direktur PT. RMP Erwin beserta lampirannya. (T.31a) ;
- 387) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama CV.ALAM LESTARI (SK : Kpts.522.2/PK/3274 tanggal 01 September 2006) dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IRIANTO selaku P2LHP.(T.32);
- 388) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHHP-KBK) yang dilegalisir Periode tanggal 01 s/d 15 Nopember 2006 No. : 0001 dan , RLHP-KBK tanggal 16 s/d 30 Nopember 2006 No. : 0002 yang disahkan oleh Sdr.IRIANTO (P2LHP) CV.ALAM LESTARI.(T.33);
- 389) 4 (empat) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHHP-KB) yang dilegalisir Periode tanggal 01 s/d 15 Desember 2006 No. : 0003, RLHP-KBK tanggal 15 Desember 2006 No. : ..., RLHP-KBK Periode tanggal 30 Desember 2006 Hal. 275 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/RLHP/BBS/AL/PLW/XII/2006 dan RLHP-KB Periode tanggal 16 s/d 30 Desember 2006 No. : 000 yang disahkan oleh Sdr.IRIANTO (P2LHP) CV.ALAM LESTARI.(T.34);

390) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan a.n. PT. Madukoro berdasarkan SK: Kpts.522.2/PK/2520 tentang RKT PT. Madukoro tahun 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh P2LHP WALDI BAHRI.(T.35);

391) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 Desember 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Desember 2006 Nomor 0008 dan fotokopi dilegalisir RLHP KB tanggal 15 Desember 2006 Nomor 0007 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.36);

392) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 Nopember 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Nopember 2006 Nomor 0006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KB tanggal 15 Desember 2006 Nomor 5/RLHP/LOG/MK/XI/06 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.37);

393) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 31 Oktober 2006 periode tanggal 16 s.d 31 Desember 2006 Nomor 0003 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.38);

394) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 September 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Oktober 2006 Nomor 0002 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh

Hal. 276 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.39);

395) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 31 Desember 2006 periode II Nomor 10/RLHP/BBS/MK/XII/2006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 15 Desember 2006 Nomor 0002 periode tanggal 1 s.d. 15 Desember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.40);

396) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 September 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 September 2006 Nomor 0001 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 Desember 2006 Nomor 0010 periode tanggal 16 s.d. 30 Desember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.41);

397) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Desember 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Desember 2006 Nomor 0009 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 Nopember 2006 Nomor 0008 periode tanggal 16 s.d. 30 nopember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.42);

398) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Nopember 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Nopember 2006 Nomor 0007 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 28 Oktober 2006 Nomor 0006 periode tanggal 16 s.d. 28 Oktober 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP

Hal. 277 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZULFAHMI A.R.(T.43);

399) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Oktober 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Oktober 2006 Nomor 0005 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 September 2006 Nomor 0004 periode tanggal 16 s.d. 30 September 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.44);

400) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 September 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 September 2006 Nomor 003/RLHP/BBS/MK/IX/2006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 31 Agustus 2006 Nomor 002/RLHP/BBS/MK/VIII/2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.45);

401) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 001/RLHP/BBS/MK/VIII/2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.46);

402) 2 (dua) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (RLHP) PT. Selaras Abadi Utama tahun 2006 yang dibuat oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.47);

403) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 01 s.d. 15 Desember 2006 Nomor: 0005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.48);

404) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Hal. 278 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 01 s.d. 15 Oktober 2006 Nomor: 0001 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.49);

405) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 Oktober 2006 Nomor: 0002 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.50);

406) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 Oktober 2006 Nomor: 0013 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.51);

407) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 September 2006 Nomor: 0011 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.52);

408) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 September 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.53);

409) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 31 Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.54);

410) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.55);

Hal. 279 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 411) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 31 Juli 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.56);
- 412) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Juli 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.57);
- 413) 4 (empat) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 September 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.58);
- 414) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 30 Juni 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.59);
- 415) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Juni 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.60);
- 416) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Mei 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.61);
- 417) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Laporan Hasil Penebangan dengan RKT Nomor : Kpts.522.2/PK/2334 tanggal 3 Juli 2006 atas nama PT. TRIOMAS FDI yang ditandatangani oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.62);
- 418) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan September 2006 Nomor : 0004 tanggal 30 September 2006 atas nama PT.TRIOMAS Hal. 280 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.63);

419) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.64);

420) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor :  
0009 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.65);

421) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.66);

422) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.67);

423) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP). (T.68);

424) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).

Hal. 281 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.69);

425) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP). (T.70);

426) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP). (T.71);

427) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP). (T.72);

428) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP). (T.73);

429) 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI (SK : Kpts.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006) dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.74);

430) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- Juni 2006 Nomor 02/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.75);

Hal. 282 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 431) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 14 Juli 2006 Nomor 03/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.76);
- 432) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- Juli 2006 Nomor 04/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.77);
- 433) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 05/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.78);
- 434) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 31 Agustus 2006 Nomor 06/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.79);
- 435) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal -- September 2006 Nomor 07/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.80);
- 436) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal - September 2006 Nomor 08/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku

Hal. 283 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2LHP.(T.81);

437) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 19 Oktober 2006 Nomor 09/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.82);

438) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 22 Nopember 2006 Nomor 11/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.83);

439) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 8 Desember 2006 Nomor 12/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.84);

440) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 22 Desember 2006 Nomor 13/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.85);

441) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI

periode II tanggal 12 Januari 2007 Nomor 14/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.86);

442) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil

Hal. 284 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 29 juni 2006 Nomor 02/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.87);

443) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal -- juli 2006 Nomor 03/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.88);

444) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- juli 2006 Nomor 04/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.89);

445) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 18 Agustus 2006 Nomor 05/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.90);

446) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 2 September 2006 Nomor 06/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.91);

447) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal - September 2006 Nomor 07/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.92);

Hal. 285 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil

Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal - September 2006 Nomor 08/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.93);

449) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil

Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal - Nopember 2006 Nomor 11/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.94);

450) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil

Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 5 Desember 2006 Nomor 12/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.95);

451) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi KB, KBK, dan BBS PT. Mitra

Taninusa Sejati sesuai Ijin Nomor Kpts/522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.96);

452) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.97);

453) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.98);

454) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.99);

Hal. 286 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

455) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.100);

456) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.101);

457) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.102);

458) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.103);

459) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.104);

460) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.105);

461) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.106);

Hal. 287 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.107);

463) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.108);

464) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.109);

465) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.110);

466) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.111);

467) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.112);

468) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Hal. 288 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.113);

469) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.114);

470) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.115);

471) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.116);

472) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (117);

473) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.118);

474) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.119);

475) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II Hal. 289 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T120);

476) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T121);

477) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T122);

478) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2006 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya.(T123);

479) 4 (empat) lembar Daftar Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama PT. Mitra Taninusa Sejati tahun 2005 yang dibuat oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T124);

480) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR. (125);

481) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T126);

482) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T127);

Hal. 290 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 483) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(128);
- 484) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T129);
- 485) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode khusus bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.130);
- 486) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode khusus periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.131);
- 487) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.132);
- 488) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.133);
- 489) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T134);

Hal. 291 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 490) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T135);
- 491) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T136);
- 492) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T137);
- 493) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T138);
- 494) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T139);
- 495) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T140);
- 496) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T141);
- 497) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2005 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. Hal. 292 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKT No; Kpts.522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya.(T142);

498) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) Nomor : 04/ SSI-01/ SK/VII/ 2006 ,tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE. , yang telah.- (T143);

499) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) Nomor : 04/SSI-01/ SK/VII/ 2006, tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE, yang telah .(T.144);

500) 1( satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 08-08- 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp120.851.500,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 08-08-2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.39.187.834,- ( Tiga puluh sembilan juta seratus depana puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah ).(T145);

501) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat

Hal. 293 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T146);

502) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(T147);

503) 1( Satu) Lembar yang telah Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank

Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.49.690.300,-( Empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah ) .dan Slip setoran yang telah Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.144.898.681,86,- ( Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma 86/100 rupiah)-(T148);

504) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 06/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 05 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T149);

505) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah Nomor : 08/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER Hal. 294 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T150);

506) 1( satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 07 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 143.098.399 ( Seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 07 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.49.670.280,- ( Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua puluh delapan rupiah ).--(T151);

507) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T152);

508) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T153);

509) 1( satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 21 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni

Hal. 295 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 151.822.901,04,-

(Seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu koma 40/100 rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 21 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.51.469.550,- ( Lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah ) (T154);

510) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 10/SSI-01/SK/IX/ 2006,

tanggal 29 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T155);

511) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T156);

512) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri, tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.45.170.500,- ( Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri, tanggal 06 Oktober

Hal. 296 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar

Rp.137.469.119,92,- ( Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan belas koma 92/100 rupiah ).-(T157);

513) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 13/SSI-01/SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T158);

514) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17

Oktober 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T159);

515) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 52.937.670,- ( Lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ).-(T160);

516) 1( Satu ) Lembar yang telah dilagalisir Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening Hal. 297 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.160.166.823,6,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus ddual puluh tiga koma 6/100 rupiah). (T161);

517) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 15/SSI-01/SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T162);

518) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T163);

519) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.33.259.200,-(Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.100.646.381,88,- ( Seratus juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan piluh satu 88/100 rupiah ). (T164);

520) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri ,  
Hal. 298 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah). (T165);

521) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 19/SSI-01/SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T166);

522) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T167);

523) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 18-12- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.108.323.510,- ( Seratus delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 18-12-2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.329.067.840,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah ).-(T168);

Hal. 299 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi

Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T169);

525) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana

Reboisasi (DR) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(T170);

526) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri ,

tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.141.668.820,- ( Seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar US \$ 138.891,00 ( Seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu US Dollar ).--(T172);

527) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 011/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditandatangani oleh M.YAMIN dan P2LHP WINARTO.-(T172);

528) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Hal. 300 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 010/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN -(T173);

529) 1 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 009/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN - (T174);

530) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN-- (T175);

531) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 007/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.(T176);

532) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 006/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (T177);

533) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN. (T178);

534) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Hal. 301 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 004/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (T179);

535) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 003/SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.-- (T180);

536) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 002/SSL/TMG/VIII 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN. (T181);

537) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 001/SSL/TMG/VII/ 2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.-(T182);

538) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm, yang telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.--(T183);

539) 1(satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/I/2005 yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan januari 20051( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon Hal. 302 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20-29 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 16 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN (T184);

540) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 009/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(T185);

541) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 008/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .-- (T186);

542) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 007/ SSL/TMG/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T187);

543) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T188);

544) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T189);

Hal. 303 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO--(T189);

545) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO (T190);

546) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO-(T191);

547) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP  
WINARNO (T192);

548) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 001/ SSL/TMG/VII/ 2006, tanggal 31 Juli 2006  
An. PT.  
SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang  
ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T193);

549) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm, yang  
telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember  
Hal. 304 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.

Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T194);

550) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T195);

551) 1 ( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 009/ SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T196);

552) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T197);

553) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006, tanggal 15 Oktober 2006 An. PT.

SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .-(T198);

554) 1 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September Hal. 305 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.

Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T199);

555) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO--(T200);

556) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T201);

557) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO- (T202);

558) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) RKT tahun 2006. (T203);

559) 11 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) tahun 2006 dengan RKT Nomer : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomer : 01/RLHP/KB/NT/VII/2006 s/d RLHP Hal. 306 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer : 11/RLHP /KB/NT/XII/2006. (T204);

560) 11 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil ( RLHP-KBK ) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) tahun 2006 dengan RKT Nomer : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomer : 01/RLHP/KBK/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomer: 11/RLHP/ KBK/NT/XII/2006.(T205);

561) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) bulan Desember RKT tahun 2006(T206);

562) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) bulan Juli s/d Desember RKT tahun 2006. (T207);

563) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan / Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.MITRA TANINUSA SEJATI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2225, Tanggal 23 Juni 2006. (Penghitungan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006) (U.1);

564) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.TRIOMAS FDI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2334, Tanggal 03 Juli 2006.( Penghitungan periode Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U2);

565) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.RIMBA MUTIARA PERMAI Tahun 2007, sesuai Hal. 307 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2226, Tanggal 23 Juni 2006.

(Penghitungan periode 01 Juli 2006 s/d 05 April 2007). (U3);

566) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.UNISERAYA Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522/PK/2331, Tanggal 03 Juli 2006..( penghitungan periode Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U4);

567) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.MERBAU PELALAWAN Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT IUPHHK-HTNo: KPTS /522.2/PK/2051, Tanggal 13 Juni 2006. SK RKT IUPHHK-HT Tahun 2006( Revisi Target Produksi Nomor :KPTS.522.2/ PK/ 4463 tanggal 30 November 2006( SPT IUPHHK-HT TA 2006 ) (U5);

568) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan SK.RKT- UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Ijin CV.ALAM LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK-HT No.522.2/PK/3274 Tanggal 01 September 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT CV.ALAM LESTARI (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U6);

569) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan

- UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Ijin PT. SELARAS ABADI UTAMA sesuai dengan Keputusan SK.RKT-UPHHK-HT No.522.2/PK/1005 Tanggal 29 Maret 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan

Hal. 308 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-IUPHHK HT PT.SELARAS ABADI UTAMA (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U7);

570) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan – UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Ijin PT. MADUKORO sesuai dengan Keputusan SK RKT- UPHHK-HT No.522.2/PK/2520 Tanggal 10 Juli 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT PT.MADUKORO (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U8);

571) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1251205 tanggal 01 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 159.960.276,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2005 dengan nominal Rp. 159.960.276(U9);

572) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1331205 tanggal 16 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 168.997.231,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2005 dengan nominal Rp. 168.997.231(U10);

573) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1381205 tanggal 19 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 45.063.000,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening  
Hal. 309 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 45.063.000(U11);

574) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1391205 tanggal 19 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 25.234.300,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 25.234.300. (U12);

575) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1431205 tanggal 27 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 116.275.165,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 116.275.165(U13);

576) 1(satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor :060106 tanggal 02 Januari 2006, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan Kodefikasi : 0606D14MTNS0601, jumlah US \$ 114.784,32 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar photo copy Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 07 Pebruari 2006 yang telah dilegalisir.(U14);

577) 1(satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor :060106 tanggal 02 Januari 2006, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan Kodefikasi :

Hal. 310 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

0606D14MTNS0601, jumlah Rp.314.731.200,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Pebruari 2006 yang telah dilegalisir.(U15);

578) Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal ...Januari 2007 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(U16);

579) 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(U17);

580) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO. (U18);

581) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan pengiriman RKT Tahun 2006 PT. Seraya Sumber Lestari SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh WINARTO (U19);

582) 1 (satu) lembar Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari nomor ijin : Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006, nomor referensi : 0609A15SRSLXXXX yang ditandatangani oleh WINARTO (U20);

583) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Bina Daya Bintara tahun 2006.(U21);

584) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan

Hal. 311 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2006.(V1);

585) 2 (dua) rangkap rekap penerimaan dari hasil land clearing di areal kerja IUPHHKHT PT. Rimba Mutiara Permai yang ditandatangani Erwin.(V2);

586) 3 (tiga) rangkap rekap penerimaan dari hasil land clearing di areal kerja IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani Erwin.(V3);

587) 2 (dua) rangkap Rekapitulasi penjualan PT. Uniseraya tahun 2006 ditandatangani Dirut SUPENDI.(V4) ;

588) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penjualan PT. Triomas FDI tahun 2006 yang ditandatangani Dirut SUPENDI(V5). ;

589) 4 (empat) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitan Pendapatan Kayu Chips PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2006 yang ditandatangani Jimmy Bonaldi Pangestu berikut lampiran laporan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2006.(V6);

590) 6 (enam) lembar laporan Produksi dan Pengangkutan Kayu PT. NTFP tahun 2006 (V7);

591) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 26 Oktober 1999 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W1);

592) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 3 November 2002 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W2);

593) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 11 November 2005 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W3);

594) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 1 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W4);

Hal. 312 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595) 1 (satu) lembar perhitungan luas penutupan lahan hutan dan non hutan pada areal pemanfaatan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atas nama perusahaan-perusahaan tersebut di atas pada tahun 1999, 2002, 2005 dan 2007.(W5);

596) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W6);

597) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W7);

598) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W8);

599) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI (W9);

600) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Desember 1999 dan 26 Oktober 1999 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W10);

601) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 dan 03 November 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W11);

602) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 11 November 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W12);

Hal. 313 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada  
PT

NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Januari  
2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W13);

604) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 31 Maret 2001 yang  
dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W14);

605) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 04 Maret 2004 yang  
dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W15);

606) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Agustus 2006  
yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W16);

607) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA  
DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Mei 2009 yang  
dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W17);

608) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA  
MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 September  
2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W18);

609) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA  
MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang  
dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W19);

610) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA  
MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005  
yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W20);

611) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA  
MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009

Hal. 314 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W21);

612) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan

Persediaan Kayu CDK Langgam tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh RUKDIMAN PAKPAHAN.(X1);

613) 3 (tiga) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Sorek tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh HAMBALI.(X2);

614) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Penyalai tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh H. SYAMSUL ANWAR.(X3);

615) 2 (dua) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Rekapitulasi Penjualan dan Iuran PSDH/DR PT. Selaras Abadi Utama sektor Kuala Tolam dan Pelalawan Januari - Desember 2006. (X4);

616) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT.TRIOMAS FDI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /012 Tanggal 29 Januari 2003 luas 9.625 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y1);

617) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /009 Tanggal 27 Januari 2003 luas 7.300 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006. (Y2);

618) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

Hal. 315 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 Pemegang ijin PT. MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /009 Tanggal 27 Januari 2003 luas 7.300 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2005.(Y3);

619) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/XII/2002 /004 Tanggal 17 Desember 2002 luas 5,590 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y4);

620) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 Tanggal 27 Januari 2003 luas 9.000 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006(Y5);

621) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. ALAM LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/015 Tanggal 30 Januari 2003 luas 3.300 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y6);

622) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. SELARAS ABADI UTAMA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002 luas 13.600 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y7);

Hal. 316 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 623) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT.UNISERAYA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 Tanggal 30 Desember 2002 luas 35.000 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y8);
- 624) 1 ( Satu ) buku Asli Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT.MITRA HUTANI JAYA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/014 Tanggal 29 Januari 2003 luas 10.000 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2005. (Y9);
- 625) Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak a.n  
  
PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Desember 2005, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(Y10);
- 626) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006. (Y11);
- 627) 1 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Heriyanto (Y12);
- 628) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006. (Y13);
- 629) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hal. 317 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An.

PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(Y14);

630) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006. (Y15);

631) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/1005 tanggal 29 Maret 2006.(Z1);

632) 1 (satu) buah buku Photo Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu RKT-UPHHK-HT Tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2334 tanggal 3 juli 2006.(Z2);

633) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat Tahun 2006 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Kec. Kerumutan CDK SOREK, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau (SK RKT) Nomor : KPTS.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006 dan SK Revisi Target Produksi Nomor : KPTS.522.2/PK/4463 tanggal 30 Nopember 2006.(Z3);

Hal. 318 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 634) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname (SO) Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/8205 tanggal 5 Maret 2005 dan Tambahan Target RKT Nomor : KPTS.522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005.)(Z4);
- 635) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih RKT UPHHK-HT Tahun 2006 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006.)(Z5);
- 636) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2332 tanggal 3 juli 2006.)(Z6);
- 637) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. RIMBA MANDAU LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006)(Z7);
- 638) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. BALAI KAYANG MANDIRI (SK No. KPTS.522.2/PK/2942 tanggal 7 Agustus 2006)(Z8);
- 639) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (SK No. KPTS.522.2/ Hal. 319 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/2223 tanggal 23 Juni 2006)(Z9);

640) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. BINA DAYA BINTARA (SK No. KPTS.522.2/PK/2224 tanggal 23 Juni 2006) (Z10);

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Menetapkan agar terdakwa **Drs. BURHANUDIN HUSIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- ( *Sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 191/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PBR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan bandingnya, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan surat memori banding tertanggal 21 Nopember 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan satu rangkap kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2012;

Hal. 320 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, adalah tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan surat memori bandingnya atau surat Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya keberatan dan harus dibatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 21/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 24 Oktober 2012 dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam pledoi dan juga dengan alasan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 21/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 24 Oktober 2012 serta surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair sedang Dakwaan Subsidair telah terbukti dengan sah dan

Hal. 321 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana adalah telah tepat dan benar namun mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki dengan alasan sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun dari fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan telah nyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan atau diperankan Terdakwa dalam kejadian perkara/tindak pidana yang di dakwaan adalah dalam hal pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usahan Penataan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas Permohonan Perusahaan-Perusahaan Pemegang Hak atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT);
- Bahwa yang memberikan Hak/Menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, yang ternyata lokasinya termasuk hutan alam, adalah Bupati yang wilayahnya termasuk dilokasi yang disebut dalam izin dimaksud;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengesahan dimaksud adalah melekat pada jabatan (Wewenang) Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengesahan yang dimaksud maupun dalam kejadian perkara ini, adalah tidak ternyata ada memperoleh/atau menikmati hasil atau pemberian atau sesuatu janji dari pihak manapun baik langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengesahan permohonan dimaksud kepada Wakilnya/Stafnya untuk diteliti sebelum ditandatangani, adalah tidak bertentangan/menyalahi kewenangannya sebagai Kepala Dinas;

Hal. 322 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya hutan alam termasuk dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman adalah bukan inisiatif dari Terdakwa, dan oleh karena itu pula, kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan dalam hal pemberian pengesahan dimaksud adalah tidak ternyata menunjukkan perhatian untuk melindungi atau melestarikan hutan alam, pada hal kerusakan hutan alam telah menjadi perhatian public (masyarakat Nasional/ Internasional);

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa perbuatan atau peran Terdakwa dalam kejadian perkara hanya memberikan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman atas permohonan Pengusaha-Pengusaha Pemegang Izin yang dikeluarkan oleh Bupati;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut berinisiatif memasukkan hutan alam sebagai lokasi izn usaha dimaksud;
- Bahwa lokasi hutan alam dalam lokasi izin dimaksud sampai sekarang tidak dibatalkan bahkan sebahagian telah diperbaharui oleh Menteri Kehutanan atas lokasi dan dalam jangka waktu yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh sesuatu apapun, baik berupa janji atau pemberian dan tidak ada menikmati hasil pengesahan yang dilakukannya;

Hal. 323 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini adalah telah patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ternyata adanya alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dalam tahanan, maka masa penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2012 Nomor :

Hal. 324 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PID.SUS/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- Membebaskan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp. 300.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI(AA1);

Hal. 325 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang tunai Rp. 300.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI(AA2);

3) Uang tunai Rp. 200.000.000,- yang disita dari SUPENDI Direktur Direktur PT. BINA DAYA BINTARA dan PT. SERAYA SUMBER LESTARI(AA3);

4) Uang tunai Rp. 200.000.000,- yang disita dari SUNARIYO Direktur

PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(AA4);

5) Uang tunai Rp. 100.000.000,- yang disita dari Ir FICKY ZZ Direktur PT. BINA DAYA BINTARA(AA5);

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti terhadap perkara yang bersangkutan;**

Barang bukti berupa :

- Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.383/VII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintahan Propinsi Riau atas nama Drs Burhanuddin Husin, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. (L.13a);

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur CV. Alam Lestari kepada Bupati Pelalawan Nomor: 008/AL-IUPHHKHT/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Alam Lestari ditandatangani MARGARETA. (A.1);

Hal. 326 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Uniseraya kepada Bupati Pelalawan Nomor: 051/USPKU-VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Uniseraya ditandatangani SUPENDI dengan dilampiri peta. (A.2);
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bupati Pelalawan Nomor: 146/RMP/PKU-VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.(A.3);
- 4) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Triomas FDI kepada Bupati Pelalawan Nomor: 055/TM/PKU-V/2002 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK-HT a.n. PT. Triomas FDI ditandatangani Direktur Utama SUPENDI dilampiri peta.(A.4);
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. MADUKORO yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 07/MDK/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang ditanda tangani Direktur Ir.ANDRI YAMA PUTRA berikut 1 (satu) lembar fotokopi peta lampirannya.(A.5);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat dari Kuasa Direktsi PT. Selaras Abadi Utama kepada Bupati Pelalawan Nomor : 18/SAU-II/2001 tanggal 23 Pebruari 2001 perihal Permohoanan Areal HPH Tanaman Campuran / IUPHHK HT seluas + 20.000 Ha ditandatangani WIJAYA NURSALIM dilampiri peta.(A.6);
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat dari Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Bupati Pelalawan Nomor: 06/MTS/V/2001 tanggal 01 Mei 2001 perihal Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman ditandatangani Direktur Utama S. ERWIN.(A.7);

Hal. 327 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar surat Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 01/MPL/IV/2001 tanggal 30 April 2001 perihal permohonan hak pengusahaan hutan tanaman campuran di Pelalawan yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Direktur berikut lampiran 1 peta. (A.8);
- 9) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat dari PT.MITRA HUTANI JAYA yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan Nomor : 01/MHJ-1/IX/2001 tanggal 14 September 2001 perihal Permohonan Pencadangan Areal UntukPembangunan HTI Pulp yang ditanda tangani Direktur DIDI HARSA. (A.9);
- 10) Tulisan tangan “Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera ” tertanggal 19 Agustus 2002 dan “Kasi RKPH pelajari & Proses” tertanggal 19 Agustus 2002 pada Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman. (A.10);
- 11) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(A.11);
- 12) 1 (satu) lembar tulisan dari Bupati Siak tanggal 4 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kadishut/Bapedalda dan 1 (satu) lembar surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Siak perihal permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, berikut lampiran peta

Hal. 328 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST  
PRODUCT.-(A.12);

13) Surat PT Balai Kayang Mandiri Nomor : 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK HT PT Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.950 Ha yang berada di Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Direktur PT Balai Kayang Mandri Syafrawi (A.13);

14) Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Siak Kecil) Kec. Siak dan Sei Mandau Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 15.700 Ha (A.14);

15) Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.500 Ha.(A.15);

16) Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.750 Ha. (A.16);

17) Surat dari PT.Bina Daya Bintara Nomor : 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri di Areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha An. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Ir.H.FICKY Z.Z selaku Direktur Utama ((A.17);

18) Peta permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Bina Daya Bintara Kecamatan Sam Sam Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 8.000 Ha.(A.18);

19) Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor:

002/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Bupati Siak Sri Indrapura perihal Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hal. 329 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari dan Peta Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000.(A.19);

20) Surat Wakil Bupati Siak Nomor: 522.1/EK/1341 Tanggal 14 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR. (A.20);

21) Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.1/CAN/0821.a Tanggal 30 Mei 2002 kepada Bupati Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) seluas  $\pm$  7.500 Ha an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak H. ASRAL RACHMAN, S.H dan peta lampiran surat kadishut kabupaten tentang pertimbangan teknis IUPHHK HT PT. RML. (A.21);

22) Surat Bupati Siak Nomor : 522.1/EK/1328 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR (A.22);

23) 1 (satu) bundel yang berisi surat nomor 012/BDB/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, surat Nomor : 2370/Kwl-2/1999 tanggal 23 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH

PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, Surat Gubernur KDT I Riau Nomor : 525/EK/2007 tanggal 7 Agustus 1999 perihal

Hal. 330 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi HPH eks areal HPH PT. Kosmar Timur Raya An.  
PT.Bina Daya Bintara serta peta lampiran dan Surat dari  
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor :  
1788/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal  
Persetujuan permohonan HPH serta peta lokasi survai dan Amdal.  
(A.24);

24) Surat nomor : 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal  
Permohonan Ijin Usaha Hutan tanaman di areal pencadangan HPH  
PT.Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha An.PT.Bina Daya Bintara  
yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kabupaten Siak  
H.ASRAL RACHMAN, SH serta peta lampirannya. (A.24);

25) 1 (satu) buah buku fotokopi Project Proposal izin Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.MADUKORO  
tanggal 16 Juli 2001 yang ditandatangani Direktur PT.MADUKORO  
Ir.ANDRI YAMA PUTRA.(B.1);

26) 1 (satu) buah buku Project Proposal Pengusahaan Hutan Tanaman  
Campuran PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI Juni 2001 dengan  
stempel direktur utama ABAS YACOB.(B.2);

27) 1 (satu) buah buku fotokopi Usulan Proyek Hak Pengusahaan  
Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) PT.MITRA TANINUSA SEJATI  
Nopemner 2000 yang ditandatangani Direktur SHO ERWIN.(B.3);

28) Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT  
Bina Daya Bintara Mei 2002. (B.4);

29) Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman  
PT. SERAYA SUMBER LESTARI (B.5);

30) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan  
Lapangan yang dimohon IUPHHKHT a.n. PT. Merbau Pelalawan  
Lestari tertanggal Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Tim  
Ir. HARRY PURWANTO.(C.1);

Hal. 331 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) buku laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dalam rangka permohonan IUPHHKHT An PT.MADUKORO, pangkalan Kerinci Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Hambali.(C.2);

32) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Laporan Singkat Peninjauan Lapangan yng dimohon IUPHHKHT a.n. PT. Selaras Abadi Utama tertanggal 5 Juni 2001 yang ditandatangani Ketua Tim Ir. HARRY

PURWANTO dilampiri dengan surat perintah tugas.(C.3);

33) Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.1/CAN/2622 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas H.ASRAL RACHMAN, SH (C.4);

34) Surat perintah tugas No.522.1/CAN/2522 tanggal 6 juni 2002 tentang surat perintah melaksanakan survey mikro lapangan terhadap permohonan ijin IUPHHK HT PT. RML seluas  $\pm$  7500 Ha. (C.5);

35) Buku laporan Hasil survey mikro lapangan dalam rangka pencadangan areal hutan tanaman industri (HTI) dikelompok Sungai Ranggau dan Sungai Sam Sam. PT. BINA DAYA BINTARA. (C.6);

36) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Survey Mikro Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode Juni 2002 yang

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey Mikro IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:50.000.-. (C.7);

Hal. 332 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Nomor : 522.1/PR/IV/2002/608 tanggal 01 Mei 2002 perihal Rekomendasi Pertimbangan Teknis Izin Prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman CV. TUAH NEGERI kepada Bupati Pelalawan yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI.(D.1);
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/IX/2001/517 tanggal 6 September 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman a.n. CV. Alam Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto dengan 1 (satu) lampiran peta.(D.2);
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.3/REK-VIII/2001/682 tanggal 9 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto.(D.3);
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/PR/VIII/2001/505 tanggal 15 Agustus 2001 perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Uniseraya ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.(D.4);
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Bupati Pelalawan Nomor: 522.1/REK/VIII/2001/681 tanggal 8 Agustus 2001 perihal

Hal. 333 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani oleh Ir. Bambang Pudji Suroto berikut lampiran peta.(D.5);

42) 2 (dua) lembar asli surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.1/PR/IX/2001/518 tanggal 7 September 2001 perihal Pertimbangan teknis pencadangan Areal untuk IUPHHK-HT An. PT. MADUKORO yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO berikut 1 (satu) lembar asli peta lampirannya.(D.6);

43) 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/VI/20002/621 tanggal 3 Juni 2002 yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan perihal rekomendasi Pertimbangan Izin prinsip Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman an. PT. Triomas FDI , yang ditanda tangani oleh Ir. H. TENGGU ZUHELMI beserta lampiran peta.(D.7);

44) 2 (dua) lembar foto kopi surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522.3/BP/V/2001/573 tanggal 5 Juli 2001 perihal Pertimbangan teknis Areal yang Dimohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman An. PT. Selaras Abadi Utama yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan BAMBANG PUDJI SUROTO. (D.8);

45) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor 522.1/CAN/0116.a tanggal 27 April 2002 tentang Saran Pertimbangan teknis Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas  $\pm$  22.720 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh H. ASRAL RAHMAN, SH. (D.9);

46) 2 (dua) lembar Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. Hal. 334 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) No: 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 Perihal: Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada Bupati Siak berikut Lampiran peta.(D.10);

- 47) Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHK-HT an. PT Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.950 ha, ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas H. Asral Rachman, SH.(D.11);
- 48) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas  $\pm$  15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau.(D.12);
- 49) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPTasik Besar Serkap) seluas  $\pm$  6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(D.13);
- 50) Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas  $\pm$  6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau.(D.14);
- 51) Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Tanggal 6 Januari 2000 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau perihal Saran/Pertimbangan Teknis Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Ir. DARMINTO SOETONO, M.M. dan Peta Lampiran Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen
- Hal. 335 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Skala  
1:250.000. (D.15);

52) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Pembangunan Usaha Hutan  
Tanaman CV. Mitra Taninusa Sejati.(E.1);

53) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin  
Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Selaras Abadi  
Utama.(E.2);

54) 1 (satu) buah buku Laporan Studi Kelayakan Ijin Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Madukoro.(E.3);

55) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Merbau Pelalawan Lestari.(E.4);

56) 1 (satu) buah buku Studi Kelayakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Uniseraya.(E.5);

57) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Studi Kelayakan Izin Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Triomas FDI.  
(E.6);

58) 1 (satu) buah buku foto kopi Studi Kelayakan Pembangunan Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Rimba Mutiara  
Permai.(E.7);

59) Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor:  
001/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Direktorat Jenderal  
Biro Produksi Kehutanan perihal Tanggapan Peringatan I  
Pengurusan Study Kelayakan an. PT Rimba Mandau Lestari  
ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Rimba Mandau  
Lestari.(E.8);

60) Laporan Studi Kelayakan Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA  
Hal. 336 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 22.000

Ha, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-

(E.9);

- 61) Buku Studi Kelayakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. ASRAL RACHMAN, SH (ditandatangani) tanggal 31 Januari 2003. (E.10);

- 62) 1 (satu) buku Studi Kelayakan IUPHHK – HT PT Balai Kayang Mandiri Kabupaten Siak Propinsi Riau – Persetujuan Prinsip IUPHHK – HT

Bupati Siak No.522.2/EK/1793, tanggal 28 Juni 2002 Luas  $\pm$  21.450 Ha.(E.11);

- 63) 1 (satu) buah Buku Laporan Utama Analisi Dampak Lingkungan Kawasan HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI di Kec. Siak, Kec. Mandau dan Kecamatan Bunga Raya.(E.12);

- 64) 1 (satu) buah buku Study Kelayakan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (E.13);

- 65) 1 (satu) Buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Luas 7.500 Ha Periode November 2002. (E.14);

- 66) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai.(F.1);

- 67) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Mitra

Hal. 337 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Taninusa Sejati.(F.2);

68) 1 (satu) buah buku UKL/UPL IUPHHK HT CV. Alam Lestari.(F.3);

69) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Madukoro.(F.4);

70) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT. Madukoro(F.5);

71) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT.  
Uniseraya.(F.6);

72) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHK HT PT. Uniseraya.(F.7);

73) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Triomas  
FDI.(F.8);

74) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT.  
Uniseraya (F.9);

75) 1 (satu) buah buku Kerangka Acuan Amdal IUPHHKHT PT. Mitra  
Taninusa Sejati.(F.10);

76) 1 (satu) buah buku Analisis Amdal Amdal IUPHHKHT PT. Mitra  
Taninusa Sejati (F.11);

77) 1 (satu) buah buku Laporan Utama Amdal IUPHHK HT PT. Merbau  
Pelalawan Lestari.(F.12);

78) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari.  
(F.13);

79) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT. Merbau Pelalawan Lestari.  
(F.14);

80) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHKHT PT.  
Merbau Pelalawan Lestari.(F.15);

81) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHKHT PT. Triomas FDI.(F.16);

82) 1 (satu) buah buku RPL IUPHHKHT PT Triomas FDI.(F.17);

83) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHKHT PT.  
Triomas FDI.(F.18);

Hal. 338 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Rimba Mutiara Permai.  
(F.19);
- 85) 1 (satu) buah buku Amdal IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama.  
(F.20);
- 86) 1 (satu) buah buku RKL IUPHHK HT PT. Selaras Abadi Utama.(F.21);
- 87) 1 (satu) buah buku Ringkasan Eksekutif Amdal IUPHHK HT PT.  
Selaras Abadi Utama.(F.22);
- 88) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor:  
660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang Persetujuan  
ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA  
SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH.(F.23);
- 89) 1(satu) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani)  
No: 660/Bpdl-S/458 tanggal 27 Desember 2002 Perihal:  
Persetujuan ANDAL,RKL,RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL  
TIMBER AND FOREST PRODUCT ditujukan kepada Pimpinan  
PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (F.24);
- 90) Surat Bupati Siak Nomor : 660/Bpdl-S/462 perihal  
Persetujuan  
  
ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan  
Kayu Hutan Tanaman tanggal 29 Januari 2003, ditandatangani  
oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. (F.25);
- 91) Surat Ka. Bapedalda kab. Siak Nomor : 660/BPDL-S/190 perihal  
Dokumen ANDAL HTI PT Balai Kayang sungai Apit dan Dokumen  
ANDAL PT Balai Kayang Bunga Raya tanggal 24 September 2003,  
ditandatangani oleh Ka. Bapedalda Kab. Siak H. Ridwan  
Kadir, SH. MM.(F.26);

Hal. 339 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

92) Surat Bupati Siak Nomor 660/Bapedalda/32/2003 tanggal 7 Januari 2003 perihal persetujuan Amdal, RKL dan RPL Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH.(F.27);

93) Surat Bupati Siak Nomor: 660/Bpdl-S/186/2003 Tanggal 27 Januari 2003 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, S.H. (F.28);

94) Laporan Utama Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(F.29);

95) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, Desember 2002.-(F.30);

96) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (F.31);

97) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Penguasaan Hutan

Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (F.32);

98) Buku Analisis Dampak Lingkungan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (F.33);

Hal. 340 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 dengan Luas 7.500 Ha.(F.34);
- 100) 2 (dua) lembar asli surat Bupati Pelalawan No : 522.21/DISHUT-PR/10/VII/2001/02 tanggal 12 Juli 2001 kepada Direktur PT.SELARAS ABADI UTAMA perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman, yang ditanda tangani oleh T. AZMUN JAAFAR.(G.1);
- 101) 1 (satu) lembar Asli surat Bupati Pelalawan kepada Direktur CV. Tuah Negeri Nomor : 522.1/DISHUT/2002/6983 tanggal 03 Mei 2002 perihal Persetujuan Pencadangan Lahan Untuk Usaha Hutan Tanaman yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar Asli Peta Lampirannya.(G.2);
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/DISHUT//2001/575 tanggal 10 September 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.3);
- 103) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.21/Dishut-PR/10/VIII/2001/04 tanggal 19 Agustus 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar, SH berikut 1 (satu) lembar lampiran peta.(G.4);
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Uniseraya Nomor: 522.1/DISHUT//2001/501 tanggal 25 Hal. 341 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.5);

105) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.21/DISHUT-PR//2001/08 tanggal 8 September 2001 perihal Persetujuan Prinsip Izin IUPHHK Hutan Tanaman ditandatangani oleh T. Azmun Jaafar berikut lampiran peta.(G.6);

106) 1 (satu) lembar foto copi yang dilegalisir surat Bupati Pelalawan No : 522.1/DISHUT/2002/636 tanggal 6 Juni 2002 kepada Direktur PT. Triomas FDI perihal Persetujuan Pencadangan Lahan untuk Usaha Hutan Tanaman , yang ditanda tangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu ) lembar peta lampiran.(G.7);

107) 1 (satu) lembar Asli Surat Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001 perihal Persetujuan Pencadangan Areal untuk Hutan Tanaman An. PT. MADUKORO yang ditanda tangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 1 (satu) lembar asli peta lampirannya.(G.8);

108) Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Seluas  $\pm$  22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh ARWIN AS. (G.9);

109) 2(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha ditujukan kepada Hal. 342 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT.

NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (G.10);

110) Asil Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Balai Kayang Mandiri seluas  $\pm$  28.500 Ha ditandatangani oleh Arwin AS.(G.11);

111) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas  $\pm$  15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau. (G.12);

112) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas  $\pm$  6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau (G.13);

113) Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Tasik Besar Serkap) seluas  $\pm$  6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(G.14);

114) Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1563 tanggal 6 juni 2002 perihal persetujuan prinsip pencadangan ijin Usaha Hutan Tanaman An. PT. Bina Daya Bintara seluas  $\pm$  8.000 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS. Serta peta lampirannya.(G.15);

115) Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$

Hal. 343 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500 Ha ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. dan Peta Lampiran Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 tentang

Persetujuan Prinsip IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(G.16);

116) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1872 Tanggal 1 Agustus 2000 kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI perihal Rekomendasi Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.-(G.17);

117) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/Menhut-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari seluas  $\pm$  8.890 Ha di Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, Msc.(G.18);

118) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XII/2002/1921 tanggal 17 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT kepada Direktur CV.TUAH NEGERI yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGKU ZUHELMI berikut 1 (satu) lembar Asli Peta Lampirannya.(H.1);

119) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/957 tanggal 25 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT a.n. CV.  
Hal. 344 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alam Lestari ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.2);

120) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1916 tanggal 17 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja IUPHHK-HT ditandatangani oleh

Ir. H.T. Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.3);

121) 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Uniseraya Nomor: 522.1/PR/XI/2002/1896 tanggal 22 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT a.n. PT. Uniseraya ditandatangani oleh Ir. Tengku Zuhelmi berikut lampiran peta.(H.4);

122) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2015 tanggal 26 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi berikut lampiran tembusan Surat Permohonan Tata Batas Areal Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman a.n. PT. Rimba Mutiara Permai ke Kepala Badan Planologi Kehutanan dan peta.(H.5);

123) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan kepada Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2016 tanggal 23 Desember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(H.6);

124) 2 (dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Hal. 345 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan Nomor : 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 Nopember 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT An. PT.MADUKORO kepada Direktur PT.MADUKORO yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H. TENGKU

ZUHELMI berikut 1 (satu) lembar fotokopi Peta Lampirannya.(H.7);

125) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada CV. Alam Lestari Nomor: 522.1/PR/XII/2002/977 tanggal 2

Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.1);

126) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Uniseraya Nomor: 522.1/PR/XII/2002/1995 tanggal 24 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. Tengku Zuhelmi.(I.2);

127) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir SPP IUPHHKHT No : 522.1/PR/I/2003/005 tanggal 26 Januari 2003 kepada PT. Triomas FDI yang ditanda tangani oleh Ir. H. TENGKU ZUHELMI.(I.3);

128) 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2004 dari CV Alam Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 8.580.000-(I.4);

129) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 10 Maret 2005 dari PT. Uniseraya kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal

Hal. 346 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 91.000.000- (sembilan puluh satu juta rupiah).(I.5);

130) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir aplikasi kirim uang dari Bank BNI dengan pengirim PT. Triomas FDI kepada Bendaharawan Umum Negara Rekening Iuran HPH & IHH sebesar Bank Indonesia Thamrin No Rekening 508.000.014 Rp 25.030.000,- tanggal 26 Mei 2003.(I.6);

131) 1 (satu) lembar fotokopi surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-HT) Nomor : 522.1/PR/XII/2002/851 tanggal 3 Desember 2002 perintah kepada PT. Madukoro untuk membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang ditanda tangani Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Ir. H.TENGGU ZUHELMI (I.7);

132) 1 (satu) lembar Foto kopi formulir setoran dari Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUUPHH pada Bank Mandiri No Rekening 10200042030870 sebesar Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah).(I.8);

133) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor: 522.1/PK/XI/2002/1917 tanggal 17 Nopember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.9);

134) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Slip Setoran Bank Mega tanggal 29 Nopember 2002 dari PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Bendaharawan Umum Rekening Iuran HPH & IHH dengan rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 14.539.000- (empat belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).(I.10);

135) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Hal. 347 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT) kepada PT. Rimba Mutiara Permai Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.11);

136) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Pebruari 2003 dari PT. Rimba Mutiara Permai kepada Bendaharawan Umum Negara di rekening Bank Indonesia Thamrin Jakarta nomor 508.000.014 dengan nominal Rp. 23.400.000- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan lampiran fotokopi surat pengantar dari Direktur PT. Rimba Mutiara Permai ditandatangani Ir. Amril Abuzar (I.12);

137) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP IUPHHK-HT)

kepada PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor: 522.1/PR/XII/2002/2039 tanggal 31 Desember 2002 ditandatangani oleh Ir. H. Tengku Zuhelmi.(I.13);

138) 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT) No: 522.1/CAN/2614 tanggal 27 Maret 2003 ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak Ir. AMIN BUDYADI, MM. (I.14);

139) Asil Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/CAN/2613, ditandatangani oleh Ir. Amin Budyadi, MM mewakili Kadishut Kab. Siak.(I.15);

140) Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/3005 tanggal 30 Januari 2003 tentang Surat Perintah Hal. 348 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) yang ditandatangani oleh Ir.AMIN BUDYADI, MM.(I.16);

141) Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor: 522.1/CAN/5014 Tanggal 29 Maret 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak kepada PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, M.M. Selaku Perwakilan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.(I.17);

142) 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT) No: 522.1/CAN/4914 tanggal 29 Maret 2003 ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Sub Dinas Perencanaan Hutan Kab. Siak Ir. SYAHARUDDIN.(I.18);

143) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No :

522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT. SELARAS ABADI UTAMA seluas  $\pm$  13.600 Ha (Bruto) ,  $\pm$  11.690 Ha (Netto) di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya. (J.1);

144) 6 (enam) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2003/015 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada CV. ALAM LESTARI seluas  $\pm$  3.300 (tiga ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar.(J.2);

145) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT Hal. 349 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas  $\pm$  5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan dan peta.(J.3);

146) 6 (enam) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. UNISERAYA seluas  $\pm$  35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Desember 2002 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 9 (sembilan) lembar Lampiran Keputusan dan peta.(J.4);

147) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. RIMBA MUTIARA PERMAI seluas  $\pm$  9.000 (sembilan ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan berikut lampiran peta.(J.5);

148) 8 (delapan) lembar fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan

Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. TRIOMAS FDI seluas  $\pm$  9.625 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 10 (sepuluh) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/012 tanggal 29 Januari 2003 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman CV. HARAPAN JAYA dan peta lampiran.(J.6);

149) 17 (tujuh belas) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan No :  
Hal. 350 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT pada PT.MITRA HUTANI JAYA seluas  $\pm$  10.000 Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh T. AZMUN JAAFAR berikut lampirannya tanpa peta.(J.7);

150) 8 (delapan) lembar fotokopi surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT.MADUKORO seluas  $\pm$  15.000 (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani Bupati Pelalawan T.AZMUN JAAFAR berikut 10 (sepuluh) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/ I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 Ketentuan mengenai Pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.MADUKORO.(J.8);

151) 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. MITRA TANINUSA SEJATI seluas  $\pm$  7.300 (tujuh ribu tiga ratus) hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 27 Januari 2003 ditandatangani T. Azmun Jaafar berikut 10 (sepuluh) lembar Lampiran Keputusan.(J.9);

152) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  16.875 (enam belas delapan ratus tujuh puluh lima) Ha di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI beserta Peta Lokasi dan Lampiran Keputusan tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ARWIN AS, SH.-

Hal. 351 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(J.10);

153) 1 ( satu ) Lembar Peta Tata Ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman ( IUPHHKHT ) Tahun ( tidak ada ) An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 16.875 Ha.(J.11);

154) SK Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  21.450 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh) Ha Di Kabupaten Siak An. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Bupati Siak Arwin AS, SH.(J.12);

155) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 Ketentuan Mengenai Pelaksanaan IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri ditandatangani Bupati Siak Arwin AS, SH. (J.13);

156) Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP Tasik Besar Serkap) Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prop. Riau Luas  $\pm$  6.500 Ha. (J.14);

157) Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP T Minas) Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Prop. Riau Luas  $\pm$  8.200 Ha. (J.15);

158) Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  8.000 Ha di Kabupaten Siak An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani

Hal. 352 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH serta peta lampirannya. (J.16);

159) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Ketentuan mengenai pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT.Bina Daya Bintara.(J.17);

160) Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  6.400 (enam ribu empat ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(J.18);

161) Peta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Skala 1:50.000. (J.19);

162) Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (J.20);

163) 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ARWIN AS, SH (Bupati Siak) berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak dan Lampiran Peta Nomor: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002. (J.21);

164) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Buah Hal. 353 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 103, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 7 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Tuah Negeri.(K.1);

165) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Mutiara Lestari tanggal 29 Oktober 2001 nomor 154, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 93 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Mutiara Lestari.(K.2);

166) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Putri Lindung Bulan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor 126, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 8 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Putri Lindung Bulan.(K.3);

167) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Madukoro tanggal 12 April 2000 nomor 12, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 96 tentang perubahan anggaran dasar PT. Madukoro, 1 (satu) buah akta notaris perjanjian kerja sama perusahaan hutan tanaman industri nomor 78 tanggal 18 Mei 2005.(K.4);

168) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Bhakti Praja Mulia tanggal 1 Nopember 2001 nomor 1, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris Nomor 46 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero serta perubahan anggaran dasar CV Bhakti Praja Mulia.(K.5);

169) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Harapan Jaya tanggal 8 Maret 1999 nomor 4, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 67 tentang perjanjian kerja sama perusahaan hutan tanaman industri.(K.6);

Hal. 354 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 25 Oktober 1976 Nomor Y.A.5/503/7 tentang pendaftaran perusahaan PT. Uni

Seraya dilampiri akta pendirian perusahaan nomor 23.(K.7);

171) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20815 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Triomas FDI dilampiri akta nomor 07 tanggal 05 Desember 2001 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Triomas FDI.(K.8);

172) 1 (satu) buah Kutipan Daftar Keputusan Menkeh Tanggal 9 Nopember 2001 Nomor C-20745 HT.01.04 th 2001 tentang pendaftaran perusahaan PT. Mitra Taninusa Sejati dilampiri akta nomor 25 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pendirian PT. Mitra Taninusa Sejati, dan 1 rangkap Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Taninusa Sejati dengan PT. Sentosatama Indah Abadi dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman tanggal 01 April 2004.(K.9);

173) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian CV Alam Lestari tanggal 28 Juni 2001 nomor 88, 1 (satu) buah fotokopi Akta Notaris nomor 59 tentang pemasukan dan pengeluaran sekutu serta perubahan anggaran dasar CV Alam Lestari.(K.11);

174) 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Akta Notaris pendirian PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 5 April 2001 nomor 4.(K.12);

175) 4 (empat) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Uniseraya dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditandatangani Supendi dan Rosman.(K.13);

Hal. 355 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 176) 4 (empat) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Triomas dengan PT. Cahayamas Lestari Jaya dalam Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan Tanaman ditandatangani Supendi dan Rosman.(K.14);
- 177) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Tuah Negeri dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.15);
- 178) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Puteri Lindung Bulan dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.16);
- 179) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama CV Mutiara Lestari dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.17);
- 180) 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama Koperasi Pangkalan Tuo Sakti dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.18);
- 181) 1 eksemplar foto kopi salinan akta Pendirian PT. Selaras Abadi Utama.(K.19);
- 182) 3 lembar fotokopi dilegalisir Kesepakatan Bersama antara PT. Selaras Abadi Utama dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper.(K.20);
- 183) 1 rangkap foto kopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT. Merbau Pelalawan Lestari tanggal 05 April 2001.(K.21)
- 184) 1 rangkap fotokopi dilegalisir Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tanggal 6 April 2005 nomor 30 antara PT. Merbau Pelalawan Lestari dan PT. Dunia Karya Sejati.(K.22);
- 185) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 44 tanggal 21 Desember 2001 yang ditandatangani oleh HANANI, SH Notaris di Pekanbaru.-(K.23);  
Hal. 356 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186) Akta Risalah Rapat No.76 PT Bina daya Bintara yang di buat oleh

Notaris Darbi SH tanggal 23 November 2001. (K.24);

187) Akta pernyataan keputusan rapat PT Bina Daya Bintara Nomor 03

tanggal 25 Oktober 2004 yang di buat oleh notaris Iswanu

Mahendradi, SH di Pekanbaru. (K.25);

188) Akta salinan legalisasi pernyataan Keputusan Rapat PT Bina Daya

Bintara Nomor: 03 tanggal 13 Desember 2006 yang di buat oleh

Notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (K.26);

189) Akta pendirian PT RML Nomor 4 tanggal 10 Agustus 1999 di buat

di

Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH. (K.27);

190) Berita Acara Rapat PT. RML Nomor 241 tanggal 26 Mei 2006

yang dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu tentang

anggaran dasar PT. RML. (K.28);

191) Akta perjanjian kerjasama antara PT. RML dengan PT. Siak Raya

Timber Nomor 28 tanggal 10 Maret 2004 yang di buat di

Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu. (K.29);

192) Surat perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Masyarakat

Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak – propinsi

Riau yang di tandatangani tanggal 28 Februari 2004. (K.30);

193) Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dexter Perkasa dengan PT.

RML yang di tandatangani tanggal 12 Maret 2004. (K.31);

194) 1 lembar fotokopi dilegalisir dilampiri peta Surat Nomor 522/EK/

248 tanggal 6 Pebruari 2001 dari Gubernur Riau kepada Direksi

PT. Selaras Abadi Utama.(L.1);

195) 1 eksemplar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP a.n. PT. Selaras Abadi

Utama.(L.2);

Hal. 357 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196) 2 lembar fotokopi dilegalisir Kartu NPWP PT. Merbau Pelalawan

Lestari dilampiri Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.(L.3);

197) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Rimba Mutiara Permai

kepada Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan Nomor 092/RMP/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003

dengan lampiran 1 berkas perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan RKUPHHK pada hutan tanaman an PT Rimba Mutiara

Permai.(L.4);

198) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada

Menteri Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan Nomor 049/MTS/PKU/VII/03 tanggal 15 Juli 2003

dengan lam-piran 1 berkas perihal Permohonan Penilaian

dan Pengesahan

RKUPHHK pada hutan tanaman an PT Mitra Taninusa Sejati.(L.5);

199) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur

PT. Mitra Hutani Jaya Nomor 522.21/Dishut/IV/2002/1063 tanggal 3

April 2002 perihal persetujuan dispensasi pembukaan lahan dan

ijin percobaan penanaman PT. Mitra Hutani Jaya unti serapung.

(L.6);

200) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau kepada

Bupati kepada Bupati Pelalawan Nomor 522.2/PK/5618 tanggal 29

Juni 2002 perihal penerbitan IUPHHKHT dan IPK an PT. Merbau

Pelalawan Lestari.(L.7);

201) 2 (dua) lembar fotokopi surat Menteri Kehutanan M. Prakosa

kepada Bupati Pelalawan Nomor 26/Menhut-VI/2003 tanggal 3

Pebruari 2003 perihal penerbitan IUPHHK HT an PT. Merbau

Pelalawan Lestari di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.(L.8);

Hal. 358 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522.21/Dishut/III/2003/275 tanggal 25 Maret 2003 perihal penerbitan IPP dan IPK PT Merbau Pelalawan Lestari. (L.9);

203) 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Pelalawan kepada Direktur PT. Merbau Pelalawan Lestari Nomor 522.21/Dishut/VIII/2002/37 tanggal 14 Agustus 2002 perihal Penerbitan IUPHHK HT dan IPK. (L.10);

204) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur PT. Mitra Taninusa Sejati kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 03A/MTS/VII/2000 perihal Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran an. PT. Mitra Taninusa Sejati. (L.11);

205) 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan kepada Direktur Utama PT. Mitra Taninusa Sejati Nomor 322/VI-PHT/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Permohonan Areal HPH Tanaman an PT. Mitra Taninusa Sejati di Propinsi Riau. (L.12);

206) 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Riau kepada Menteri Kehutanan Nomor 522/EK/2529 tanggal 23 September 2000 dengan 1 lampiran peta perihal Rekomendasi Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Campuran (HPHTC) an PT. Mitra Taninusa Sejati. (L.13);

207) Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 02/SSL-Dir/IX/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Permohonan Tata Batas, ditandatangani oleh Ir. DELTA. (L.14);

208) Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang

Hal. 359 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002).(L.15);

209) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor: 094/MTS/PKU/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penambahan Areal blok RKT Th 2005 An, PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh S. ERWIN.(M.1);

210) 1 (satu) lembar Asli Surat PT.Selaras Abadi Utama Nomor: 109/SAU/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 perihal Pengajuan Usulan RKT-UPHHK HT Tahun 2006 PT.SELARAS ABADI UTAMA yang ditandatangani Ir. HUSNI DJALANIDI.(M.2);

211) 1 (satu) lembar surat dari Direktur CV. ALAM LESTARI Nomor : 085/AL/XI/2005 tanggal 2 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pengajuan usulan RKT-UPHHK HT tahun 2006 CV. ALAM LESTARI yang ditandatangani oleh SAID EDDY, SH.(M.3);

212) Asli satu lembar surat Nomor: 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (URKT-UPHHKHT) Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Dikrektor.(M.4);

213) Asli dua lembar surat Nomor: 120/MPL-PKU/UM/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006, dari PT. Merbau Pelalawan Lestari yang ditujukan Hal. 360 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Revisi Target Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman (URKT-UPHHKHT) Tahun 2006 a.n. PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO selaku Dikrektor, dan lampiran berupa Peta Kemajuan Tebangan yang ditandatangani oleh Ir. GUNO WIDAGDO.(M.5);

214) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. UNISERAYA Nomor : 085/US/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal permohonan pengesahan RKT tahun 2006 kegiatan IUPHHK-HT An. PT. UNISERAYA, yang ditandatangani oleh SUPENDI.(M.6);

215) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT. RIMBA MUTIARA PERMAI Nomor : 135/RMP/PKU/II/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal permohonan penilaian dan pengesahan usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditandatangani oleh S. ERWIN.(M.7);

216) 1 (satu) lembar surat dari Direktur PT Mitra Taninusa Sejati Nomor : 152/MTS/PKU/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHKHT Th 2006 An, PT Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani oleh

S. ERWIN, beserta lampirannya 1 (satu) buah buku RKT UPHHKHT Th 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati.(M.8);

217) Asli satu lembar surat Nomor: 167/TM/PKU-X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, dari PT. Triomas FDI yang ditujukan kepada Kepala Hal. 361 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pengesahan RKT UPHHK-HT Tahun 2006 Kegiatan IUPHHK-HT a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh SUPENDI selaku Presiden Direktur.(M.9);

218) 1 (satu) lembar Foto kopi yang dilegalisir Surat PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : 157/MHJ/IX/2005 tanggal 15 September 2005 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) Tahun 2006 An. PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Direktur AGUS WAHYUDI.(M.10);

219) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Mitra Hutani Jaya Nomor : 050/MHJ/IX/2006 tanggal 6 September 2006 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) Tambahan Target Tahun 2006 An. PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Direktur AGUS WAHYUDI berikut 1 (satu) lembar peta situasi Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya(M.11);

220) 1 (satu)Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :058/SSL-DIR/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau . (M.12);

221) 1 (satu)Lembar surat dari Ir H FICKY ZZ Selaku Direktur Utama PT. BINA DAYA BINTARA Nomor :052/BDB/X/2005 Tanggal 25 Oktober

2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan  
Hal. 362 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanaman Tahun 2006 An.PT. BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.(M.13);

222) 1 (satu) Lembar surat dari Ir PRAPTO Selaku Direktur Utama PT.RIMBA MANADU LESTARI Nomor :018/RML-PKU/UM/X/2005 Tanggal 20 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (M.14);

223) 1 (satu) Lembar surat dari HERIYANTO selaku Direktur Utama PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 203/NT/HTI-C/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.15);

224) 1 (satu) Lembar surat dari Ir. ZULFAN HALIM selaku Direktur Utama PT. BALAI KAYANG MANDIRI Nomor : 075/BKM/XI/2005 tanggal 1 November 2005 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. BALAI KAYANG MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau.(M.16);

225) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan terhadap usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT. SELARAS ABADI UTAMA Lokasi Usulan RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan tanggal Pebruari 2006 dengan ketua TIM Pemeriksa SURAKHMAT, SH.(N.1);

Hal. 363 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 226) 1 (satu) buah buku Laporan hasil pemeriksaan terhadap usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI Kabupaten Pelalawan.(N.2);
- 227) Foto kopi yang dilegalisir satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Revisi Target RKT-UPHHKHT Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, Lokasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Surakhmat, SH. selaku Ketua Tim Pemeriksa.(N.3);
- 228) Foto kopi yang dilegalisir satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT IUPHHK-HT Tahun 2006 PT. Merbau Pelalawan Lestari, Lokasi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Januari 2006, yang ditandatangani oleh Surakhmat, SH. selaku Ketua Tim Pemeriksa. (N.4);
- 229) 1 (satu) buah buku Foto kopi yang dilegalisir laporan hasil pemeriksaan calon lokasi RKT UPHHK-HT tahun 2006 PT. UNISERAYA lokasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. (N.5);
- 230) Asli satu eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT. Triomas FDI, Lokasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, tanpa tanggal dan berbulan Februari 2006, yang ditandatangani oleh Salim selaku Ketua Tim Pemeriksa.(N.6);
- 231) 1 (satu) buah buku Asli laporan Hasil Pemeriksaan calon lokasi URKT-UPHHKHT Tahun 2006 PT.MITRA HUTANI JAYA tanggal, Januari 2006 dengan ketua TIM Pemeriksa SURAKHMAT, SH.(N.7);
- 232) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan RKT UPHHKHT Th 2006 a.n. PT. Madukoro Kab. Pelalawan.(N.8);  
Hal. 364 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

233) 1 (satu) buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT  
UPHHKHT Th 2006 PT Mitra Taninusa Sejati Lokasi Kec.  
Kerumutan

Kab. Pelalawan, dilampira Peta Hasil Pemeriksaan RKT.(N.9);

234) Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja  
Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. SERAYA  
SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal  
Desember 2005, ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA.(N.10);

235) 1 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Terhadap Usulan  
Rencana Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman tahun 2006  
An. PT.BINA DAYA BINTARA Siak Sri Indrapura , Desember 2005.  
(N.11);

236) 1( satu )Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana  
Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan  
Tanaman tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST  
PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Januari 2006 (N.12);

237) 1( Satu ) Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Tambahan Rencana  
Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.  
NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura,  
Agustrus 2006 (N.13);

238) 1 (satu ) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap  
Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan  
Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.RIMBA  
MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(N.14);

239) 1 (satu) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulan  
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.BALAI KAYANG

Hal. 365 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(N.15);

240) 6 (enam) lembar copy surat dari Kadishut Kab. Pelalawan Nomor:

522.22/PI/III/2006/7403 tanggal 2 Maret 2006 kepada Kadishut

Prop. Riau perihal Pertimbangan Teknis URKT-IUPHHKHT Th. 2006

An. PT Madukoro, yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI.(O.1);

241) 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten

Pelalawan Nomor : 522.22/PI/II/2006/7202 tanggal 9 Pebruari 2006

yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI, yang ditanda tangani oleh Drs.

EDI SURIANDI.(O.2);

242) Foto kopi yang dilegalisir enam lembar surat Nomor:

522.22/PI/II/2006/7502 tanggal 10 Februari 2006 dari Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis RKT

UPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Merbau

Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI.

(O.3);

243) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/8702 tanggal 14

Pebruari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan

Tanaman tahun 2006 An. PT. UNISERAYA, yang ditanda tangani

oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.4);

244) 6 (enam) lembar surat serta peta dari Kepala Dinas Kehutanan

Kabupatren Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/6702 tanggal 7

Pebruari 2006 berikut peta situasi pertimbangan teknis usulan

Hal. 366 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.5);

245) Foto kopi yang dilegalisir 6 (enam) lembar surat dari Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor:  
522.22/PI/III/2006/6903

tanggal 1 Maret 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan teknis RKT

IUPHHKHT tahun 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati , yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SURIANDI, beserta lampirannya dan Peta Pertimbangan Teknis Usulan RKT.(O.6);

246) Asli enam lembar surat Nomor: 522.22/PI/III/2006/7003 tanggal 1

Maret 2006 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI, dan satu lembar Peta Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Drs. EDI SURIANDI.(O.7);

247) 7 (tujuh) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/2703 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI berikut 2 (dua) lembar Peta Lampirannya.(O.8);

248) 8 (delapan) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Hal. 367 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelalawan Nomor: 522.22/PI/X/2006/7717 tanggal 20 Oktober 2006 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 (Tambahan Target) An. PT.Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI berikut 2 (dua) lembar Peta Lampirannya.(O.9);

249) 6 (enam) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.22/PI/II/2006/0002 tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Pertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An. PT.Selaras Abadi Utama yang ditandatangani Drs. EDI SURIANDI dan 1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis

Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2006 PT.Selaras Abadi Utama.(O.10);

250) surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(O.11);

251) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/4860 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. BINA DAYA BINTARA, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(O.12);

252) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5091 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. BALAI KAYANG MANDIRI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.13);

Hal. 368 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

253) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala

Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/4804 tanggal 6 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. RIMBA MANDAU LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.14);

254) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala

Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/258 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM(O.15);

255) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan

Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 18/PK/HA/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan

Tanaman Tahun 2006 An.PT. SELARAS ABADI UTAMA ditandatangani PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.1);

256) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 44/PK/HA/VIII/2006 tanggal 20

Juli 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 An. CV. ALAM LESTARI, yang ditanda tangani oleh PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.2);

257) Asli dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan

Hutan Alam Nomor: 36/PK/HA/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Hal. 369 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM.(P.3);

258) Asli tiga lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 53/PK/HA/XI/2006 tanggal 28 November 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM.(P.4);

259) 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor : 25/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 PT. UNISERAYA, yang ditanda tangani oleh PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM.(P.5);

260) 2 (dua) lembar Foto kopi yang dilegalisir Nota Dinas Nomor: 24/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal penyiapan lahan pembangunan Hutan Tanaman Industri pada RKT - UPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yang ditanda tangani oleh PURNAMA IRWANSYAH.(P.6);

261) Foto kopi yang dilegalisir 2 (dua) lembar Nota Dinas No.29/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juli 2006 dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam yang ditujukan kepada Kepala Seksi  
Hal. 370 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengembangan Hutan Tanaman perihal pemanfaatan hasil hutan kayu di areal penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKTUPHHK Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditanda tangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut, MM.(P.7);

262) Foto kopi yang dilegalisir dua lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Nomor: 33/PK/HA/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman, perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Areal Penyiapan Lahan Pembangunan HTI Pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n, PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Purnama Irawansyah, S.Hut., MM(P.8);

263) 2 (dua) lembar Asli Nota Dinas Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. : 54/PK/HA/XI/2006 tanggal 28 November 2006 perihal Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di areal Penyiapan lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2007 PT. Mitra Hutani Jaya yang ditandatangani Ir.MAMUN MUROD, MM(P.9);

264) 2 (Dua ) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan

Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 31/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (P.10);

265) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 27/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.BINA DAYA BINTARA.(P.11);

Hal. 371 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

266) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan

Hutan Alam Tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 41/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.RIMBA MANDAU LESTARI.(P.12);

267) 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan

Hutan Alam Tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 43/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.BALAI KAYANG MANDIRI. (P.13);

268) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau

Nomor : KPTS/522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005 tentang pengesahan Tambahan Target Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemnfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT Mitra Taninusa Sejati di areal seluas 2.250 ha (bruto) atau 2.015 ha (net.to), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM. , beserta lampirannya.(Q.10);

269) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/1005 Tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT.Selaras Abadi Utama seluas 4.032 Ha (Bruto) atau seluas 1.437 Ha (Netto) berikut 1 (satu) lembar Asli Lampiran Keputusannya yang ditandatangani Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.2);

270) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau

berikut lampirannya Nomor : KPTS/522.2/PK/3274 tanggal 01 Hal. 372 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di kabupaten Pelalawan An. CV. ALAM LESTARI di areal seluas 635 ha (bruto) atau 600 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.3);

271) Asli enam lembar dan satu lembar lampiran tentang Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nomor: Kpts.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan a.n. Merbau Pelalawan Lestari, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.4);

272) 7 (tujuh) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor: KPTS. 522.2/PK/2331 tanggal 3 Juli 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT. UNISERAYA di areal seluas 7.291 ha (bruto) atau 6.000 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.5);

273) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau berikut lampirannya Nomor: KPTS/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di areal

seluas 5.7771 ha (bruto) atau 4.595 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.6);

274) 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Riau Nomor: KPTS/ 522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 tentang Hal. 373 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kab. Pelalawan An. PT Mitra Taninusa Sejati di areal seluas 3000 ha (bruto) atau 2.750 ha (netto), yang ditanda tangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM. , beserta lampirannya.(Q.7);

275) Asli enam lembar dan satu lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS. 522.2/PK/2334 tanggal 3 Juli 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan6 Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 a.n. PT. Triomas FDI, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.8);

276) 4 (empat) lembar Asli keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1014 Tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan An. PT.Mitra Hutani Jaya di Kabupaten Pelalawan seluas 1.371,61 Ha (Bruto) atau seluas 1.045,00 Ha (Netto) yang ditandatangani Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN. MM berikut 1 (satu) lembar lampirannya.(Q.9);

277) Foto kopi yang dilegalisir 5 (lima) lima lembar dan satu lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS. 522.2/PK/2520 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan a.n. PT. Madukoro, yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM.(Q.10);

278) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hal. 374 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN, MM (Q.11);

279) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2618 Tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT. RIMBA MANDAU LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN ,MM (Q.12);

280) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2942 Tanggal 7 Agustus 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.13);

281) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2224 Tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.BINA DAYA BINTARA, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM;

282) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2223 Tanggal 1 September 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM (Q.14);

283) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Hal. 375 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.(R.1);

284) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi.(R.2);

285) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Rumusan Rapat Hasil Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2006 yang ditandatangani oleh sebagian Tim Verifikasi.(R.3);

286) 3 (tiga) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI luas areal  $\pm$  5.590 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.4);

287) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.RIMBA MUTIARA PERMAI luas areal  $\pm$  9000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.5);

288) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT. MITRA TANINUSA

SEJATI luas areal  $\pm$  7.300 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.6);

289) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.TRIOMAS FDI luas areal  $\pm$  9.625 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.7);

Hal. 376 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil

Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.SATRIA PERKASA AGUNG luas areal  $\pm$  12.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.8);

291) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.TUAH NEGERI, luas areal  $\pm$  1.500 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.9);

292) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MITRA HUTANI JAYA, luas areal  $\pm$  10.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.10);

293) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.MUTIARA LESTARI luas areal  $\pm$  4.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.11);

294) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.HARAPAN JAYA, luas areal  $\pm$  4.800 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.12);

295) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.PUTRI LINDUNG BULAN, luas areal  $\pm$  2.500 Ha yang diterbitkan Gubernur atau

Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.13);

296) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi

Hal. 377 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.ALAM LESTARI

luas areal  $\pm$  3.300 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.14);

297) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. CV.BHAKTI PRAJA MULIA,

luas areal  $\pm$  5.800 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.15);

298) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.MADUKORO, luas areal  $\pm$  15.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.16);

299) 2 (dua) lembar fotokopi telah dilegalisir, Resume Hasil Verifikasi atas HPHTI / IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.UNISERAYA luas areal  $\pm$  35.000 Ha yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota tanpa tanda tangan.(R.17);

300) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.199/VI/BRPHP-1/RHS/2005 tanggal 5 September 2005 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penerbitan Peta Areal Kerja untuk IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.SATRIA PERKASA AGUNG, PT.MITRA HUTANI JAYA, yang diterbitkan oleh daeah dan telah diverifikasi oleh Departemen Kehutanan dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.18);

301) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.34/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 20 Januari 2006, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Hal. 378 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Laporan Hasil Verifikasi perizinan IUPHHK pada Hutan Tanaman atau Hutan Alam yang an. PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT.MITRA TANINUSA SEJATI, PT.RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. TRIOMAS FDI, PT. UNISERAYA yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.19);

302) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.234/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT.TRIOMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.20);

303) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.241/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Sekertaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT an. PT.TROMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi.(R.21);

304) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor: ND.317/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 21 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Persetujuan SP-2 IUPHHK-HT PT Triomas FDI dan PT. Uniseraya di Kab.Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.22);

Hal. 379 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:

ND.295/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 4 September 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT an. PT.TROMAS FDI dan PT.UNISERAYA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.23);

306) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:

ND..23/VI/BRPHP-2/RHS/2007, tanggal 24 Januari 2007 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Proses Verifikasi IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati an. PT. MADUKORO, CV.HARAPAN JAYA, CV. ALAM LESTARI dan CV.BHAKTI PRAJA MULIA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.24);

307) 1 (satu) lembar fotocopi telah dilegalisir, surat dari Direktur Bina rencana Pemanfaatan Bina Produksi Nomor: S.172/VI/BRPHP-2/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan tentang penugasan kepada Sdr. Ir.Usman,MS.c (Kasi Penyiapan Pemanfaatan Hutan Tanaman), Ir.Hasan Mansyur (Kasi Kelola Lingkungan), Yayat Suryatna (Staf Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi) untuk melakukan Monev Perkembangan Izin IUPHHK-Alam/Tanaman dan Non Kayu yang diterbitkan Gubernur/Bupati dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana

Hal. 380 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.25);

308) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:

ND.173/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal

Penyelesaian Laporan Hasil Verifikasi Lapangan IUPHHK-HT yang diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Kab.Indra Giri Hulu dan Kab. Siak Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.26);

309) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:

ND.188/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal -- Mei 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Penyelesaian Laporan Hasil Verifikasi Lapangan IUPHHK-HT yang diterbitkan di Kabupaten Pelalawan, Kab.Indra Giri Hulu dan Kab. Siak Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.27);

310) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Nota Dinas Nomor:

ND.262/VI/BRPHP-2/RHS/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Perihal Laporan Hasil Verifikasi Perizinan IUPHHK pada Hutan Tanaman dan Hutan Alam an. CV.ALAM LESTARI, CV.PUTRI LINDUNG BULAN, CV.MUTIARA LESTARI, CV.TUAH NEGERI, CV.BHAKTI PRAJA MULIA, CV.HARAPAN JAYA, PT. MADUKORO yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan ditandatangani oleh Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc selaku  
Hal. 381 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi. (R.28);

311) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.101/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.MITRA HUTANI JAYA atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  9.240 (sembilan ribu dua ratus empat puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku

Menteri Kehutanan.(R.29);

312) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.102/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.SATRIA PERKASA AGUNG atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  11.830 (sebelas ribu delapan ratus tiga puluh)

Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.30);

313) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.65/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.RIMBA MUTIARA PERMAI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  8.030 (delapan ribu tiga puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan. (R.31);

314) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.66/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hal. 382 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.MITRA TANINUSA SEJATI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  7.480 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.  
(R.32);

315) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.69/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.  
(R.33);

316) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.214/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.UNISERAYA atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh

H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.34);

317) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.215/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman CV. TUAH NEGERI atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) Hektar di Provinsi Riau dan ditandatangani oleh H.M.S.KABAN selaku Menteri Kehutanan.(R.35);

Hal. 383 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. BALAI KAYANG MANDIRI.(R.36);

319) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. RIMBA MANDAU LESTARI.(R.37);

320) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. SERAYA SUMBER LESTARI.(R.38);

321) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(R.39);

322) 1 (satu) exemplar fotocopi telah dilegalisir dalam stopmap warna biru dokumen verifikasi PT. BINA DAYA BINTARA.(R.40);

323) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/6340 Tanggal 12 Desember 2005 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. CV Harapan Jaya Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fachruddin Siregar/NIP 710000628. RKT UPHHK-HT CV Harapan Jaya SK Nomor Kpts/522.2/PK/0210 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2005.(S.1);

324) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/6440 Tanggal 12 Desember 2005

tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n. PT Madukoro Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Maringan Pakpahan/NIP 710018118. RKT UPHHK-HT PT Madukoro SK Nomor Kpts/522.2/PK/0110 CDK Penyalai dengan

Hal. 384 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berakhir tanggal 31 Desember 2005.(S.2);

325) Dua lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/IX/2006/2216 tanggal 18 September 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.(S.3);

326) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3020 Tanggal 14 Agustus 2006 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT. Madukoro Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Waldi Bahri/NIP 710016610. RKT UPHHK-HT PT Madukoro SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2520 CDK Langgam dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.4);

327) 2 (dua) lembar foto kopi yang telah dilegalisir surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/1113 tanggal 31 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.5);

328) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2839 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Rimba Mutiara Permai Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten

Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulkarnain/NIP 420016763. RKT UPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai SK Nomor Kpts/522.2/PK/2226 dengan masa berakhir Hal. 385 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2006.(S.6);

329) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/0212 tanggal 12 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.7);

330) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2838 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Mitra Taninusa Sejati Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Zulfahmi/NIP 710020440. RKT UPHHK-HT PT Mitra Taninusa Sejati SK Nomor Kpts/522.2/PK/2225 dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.8);

331) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2837 Tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Triomas FDI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Armizar, SE/NIP 420014408. RKT UPHHK-HT PT Triomas FDI SK Nomor Kpts/522.2/

PK/2334 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.9);

332) 3 (tiga) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/4112 tanggal 17 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan;

Hal. 386 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

333) Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.10)6 (enam)

lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2784 Tanggal 26 Juli 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Uni Seraya Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Djamalis/NIP 420003400. RKT UPHHK-HT PT Uni Seraya SK Nomor Kpts/522.2/ PK/2331 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.11);

334) 3 (tiga) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VII/2006/4112 tanggal 17 Juli 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.12);

335) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/1593 Tanggal 11 Mei 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n. PT Selaras Abadi Utama berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Fachruddin Siregar/NIP 710000628. RKT UPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama SK Nomor Kpts/522.2/PK/1005 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.13);

336) 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/IV/2006/5705 tanggal 7 April 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan berikut lampirannya.(S.14);

337) 6 (enam) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Hal. 387 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/2249 Tanggal 26 Juni 2006 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan P2LHP & Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHK-HT a.n.

PT Merbau Pelalawan Lestari Pelalawan berikut lampirannya. Nama P2LHP yang ditunjuk Tri Rahayu Widodo/NIP 710007420. RKT UPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari SK Nomor Kpts/522.2/PK/2051 CDK Penyalai dengan masa berakhir tanggal 31 Desember 2006.(S.15);

338) 2 (dua) lembar Asli surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.2.4/PI/VI/2006/5110 tanggal 22 Juni 2006 perihal Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berikut lampirannya.(S.16);

339) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 042/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(S.17);

340) Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/058 tanggal 7 Juli 2006 tentang Usulan Petugas P2LHP, ditandatangani oleh H. AMRI RAJA MUDA, SE.(S.18);

341) 1 (satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2783 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan ( P2LHP ) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Lingkut Dinas Kahutanan Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Drs.H. Hal. 388 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN

HUSIN, MM. tanggal 26 Juli 2006. (S.19);

342) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.-(S.20);

343) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/2071 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 3 Juli 2006, ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, MM.-(S.21);

344) Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 040/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI. (S.22);

345) Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/1930 tanggal 11 Juli 2006 tentang Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM beserta Kartu Pengawas Penguji a.n Winarto. (S.23);

346) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya. (S.24);

Hal. 389 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347) 1 ( Satu ) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006

tentang

Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM.(S.25);

348) 1 ( satu ) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas

Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Siak Nomor : 522.2/Prod/133 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) yang ditandatangani oleh H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit. (S.26);

349) 1 ( satu ) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan Nomor : 522.2/Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) ijin No. Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. (S.27);

350) 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Nomor : Kpts.522.2/PK/2835 tanggal 1 Agustus 2006 tetang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 2 (dua) lembar lampirannya.(S.28);

Hal. 390 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351) 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Nomor : Kpts/522.2/PK/2609 tanggal 17 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar lampiran.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

kepada KAHARANI nomor : 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli 2006 Perihal Penunjukan Sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI. (S.29);

352) 1 ( satu ) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2499 tentang Penunjukan /penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan

( P2LHP ) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An.PT. BINA DAYA BINTARA, Lingkut Dinas Kehutanan Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN HUSIN ,MM.tanggal 10 Juli 2006.(S.30);

353) 1 (satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/4667 tentang Penunjukan /penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An.PT. RIMBA MANDAU LESTARI, Lingkut Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Ir Sudirno,MM. tanggal 8 Desember 2006.(S.31);

354) Surat Direktur Utama PT. RIMBA MANDAU LESTARI Nomor: 013A/RML/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Penunjukan / Pengangkatan Petugas Pembuat/Penerbit LHP a.n. PT. RIMBA Hal. 391 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAU LESTARI, ditandatangani oleh Ir. PRAPTO.(S.32);

355) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 01/US/SL/VII/06 tanggal 29 Juli 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00002 s/d 00047 Periode II (Dua) Bulan Juli 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP) di Sei Lakar, 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 5 Agustus 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0002 s/d 00047 tanggal 16 s/d 27 Juli 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA

(DEDI), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Akhir Bulan Juli 2006 Nomor : 02 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI), diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat LHP No. : 002 s/d 0047 beserta 46 (empat puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat

(LHP-KB) Nomor : 0002 s/d 00047 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.M diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.1);

356) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : --/US/SL/VII/06 tanggal 29 Juli 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 0002 s/d 00067 Periode II (Dua) Bulan Juli 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil Akhir Bulan Juli 2006 Nomor : 02 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP Hal. 392 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 5 Agustus 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0002 s/d 00067 tanggal 16 s/d 28 Juli 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 7 (tujuh) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 0002 s/d 00067 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi PT.UNISERAYA (DEDI.M) beserta 66 (enam puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 0002 s/d 00067 berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.M diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.2);

357) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT. UNISERAYA) Nomor :

05/US/SL/VIII/06 tanggal 29 Agustus 2006 perihal Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 004 s/d - Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP

PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 004 s/d - ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1(satu) lembar Laporan Hasil  
Hal. 393 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00004

berdasarkan RKT/BK : Kpts. 522.2/PK/2331 ditandatangani

Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh

Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.3);

358) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

03/US/SL/VIII/06 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0049 s/d 0082

Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS

(Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan

Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor :

04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.

UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP

(DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal

8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0049 s/d 0082

tanggal 18 s/d 29 Agustus 2006 ditandatangani Petugas

Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4

(empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani

Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA

(DEDI.M), beserta 34 (tiga puluh empat) lembar Laporan Hasil

Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB)

Nomor : 00049 s/d 0082 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331

ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan

disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.4);

359) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

04/US/SL/VIII/06 tanggal 30 Agustus 2006 perihal

Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0069 s/d 00120

Periode II (Dua) Bulan Agustus 2006 ditujukan kepada DJAMALIS

Hal. 394 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Agustus 2006 Nomor : 04 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 8 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0069 s/d 00120 tanggal 18 s/d 29 Agustus 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 52 (lima puluh dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm ) Nomor : 00069 s/d 00120 berdasarkan RKT/BK : 522.2/ PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.5);

360) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 10/US/SL/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0006 s/d - Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat

LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 006 s/d - tanggal 18 s/d 28 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT. UNISERAYA (DEDI.M),

Hal. 395 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 1(satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00006 s/d - berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.6);

361) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 06/US/SL/IX/06 tanggal 14 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 0083 s/d 00115 Periode I (satu) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan Bulan September 2006 Nomor : 05 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 23 September 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0083 s/d 00115 tanggal 03 s/d 13 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 0083 s/d 00115 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 000083 s/d 000115 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.7);

362) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 08/US/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00116 s/d 00145 Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada

Hal. 396 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan September 2006 Nomor :

06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00116 s/d 00145 tanggal 16 s/d 27 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT. UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 00116 s/d 00145 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT. UNISERAYA (DEDI.M), beserta 30 (tiga puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00116 s/d 00145 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS). (T.8);

363) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 07/US/SL/IX/06 tanggal 14 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00121 s/d 00167 Periode I (Satu) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan September 2006 Nomor : 05 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 23 September 2006 berdasarkan dokumen

Hal. 397 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHP No. : 00121 s/d 00167 tanggal 03 s/d 13 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat berdasarkan LHP No. : 00121 s/d 00167 ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 47 (empat puluh tujuh) lembar Laporan

Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB Ø (diameter) 20 – 29 Cm) Nomor : 00121 s/d 00167 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.9);

364) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 09/US/SL/IX/06 tanggal 29 September 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00168 s/d 00219 Periode II (Dua) Bulan September 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan September 2006 Nomor : 06 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 6 Oktober 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00168 s/d 00219 tanggal 16 s/d 27 September 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 52 (lima puluh dua ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 – 29 Cm) Nomor : 00168 s/d 00219 berdasarkan

Hal. 398 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.10);

365) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 13/US/SL/X/06 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 008 s/d - Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil

Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 008 / BBS ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 1 (satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00008 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.11);

366) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :-- tanggal 31 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP LOG'S Nomor : 00147 s/d 00199 Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT. UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1

Hal. 399 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00147 s/d 00199 tanggal 16 s/d 30 Oktober 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani

Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 53 (lima puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00147 s/d 00199 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.12);

367)-----1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

--/US/SL/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00221 s/d 00323 Periode II (Dua) Bulan Oktober 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Oktober 2006 Nomor : 08 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00221 s/d 00323 tanggal 30 Oktober 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 11 (sebelas) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 103 (seratus tiga ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm ) Nomor : 00221 s/d 00323 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP Hal. 400 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DJAMALIS).(T.13);

368)-----1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

15/US/SL/XI/06 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00200 s/d 00216  
Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada  
DJAMALIS

(Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan  
Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan Bulan Nopember 2006  
Nomor : 09 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.  
UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP  
(DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal  
25 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00200 s/d  
00216

tanggal 2 s/d 10 Nopember 2006 Petugas Kehutanan (DJAMALIS)  
dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 4 (empat) lembar Daftar  
Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan  
DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 17 (tujuh  
belas) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB)  
Nomor : 00200 s/d 00216 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331  
ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan  
disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.14);

369) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

16/US/SL/XI/06 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Permohonan  
Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor :00324s/d 00354  
Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada  
DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Rekapitulasi  
Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Pertengahan Bulan  
Nopember 2006 Nomor : 09 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331

Hal. 401 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 25 Nopember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00324 s/d 00354 tanggal 2 s/d 11 Nopember 2006 Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 31 (tiga puluh satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00324 s/d 00354 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.15);

370) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 17/US/SL/XI/06 tanggal 15 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0009 s/d -- Periode I (Satu) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 00009 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 5 (lima) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.MULYADI dari PT.UNISERAYA, diketahui dan ditandatangani oleh DJAMALIS.(T.16);

371) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 18/US/SL/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00217s/d 00259 Periode II (Dua) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada

Hal. 402 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00217 s/d 00259 tanggal 16 s/d 28 Nopember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Nopember 2006 Nomor : 10 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 Pembuat LHP PT.

UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 43 (empat puluh tiga) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00217 s/d 00259 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.17);

372) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 19/US/SL/XI/06 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00355 s/d 00410 Periode II (Dua) Bulan Nopember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 2 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00355 s/d 00410 tanggal 16 s/d 28 Nopember 2006

ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Nopember 2006 Nomor : 10 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331

Hal. 403 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), beserta 56 (lima puluh enam) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 – 29 Cm) Nomor : 00355 s/d 00410 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.18);

373) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 21/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00260 s/d 00329 Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 21 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00260 s/d 00329 tanggal 1 s/d 13 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 6 (enam) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 70 (tujuh puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00260 s/d 00329 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.19);

Hal. 404 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

374) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

22/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00411 s/d 00500 Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 21 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00411 s/d 00500 tanggal 1 s/d 13 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 8 (delapan) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 90 (sembilan puluh) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK Ø (diameter) 20 - 29 Cm) Nomor : 00411s/d 00500 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.20);

375) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

23/US/SL/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 330 s/d 371 Periode II.A (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00330 s/d 00371 tanggal 16 s/d 22 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Hal. 405 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.A ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 44 (empat puluh empat) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KB) Nomor : 00330 s/d 00373 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.21);

376) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 24/US/SL/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 perihal Permohonan

Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KBK Nomor : 00501 s/d 00552 Periode II.A (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 28 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 00501 s/d 00552 tanggal 16 s/d 22 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 5 (lima) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani Petugas Kehutanan DJAMALIS dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.A ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 52 (lima puluh dua) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00501 s/d 00552 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.22);

Hal. 406 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

377) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

23/US/SL/XII/06 tanggal 14 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0011 s/d -- Periode I (Satu) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 22 Desember 2006 berdasarkan dokumen LHP No. : 0011 / BBS tanggal 14 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Pertengahan Bulan Desember 2006 Nomor : 11 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 6 (enam) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil Untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.M dari PT.UNISERAYA dan diketahui oleh DJAMALIS, beserta 1 ( satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 0011 s/d -- berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.23);

378) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor :

25/US/SL/XII/06 tanggal 31 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP KB Nomor : 00372 s/d 00541 Periode II.B (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 17 Januari 2007 berdasarkan dokumen LHP No. : 00372 s/d 00541 tanggal 23 s/d 31 Desember 2006

ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani oleh Petugas Kehutanan Hal. 407 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALIS dan Saksi-Saksi DEDI.M, 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12.B ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), beserta 170 ( seratus tujuh puluh ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 00372 s/d 00541 berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS).(T.24);

379) 1 (satu) lembar Surat dari KUSWANDI (PT.UNISERAYA) Nomor : 27/US/SL/XII/06 tanggal 30 Desember 2006 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP BBS Nomor : 0012 s/d -- Periode

II (Dua) Bulan Desember 2006 ditujukan kepada DJAMALIS (Pejabat Pengesahan LHP), 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan LHP tanggal 17 Januari 2007 berdasarkan dokumen LHP No. : 0012 / BBS tanggal 30 Desember 2006 ditandatangani Petugas Kehutanan (DJAMALIS) dan Saksi dari PT.UNISERAYA (DEDI.M), 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Akhir Bulan Desember 2006 Nomor : 12 ditandatangani Pembuat LHP PT.UNISERAYA (DEDI MULYADI) diperiksa dan disahkan oleh P2LHP (DJAMALIS), 1 ( satu ) lembar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-BBS) Nomor : 0012 s/d -- berdasarkan RKT/BK : 522.2/PK/2331 ditandatangani Pembuat LHP oleh DEDI.MULYADI diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (DJAMALIS), beserta 9 (sembilan) lembar Buku Ukur Kayu Bulat Kecil Untuk BBS ditandatangani oleh DEDI.M dari PT.UNISERAYA.(T.25);

380) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Produksi PT.RIMBA MUTIARA

Hal. 408 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERMAI berdasarkan RKT No. : Kpts.522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZULKARNAIN, S.Hut.(T.26);

381) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Agustus 2006 No. : 001/RLHP/RMP/VIII/06 dan II tanggal 31 Agustus 2006 No. : 002/RLHP/RMP/VIII/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.27);

382) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 September 2006 No. : 003/RLHP/RMP/IX/06 dan II tanggal 30 September 2006 No. : 004/RLHP/RMP/VIII/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.28);

383) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Oktober 2006 No. : 005/RLHP/RMP/X/06 dan II tanggal 30 Oktober 2006 No. : 006/RLHP/RMP/X/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.29);

384) 5 (lima) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Nopember 2006 No. : 007/RLHP/RMP/XI/06 dan II tanggal 30 Nopember 2006 No. : 008/RLHP/RMP/XI/06 yang disahkan oleh ZULKARNAIN (P2LHP).(T.30);

385) 6 (enam) lembar Asli Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) , RLHP-KBK dan RLHP-KB Periode I tanggal 15 Desember 2006 No. : 009/RLHP/RMP/XII/06 dan II tanggal 31 Desember 2006 No. : 010/RLHP/RMP/XII/06, No. : 011/RLHP/RMP/

XII/06 dan No. : 012/RLHP/RMP/06 yang disahkan oleh Hal. 409 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ZULKARNAIN (P2LHP).(T.31);

386) T31a. 1 (satu) lembar RLHP RKT 2006 a.n. PT. Rimba Mutiara Permai (SK. RKT No; Kpts/522.2/PK/2226 tanggal 23 Juni 2006) yang ditandatangani oleh Direktur PT. RMP Erwin beserta lampirannya. (T.31a) ;

387) 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama CV.ALAM LESTARI (SK : Kpts.522.2/PK/3274 tanggal 01 September 2006) dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IRIANTO selaku P2LHP.(T.32);

388) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHHP-KBK) yang dilegalisir Periode tanggal 01 s/d 15 Nopember 2006 No. : 0001 dan , RLHP-KBK tanggal 16 s/d 30 Nopember 2006 No. : 0002 yang disahkan oleh Sdr.IRIANTO (P2LHP) CV.ALAM LESTARI.(T.33);

389) 4 (empat) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHHP-KB) yang dilegalisir Periode tanggal 01 s/d 15 Desember 2006 No. : 0003, RLHP-KBK tanggal 15 Desember 2006 No. : ..., RLHP-KBK Periode tanggal 30 Desember 2006 Nomor : 01/RLHP/BBS/AL/PLW/XII/2006 dan RLHP-KB Periode tanggal 16 s/d 30 Desember 2006 No. : 000 yang disahkan oleh Sdr.IRIANTO (P2LHP) CV.ALAM LESTARI.(T.34);

390) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan a.n. PT. Madukoro berdasarkan SK: Kpts.522.2/PK/2520 tentang RKT PT. Madukoro tahun 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh P2LHP WALDI BAHRI.(T.35);

391) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 Desember 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Desember 2006 Nomor 0008 dan fotokopi dilegalisir RLHP KB tanggal 15 Hal. 410 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2006 Nomor 0007 dengan pembuat LHP RISMAN

EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.36);

392) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 Nopember 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Nopember 2006 Nomor 0006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KB tanggal 15 Desember 2006 Nomor 5/RLHP/LOG/MK/XI/06 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.37);

393) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 31 Oktober 2006 periode tanggal 16 s.d 31 Desember 2006 Nomor 0003 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.38);

394) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Madukoro tanggal 30 September 2006 periode tanggal 16 s.d 30 Oktober 2006 Nomor 0002 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.39);

395) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 31 Desember 2006 periode II Nomor 10/RLHP/BBS/MK/XII/2006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 15 Desember 2006 Nomor 0002 periode tanggal 1 s.d. 15 Desember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.40);

396) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal  
Hal. 411 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 September 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 September 2006

Nomor 0001 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 Desember 2006 Nomor 0010 periode tanggal 16 s.d. 30 Desember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.41);

397) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Desember 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Desember 2006 Nomor 0009 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 Nopember 2006 Nomor 0008 periode tanggal 16 s.d. 30 nopember 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.42);

398) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Nopember 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Nopember 2006 Nomor 0007 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 28 Oktober 2006 Nomor 0006 periode tanggal 16 s.d. 28 Oktober 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.43);

399) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Oktober 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 Oktober 2006 Nomor 0005 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 30 September 2006

Nomor 0004 periode tanggal 16 s.d. 30 September 2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.44);

400) 2 (dua) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Hal. 412 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 September 2006 periode I tanggal 1 s.d 15 September 2006 Nomor 003/RLHP/BBS/MK/IX/2006 dan fotokopi dilegalisir RLHP KBK tanggal 31 Agustus 2006 Nomor 002/RLHP/BBS/MK/VIII/2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.45);

401) 1 (satu) lembar foto kopi dilegalisir Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Madukoro tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 001/RLHP/BBS/MK/VIII/2006 dengan pembuat LHP RISMAN EFENDI yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.46);

402) 2 (dua) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan (RLHP) PT. Selaras Abadi Utama tahun 2006 yang dibuat oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.47);

403) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 01 s.d. 15 Desember 2006 Nomor: 0005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.48);

404) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 01 s.d. 15 Oktober 2006 Nomor: 0001 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.49);

405) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16 s.d. 31 Oktober 2006 Nomor: 0002 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.50);

406) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16  
Hal. 413 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

s.d. 31 Oktober 2006 Nomor: 0013 yang disahkan oleh P2LHP

FACHRUDDIN SIREGAR.(T.51);

407) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 16

s.d. 31 September 2006 Nomor: 0011 yang disahkan oleh P2LHP

FACHRUDDIN SIREGAR.(T.52);

408) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15

September 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN

SIREGAR.(T.53);

409) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal

31

Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.

(T.54);

410) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15

Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.

(T.55);

411) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 31

Juli 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.56);

412) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15

Juli 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.57);

413) 4 (empat) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil

Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama

tanggal 15 September 2006 yang disahkan oleh P2LHP

Hal. 414 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FACHRUDDIN SIREGAR.(T.58);

414) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 30 Juni 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.

(T.59);

415) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Juni 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.

(T.60);

416) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Selaras Abadi Utama tanggal 15 Mei 2006 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.

(T.61);

417) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Laporan Hasil Penebangan dengan RKT Nomor : Kpts. 522.2/PK/2334 tanggal 3 Juli 2006 atas

nama PT. TRIOMAS FDI yang ditandatangani oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.62);

418) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan September 2006 Nomor : 0004 tanggal 30 September 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.63);

419) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006 Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.64);

420) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006

Hal. 415 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0009 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS

FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.65);

421) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006

Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS

FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.66);

422) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Nopember 2006

Nomor : 0008 tanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT.TRIOMAS

FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.67);

423) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember

2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama

PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).

(T.68);

424) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember

2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama

PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).

(T.69);

425) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Pertengahan bulan Desember

2006 Nomor : -- tanggal 15 Desember 2006 atas nama

PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).

(T.70);

426) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Desember 2006

Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI

yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.71);

Hal. 416 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 427) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.72);
- 428) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) periode Akhir bulan Desember 2006 Nomor : -- tanggal 31 Desember 2006 atas nama PT.TRIOMAS FDI yang disahkan oleh Sdr. ARMIZAR (P2LHP).(T.73);
- 429) 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI (SK : Kpts.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006) dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.74);
- 430) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- Juni 2006 Nomor 02/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.75);
- 431) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 14 Juli 2006 Nomor 03/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.76);
- 432) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- Juli 2006 Nomor 04/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.77);
- 433) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil  
Hal. 417 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 05/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.78);

434) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 31 Agustus 2006 Nomor 06/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.79);

435) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal -- September 2006 Nomor 07/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.80);

436) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal - September 2006 Nomor 08/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.81);

437) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 19 Oktober 2006 Nomor 09/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.82);

438) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 22 Nopember 2006 Nomor 11/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.83);

Hal. 418 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 8 Desember 2006 Nomor 12/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.84);
- 440) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 22 Desember 2006 Nomor 13/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.85);
- 441) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 12 Januari 2007 Nomor 14/Log yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.86);
- 442) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 29 juni 2006 Nomor 02/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.87);
- 443) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal -- juli 2006 Nomor 03/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP. (T.88);
- 444) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal -- juli 2006 Nomor 04/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.

Hal. 419 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(T.89);

445) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal 18 Agustus 2006 Nomor 05/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.90);

446) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 2 September 2006 Nomor 06/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.91);

447) 1 (satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal - September 2006 Nomor 07/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.92);

448) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal - September 2006 Nomor 08/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.93);

449) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode I tanggal - Nopember 2006 Nomor 11/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.94);

450) 1(satu) lembar photo copy Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) atas nama PT.MERBAU PELALAWAN LESTARI periode II tanggal 5 Desember 2006 Nomor Hal. 420 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12/BBS yang disahkan oleh Sdr. TRI RAHAYU WIDODO selaku P2LHP.(T.95);

451) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi KB, KBK, dan BBS PT. Mitra Taninusa Sejati sesuai Ijin Nomor Kpts/522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.96);

452) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.97);

453) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.98);

454) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.99);

455) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.100);

456) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.101);

457) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.102);

458) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.(T.103);

Hal. 421 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.104);

460) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.105);

461) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.106);

462) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.107);

463) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.108);

464) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R. (T.109);

465) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II

Hal. 422 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.110);

466) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I

bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.111);

467) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II

bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.112);

468) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I

bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.113);

469) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II

bulan Nopember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.114);

470) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I

bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI

A.R. (T.115);

471) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II

bulan Desember 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.116);

472) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I

bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

Hal. 423 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(117);

473) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Agustus 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T118);

474) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T.119);

475) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan September 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T120);

476) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T121);

477) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2006 yang disahkan oleh P2LHP ZULFAHMI A.R.

(T122);

478) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2006 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya.(T123);

479) 4 (empat) lembar Daftar Realisasi Laporan Hasil Penebangan atas nama PT. Mitra Taninusa Sejati tahun 2005 yang dibuat oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T124);

480) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan

Hal. 424 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.  
(125);

481) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T126);

482) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T127);

483) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(128);

484) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T129);

485) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode khusus bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.130);

486) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. Mitra Taninusa Sejati periode khusus periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T.131);

487) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II Hal. 425 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.132);

488) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I  
bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.133);

489) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II  
bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.134);

490) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I  
bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.135);

491) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II  
bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.136);

492) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II  
bulan Oktober 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.137);

493) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I  
bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
SIREGAR.(T.138);

494) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II  
bulan Nopember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN  
Hal. 426 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SIREGAR.(T139);

495) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode I bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T140);

496) 1 (satu) lembar foto kopi Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Bahan Baku Serpih (RLHP-BBS) PT. Mitra Taninusa Sejati periode II bulan Desember 2005 yang disahkan oleh P2LHP FACHRUDDIN SIREGAR.(T141);

497) 1 (satu) lembar RLHP RKT 2005 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati (SK. RKT No; Kpts.522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005) yang ditandatangani oleh Direktur Erwin beserta lampirannya.(T142);

498) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) Nomor : 04/ SSI-01/ SK/VII/ 2006 ,tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE. , yang telah.- (T143);

499) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) Nomor : 04/SSI-01/ SK/VII/ 2006, tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE, yang telah .(T.144);

500) 1( satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 08-08- 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp120.851.500,- (Seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 08-08- Hal. 427 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.39.187.834,- (Tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah ).(T145);

501) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T146);

502) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(T147);

503) 1( Satu) Lembar yang telah Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.49.690.300,-( Empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)

dan Slip setoran yang telah Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Hal. 428 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebesar Rp.144.898.681,86,- ( Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma 86/100 rupiah)-(T148);

504) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 06/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 05 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI,

di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T149);

505) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah Nomor : 08/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T150);

506) 1( satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 07 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 143.098.399 ( Seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 07 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar

Rp.49.670.280,- ( Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua puluh delapan rupiah ).--(T151);

Hal. 429 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi

Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T152);

508) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana

Reboisasi ( DR ) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di

Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T153);

509) 1( satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal

21 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 151.822.901,04,-

(Seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu koma 40/100 rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 21 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp.51.469.550,- ( Lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah ) (T154);

510) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi

Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 10/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh

Hal. 430 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T155);

511) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T156);

512) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran

Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.45.170.500,- ( Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar

Rp.137.469.119,92,- ( Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan belas koma 92/100 rupiah ).-(T157);

513) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T158);

514) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Hal. 431 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih

ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T159);

515) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 52.937.670,- ( Lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah ).-(T160);

516) 1( Satu ) Lembar yang telah dilagalisir Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.160.166.823,6 ,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus ddual puluh tiga koma 6/100 rupiah). (T161);

517) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T162);

518) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Dana Reboisasi ( DR ) yang telah Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T163);

519) 1 (Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal

Hal. 432 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER

LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.33.259.200,-(Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah ) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar

Rp.100.646.381,88,- ( Seratus juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu 88/100 rupiah ).(T164);

520) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 27 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah). (T165);

521) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T166);

522) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(T167);

523) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri,  
Hal. 433 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

18-12- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.108.323.510,- ( Seratus delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah ) ,dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 18-12-2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar

Rp.329.067.840,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah ).-(T168);

524) 1( Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(T169);

525) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(T170);

526) 1( Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp.141.668.820,- ( Seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan juta

Hal. 434 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh rupiah) dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri,

tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar US \$ 138.891,00 ( Seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu US Dollar ).--(T172);

527) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 011/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk

Ds Tumang Kab. Siak yang ditandatangani oleh M.YAMIN dan P2LHP WINARTO.-(T172);

528) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 010/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN -(T173);

529) 1 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu

Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 009/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN - (T174);

530) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/ 2006 ,

Hal. 435 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN--  
(T175);

531) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 007/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk  
Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.(T176);

532) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 006/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk  
Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (T177);

533) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.  
(T178);

534) 1 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 004/SSL/TMG/ 2006 ,  
tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN  
(T179);

535) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 003/SSL/TMG/VIII/  
2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--  
(T180);

536) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 002/SSL/TMG/VIII  
Hal. 436 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.  
(T181);

537) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat ( RLHP-KB ) yang telah Nomor : 001/SSL/TMG/VII/  
2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI  
untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh  
M.YAMIN.--(T182);

538) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm, yang  
telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP  
WINARNO.--(T183);

539) 1(satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor :  
004/SP/SSL/I/2005 yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)  
bulan januari 20051( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan  
Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon  
20-29 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal  
16 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds.  
Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN  
(T184);

540) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang  
telah Nomor : 009/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 29 November  
2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab.  
Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(T185);

541) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan  
Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang

Hal. 437 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Nomor : 008/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .-- (T186);

542) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 007/ SSL/TMG/X/ 2006, tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T187);

543) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T188);

544) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO--(T189);

545) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu : Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (T190);

546) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang Hal. 438 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T191);

547) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (T192);

548) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 001/ SSL/TMG/VII/ 2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T193);

549) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm, yang telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T194);

550) 1 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil ( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T195);

551) 1 ( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Hal. 439 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 009/ SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .(T196);

552) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(T197);

553) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK ) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .-(T198);

554) 1 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T199);

555) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO--(T200);

556) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang

Hal. 440 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(T201);

557) 1( satu ) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil( RLHP-KBK )jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditandatangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO- (T202);

558) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) RKT tahun 2006. (T203);

559) 11 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat ( RLHP-KB ) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) tahun 2006 dengan RKT Nomer : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomer : 01/RLHP/KB/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomer : 11/RLHP /KB/NT/XII/2006. (T204);

560) 11 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil ( RLHP-KBK ) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT ( NTFP ) tahun 2006 dengan RKT Nomer : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomer : 01/RLHP/KBK/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomer: 11/RLHP/ KBK/NT/XII/2006.(T205);

561) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) bulan Desember RKT Hal. 441 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006(T206);

562) 1 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) bulan Juli s/d Desember RKT tahun 2006. (T207);

563) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan / Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.MITRA TANINUSA SEJATI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2225, Tanggal 23 Juni 2006. (Penghitungan periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006) (U.1);

564) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.TRIOMAS FDI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2334, Tanggal 03 Juli 2006.( Penghitungan periode Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U2);

565) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.RIMBA MUTIARA PERMAI Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522.2/PK/2226, Tanggal 23 Juni 2006. (Penghitungan periode 01 Juli 2006 s/d 05 April 2007). (U3);

566) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.UNISERAYA Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT No: KPTS /522/PK/2331, Tanggal 03 Juli 2006..( penghitungan periode Juli 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U4);

567) 1 ( Satu ) Buku Asli Penghitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi PT.MERBAU PELALAWAN Tahun 2007, sesuai dengan SK RKT IUPHHK-HTNo: KPTS /522.2/PK/2051, Tanggal 13 Juni 2006. SK Hal. 442 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKT IUPHHK-HT Tahun 2006( Revisi Target Produksi Nomor :KPTS.522.2/ PK/ 4463 tanggal 30 November 2006( SPT IUPHHK-HT TA 2006 ) (U5);

568) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan SK.RKT- UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Ijin CV.ALAM LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK-HT No.522.2/PK/3274 Tanggal 01 September 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT CV.ALAM LESTARI (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ). (U6);

569) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan - UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Ijin PT. SELARAS ABADI UTAMA sesuai dengan Keputusan SK.RKT-UPHHK-HT No.522.2/PK/1005 Tanggal 29 Maret 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT PT.SELARAS ABADI UTAMA (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U7);

570) 1 ( Satu ) buku Asli Penghitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan - UPHHK HT Tahun 2006 Pemegang Ijin PT. MADUKORO sesuai dengan Keputusan SK RKT- UPHHK-HT No.522.2/PK/2520 Tanggal 10 Juli 2006 ( Surat Perhitungan Pemungutan /Pembayaran dan Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Rencana Kerja Tahunan -IUPHHK HT PT.MADUKORO (Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 ).(U8);

571) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1251205 tanggal 01 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi

Hal. 443 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 159.960.276,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Desember 2005 dengan nominal Rp. 159.960.276(U9);

572) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1331205 tanggal 16 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 168.997.231,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 19 Desember 2005 dengan nominal Rp. 168.997.231(U10);

573) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1381205 tanggal 19 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 45.063.000,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 45.063.000(U11);

574) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1391205 tanggal 19 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 25.234.300,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 25.234.300. (U12);

575) 1 (satu) lembar asli SPP PSDH No: 1431205 tanggal 27 Desember 2005 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan kodefikasi 0606D14MTNS0512 jumlah Rp. 116.275.165,- pada Bank Mandiri

Hal. 444 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001 terlampir 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2005 dengan nominal Rp. 116.275.165(U13);

576) 1(satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) nomor : 060106 tanggal 02 Januari 2006, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan Kodefikasi : 0606D14MTNS0601, jumlah US \$ 114.784,32 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004203904, terlampir 1 (satu) lembar photo copy Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri tanggal 07 Pebruari 2006 yang telah dilegalisir.(U14);

577) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) nomor :060106 tanggal 02 Januari 2006, atas nama PT. MITRA TANINUSA SEJATI dengan Kodefikasi : 0606D14MTNS0601, jumlah Rp.314.731.200,- pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 1020004204001, terlampir 1 (satu) lembar photo copy Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 07 Pebruari 2006 yang telah dilegalisir.(U15);

578) Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal ...Januari 2007 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(U16);

579) 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.(U17);

Hal. 445 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

580) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO. (U18);

581) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan pengiriman RKT Tahun 2006 PT. Seraya Sumber Lestari SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh WINARTO (U19);

582) 1 (satu) lembar Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari nomor ijin : Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006, nomor referensi : 0609A15SRSLXXXX yang ditandatangani oleh WINARTO (U20);

583) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Bina Daya Bintara tahun 2006.(U21);

584) 4 (empat) rangkap rekapitulasi daftar target produksi dan realisasi serta hasil penjualan PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2006.(V1);

585) 2 (dua) rangkap rekap penerimaan dari hasil land clearing di areal kerja IUPHHKHT PT. Rimba Mutiara Permai yang ditandatangani Erwin.(V2);

586) 3 (tiga) rangkap rekap penerimaan dari hasil land clearing di areal kerja IUPHHKHT PT. Mitra Taninusa Sejati yang ditandatangani Erwin.(V3);

587) 2 (dua) rangkap Rekapitulasi penjualan PT. Uniseraya tahun 2006 ditandatangani Dirut SUPENDI.(V4) ;

588) 1 (satu) lembar Rekapitulasi penjualan PT. Triomas FDI tahun 2006 yang ditandatangani Dirut SUPENDI(V5). ;

589) 4 (empat) lembar foto kopi dilegalisir Reapan Pendapatan Kayu Chips PT. Merbau Pelalawan Lestari tahun 2006 yang

Hal. 446 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani Jimmy Bonaldi Pangestu berikut lampiran laporan perhitungan laba rugi per 31 Desember 2006.(V6);

590) 6 (enam) lembar laporan Produksi dan Pengangkutan Kayu PT. NTFP tahun 2006 (V7);

591) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 26 Oktober 1999 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W1);

592) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 3 November 2002 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W2);

593) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 11 November 2005 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W3);

594) 1 (satu) lembar Peta foto citra Landsat liputan tanggal 1 Mei 2007 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, skala 1 : 350.000.(W4);

595) 1 (satu) lembar perhitungan luas penutupan lahan hutan dan non hutan pada areal pemanfaatan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau atas nama perusahaan-perusahaan tersebut di atas pada tahun 1999, 2002, 2005 dan 2007.(W5);

596) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W6);

597) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W7);

598) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W8);

Hal. 447 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

599) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI (W9);

600) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Desember 1999 dan 26 Oktober 1999 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W10);

601) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 dan 03 November 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W11);

602) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 11 November 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W12);

603) 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W13);

604) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 31 Maret 2001 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W14);

605) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 04 Maret 2004 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W15);

606) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Agustus 2006

Hal. 448 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W16);

607) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(W17);

608) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 September 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W18);

609) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W19);

610) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W20);

611) 1 ( Satu ) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (W21);

612) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan

Persediaan Kayu CDK Langgam tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh RUKDIMAN PAKPAHAN.(X1);

613) 3 (tiga) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Sorek tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh HAMBALI.(X2);

614) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Produksi, Pengangkutan dan Persediaan Kayu CDK Penyalai tanggal 27 Pebruari 2007 yang ditanda tangani oleh H. SYAMSUL ANWAR.(X3);

615) 2 (dua) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Rekapitulasi Hal. 449 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penjualan dan Iuran PSDH/DR PT. Selaras Abadi Utama sektor  
Kuala Tolam dan Pelalawan Januari - Desember 2006. (X4);

616) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT.TRIOMAS FDI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /012 Tanggal 29 Januari 2003 luas 9.625 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y1);

617) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /009 Tanggal 27 Januari 2003 luas 7.300 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006. (Y2);

618) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 Pemegang ijin PT. MITRA TANINUSA SEJATI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003 /009 Tanggal 27 Januari 2003 luas 7.300 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2005.(Y3);

619) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/XII/2002 /004 Tanggal 17 Desember 2002 luas 5,590 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y4);

620) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin Hal. 450 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT. RIMBA MUTIARA PERMAI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 Tanggal 27 Januari 2003 luas 9.000 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y5);

621) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. ALAM LESTARI sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/015 Tanggal 30 Januari 2003 luas 3.300 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y6);

622) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT. SELARAS ABADI UTAMA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002 luas 13.600 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y7);

623) 1 ( Satu ) buku Asli Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT.UNISERAYA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 Tanggal 30 Desember 2002 luas 35.000 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2006.(Y8);

624) 1 ( Satu ) buku Asli Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 Pemegang ijin PT.MITRA HUTANI JAYA sesuai dengan Keputusan IUPHHK Pada Hutan Tanaman No.522.21/ IUPHHKHT/I/2003/014 Tanggal 29 Januari 2003 luas 10.000 HA di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2005. (Y9);

Hal. 451 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625) Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak  
a.n

PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Desember 2005,  
ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(Y10);

626) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An.  
PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.  
(Y11);

627) 1 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2006 PT  
National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani  
oleh Direktur Utama Heriyanto (Y12);

628) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An.  
PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.  
(Y13);

629) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An.  
PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(Y14);

630) 1(satu ) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan  
Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An.  
PT.BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.  
(Y15);

631) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname  
Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil a.n. PT. SELARAS ABADI UTAMA yang  
diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan  
Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Hal. 452 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan

Propinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/1005 tanggal 29 Maret 2006.

(Z1);

632) 1 (satu) buah buku Photo Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu RKT-UPHHK-HT Tahun 2006 a.n. PT. TRIOMAS FDI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2334 tanggal 3 juli 2006.(Z2);

633) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat Tahun 2006 a.n. PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Kec. Kerumutan CDK SOREK, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau (SK RKT) Nomor : KPTS.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006 dan SK Revisi Target Produksi Nomor : KPTS.522.2/PK/4463 tanggal 30 Nopember 2006.(Z3);

634) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname (SO) Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor :

KPTS/522.2/PK/8205 tanggal 5 Maret 2005 dan Tambahan Target RKT Nomor : KPTS.522.2/PK/9534 tanggal 21 Oktober 2005.)(Z4);

635) 1 (satu) buah buku Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat, Kayu Bulat Kecil, dan bahan Baku Serpih RKT UPHHK-HT Tahun 2006 a.n. PT. MITRA TANINUSA SEJATI yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Bulan Januari 2007 Hal. 453 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2225 tanggal 23 Juni 2006.(Z5);

636) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2332 tanggal 3 juli 2006).(Z6);

637) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. RIMBA MANDAU LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006).(Z7);

638) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. BALAI KAYANG MANDIRI (SK No. KPTS.522.2/PK/2942 tanggal 7 Agustus 2006).(Z8);

639) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (SK No. KPTS.522.2/PK/2223 tanggal 23 Juni 2006).(Z9);

640) 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. BINA DAYA BINTARA (SK No. KPTS.522.2/PK/2224 tanggal 23 Juni 2006) (Z10);

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara .**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 454 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2013** oleh kami :

**Rustam Idris, SH** sebagai Ketua Majelis, **Parlindungan Napitupulu,**

**SH.MHum.** sebagai Hakim Anggota I dan **K.A. Syukri, SH** Hakim Ad

Hoc sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari **Rabu**

tanggal **16 Januari 2013** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut serta dibantu oleh **Yusnidar** Panitera

Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Parlindungan Napitupulu, SH.MHum**

**Rustam**

**Idris, SH**

**K.A. Syukri, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**Yusnidar**

Hal. 455 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 456 dari 436 Hal No. 26/PID.SUS/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)